



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RISALAH HASIL RAPAT, KEGIATAN DAN
KARYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020

Disusun Oleh :

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PALANGKA RAYA, TAHUN 2020

DAFTAR ISI

	Halaman
1. RAPAT PARIPURNA KE – 14 PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN I (PERTAMA) TAHUN SIDANG 2020 SEKALIGUS RAPAT PARIPURNA KE – 1 PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II (KEDUA) TAHUN SIDANG 2020 -----	1 – 31
1. Pidato Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Penutupan Masa Persidangan I (pertama) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020 ----	8 – 19
2. Pidato Gubernur Kalimantan Tengah pada Penutupan Masa Persidangan I (pertama) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020 -----	20 – 30
3. Pembacaan Do'a Penutupan Masa Persidangan I (pertama) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020 -----	31
2. RAPAT PARIPURNA KE – 2 -----	32 – 141
1. Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2019 -----	41 – 49
2. Laporan Hasil Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, ke Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah I, II, III, IV dan V pada Masa Persidangan I (Pertama) Tahun Sidang 2020.	
- DAPIL KALTENG I -----	50 – 75
- DAPIL KALTENG II -----	76 – 90
- DAPIL KALTENG III -----	91 – 113
- DAPIL KALTENG IV -----	114 – 132
- DAPIL KALTENG V -----	133 – 141

3.	RAPAT PARIPURNA KE – 3 -----	142 – 207
	Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalimantan tengah, atas Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan tengah, Tahun Anggaran 2019.	
	- Fraksi PDI-Perjuangan -----	150 – 165
	- Fraksi Partai Golongan Karya -----	166 – 171
	- Fraksi Partai Demokrat -----	172 – 181
	- Fraksi Partai Nasdem -----	182 – 188
	- Fraksi Partai Gerindra -----	189 – 194
	- Fraksi PKB -----	195 – 199
	- Fraksi Gabungan (FGP4H) -----	200 – 207
4.	RAPAT PARIPURNA KE – 4 -----	208 – 233
	Jawaban Gubernur Kalimantan Tengah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan tengah, Tahun Anggaran 2019 -----	215 – 233
5.	RAPAT PARIPURNA KE – 5 -----	234 – 265
	1. Laporan Hasil Rapat Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rangka membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan -----	242 – 254
	2. Penandatanganan Persetujuan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan -----	255 – 257
	3. Pendapat Akhir/Pidato Gubernur Kalimantan Tengah atas Penandatanganan Persetujuan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan -----	258 – 265

6. RAPAT PARIPURNA KE – 6 -----	266 – 297
1. Laporan Hasil Rapat Gabungan yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dalam Rangka Membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 -----	274 – 284
2. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 -----	285 – 286
3. Pendapat Akhir/Pidato Gubernur Kalimantan Tengah atas Penandatanganan Persetujuan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 -----	287 – 297
7. RAPAT PARIPURNA KE – 7, Penutupan Masa Persidangan II (Kedua) Tahun Sidang 2020, sekaligus Rapat Paripurna Ke – 1 Pembukaan Masa Persidangan III (Ketiga) Tahun Sidang 2020, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah -----	298 – 335
1. Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, sekaligus Pidato Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 dan Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 -----	306 – 319
2. Penyerahan Naskah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, dari Gubernur Kalimantan Tengah kepada Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah -----	320 – 324
3. Pidato Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Penutupan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan III (ketiga) Tahun Sidang 2020 ---	325 – 334
4. Pembacaan Do'a Penutupan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan III (ketiga) Tahun Sidang 2020 -----	335

**RAPAT PARIPURNA KE – 14 PENUTUPAN
MASA PERSIDANGAN I (PERTAMA) TAHUN SIDANG 2020
SEKALIGUS RAPAT PARIPURNA KE – 1 PEMBUKAAN
MASA PERSIDANGAN II (KEDUA) TAHUN SIDANG 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

=====

Hari : Senin
Tanggal : 15 Juni 2020
Pukul : 10.40 WIB
Sifat Sidang : Terbuka untuk Umum
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. S. Parman No. 02 Palangka Raya.

A c a r a : 1. Pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Rapat.
2. Pidato Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Penutupan Masa Persidangan I (pertama) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020.
3. Pidato Gubernur Kalimantan Tengah pada Penutupan Masa Persidangan I (pertama) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020.
4. Pembacaan Do'a Penutupan Masa Persidangan I (pertama) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020.
5. P e n u t u p .

PimpinanRapat : H. Jimmy Carter, WakilKetuaDewanPerwakilan Rakyat Daerah ProvinsiKalimantan Tengah.

Sekretaris : Tantan, SH, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Jumlah Anggota : 45 Orang.

1. FraksiPDI-Perjuangan.	12	Orang
2. FraksiPartai Golongan Karya.	7	Orang
3. FraksiPartaiDemokrat.	6	Orang
4. FraksiPartaiNasdem.	5	Orang
5. FraksiPartaiGerindra.	5	Orang
6. FraksiPKB.	4	Orang
7. FraksiGabungan (FGP4H).	6	Orang

Hadir

: 31 Orang.

1. Wiyatno, SP	Fraksi PDI-Perjuangan
2. Drs. Yohannes Freddy Ering, M.Si	Fraksi PDI-Perjuangan
3. Ir. Yulilis	Fraksi PDI-Perjuangan
4. Drs. Duwel Rawing	Fraksi PDI-Perjuangan
5. Ina Prayawati, SE	Fraksi PDI-Perjuangan
6. Ir. Lohing Simon	Fraksi PDI-Perjuangan
7. Irawati, S.Pd	Fraksi PDI-Perjuangan
8. Hj. Maryani Sabran	Fraksi PDI-Perjuangan
9. Ferry Khaidir	Fraksi PDI-Perjuangan
10. Ir. H. Abdul Razak	Fraksi Partai Golkar.
11. Sri Neni Trianawati, SE	Fraksi Partai Golkar.
12. Sinar Kumala	Fraksi Partai Golkar.
13. H. Jimmy Carter	Fraksi Partai Demokrat.
14. Heri Santoso, ST	Fraksi Partai Demokrat.
15. Ir. H. Muhajirin, MP	Fraksi Partai Demokrat.
16. Siswandi	Fraksi Partai Demokrat.
17. Yeni Maria Marselina Katha	Fraksi Partai Demokrat.
18. Toga Hamonangan Nadeak, SH., MH	Fraksi Partai Nasdem.
19. H. Achmad Rasyid	Fraksi Gerindra.
20. Jainudin Karim, SE	Fraksi Gerindra.
21. Dra. Kuwu Senilawati	Fraksi Gerindra.
22. Andayani, SE	Fraksi Gerindra.
23. Drs. H. Sugiyarto, MAP	Fraksi Gerindra.
24. H. Purman Jaya, S.Sos	Fraksi PKB.
25. Fajar Hariady	Fraksi PKB.
26. Evi Kahayanti, S.Sos	Fraksi PKB.
27. Tomy Irawan Diran, SE	Fraksi Gabungan (FGP4H).
28. Natalia, ST	Fraksi Gabungan (FGP4H).
29. Sirajul Rahman, S.Hut., M.I.Kom	Fraksi Gabungan (FGP4H).
30. Sengkon, SE	Fraksi Gabungan (FGP4H).
31. H. Achmad Amur, SH, MH	Fraksi Gabungan (FGP4H).

Tidak Hadir

: 14 Orang.

		Ket :
1. H. Jubair Arifin	Fraksi PDI-Perjuangan	I z i n
2. Ir. Artaban, MH	Fraksi PDI Perjuangan	I z i n
3. Andina Thesia Narang, B. Comm	Fraksi PDI Perjuangan	I z i n
4. Dra. Siti Nafsiah, M.Si	Fraksi Partai Golkar.	I z i n
5. H. Maruadi, SH, S.Sos	Fraksi Partai Golkar.	I z i n
6. H. Sudarsono, SH	Fraksi Partai Golkar.	I z i n
7. Sarwani	Fraksi Partai Golkar.	Alm.
8. H. Muhammad Sriosako, S.Sos., MH	Fraksi Partai Demokrat.	I z i n
9. Faridawaty Darland Atjeh, SE, MM	Fraksi Partai Nasdem.	I z i n
10. Bryan Iskandar, SE	Fraksi Partai Nasdem.	I z i n
11. Henry, SE, MH	Fraksi Partai Nasdem.	I z i n
12. dr. Niksen S. Bahat	Fraksi Partai Nasdem.	I z i n
13. Hj. Rusita Irma, S.Pi	Fraksi PKB.	I z i n
14. Rizki Amalia Darwan Ali, BA(Hons), MSc	Fraksi Gabungan (FGP4H).	I z i n

Pimpinan
H. Jimmy Carter

: **Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera dan Selamat Siang.**

Rapat Paripurna ke – 14 Penutupan Masa Persidangan I (pertama) sekaligus Rapat Paripurna ke – 1 Pembukaan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, berdasarkan kehadiran Anggota Dewan berjumlah 23 orang, maka **korum tercapai.**

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT, Tuhan yang maha Kuasa, Rapat Paripurna ke – 14 Penutupan Masa Persidangan I (pertama) sekaligus Rapat Paripurna ke – 1 Pembukaan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pada siang hari ini, Senin 15 Juni 2020, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

----- **Ketukan Palu Satu Kali** -----

Marilah kita menyanyikan Lagu Kebangsaan **“Indonesia Raya”**

Pimpinan
H. Jimmy Carter

: Hadirin dimohon berdiri.

----- **Menyanyikan Lagu Indonesia Raya** -----

Pimpinan
H. Jimmy Carter

: Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Yang terhormat :

- Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah ;
- Semua Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah ;
- Mewakili Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Palangka Raya ;
- Mewakili Kepala Badan, Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta undangan sekalian yang saya muliakan.

Pertama – tama marilah kita selalumpersembahkan pujidansyukurkehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehinggakita dapat hadirmengikuti Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, pada siang hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang sayahormati,

Adapun agenda Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini adalah sebagai berikut :

- Agenda Pertama : Pidato Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Penutupan Masa Persidangan I (pertama) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020;
- Agenda Kedua : Pidato Gubernur Kalimantan Tengah pada Penutupan Masa Persidangan I (pertama) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020;
- Agenda Ketiga : Pembacaan Do'a Penutupan Masa Persidangan I (pertama) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020.

HadirinRapatParipurnaDewan yang sayahormati,

Pada hari ini kita melaksanakan Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I (pertama) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, untuk itu saya akan membacakan Pidato, sebagai berikut.

Wakil Ketua
DPRD Prov. Kalteng
H. Jimmy Carter : Teks terlampir.

Selanjutnya kita akan mendengarkan, Pidato Gubernur Kalimantan Tengah pada Penutupan Masa Persidangan I (pertama) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, kepada Saudara Gubernur dengan hormat kami persilakan.

Wagub Kalteng
Habib Ismail Bin Yahya : Teks Terlampir.

Pimpinan
H. Jimmy Carter : Demikian tadi telah kita dengarkan bersama Pidato Saudara Gubernur Kalimantan Tengah, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

HadirinRapatParipurnaDewan yang sayahormati,

Untuk mensyukuri rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mohon bimbingan serta penyertaan-Nya, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita selanjutnya,marilah kita bersama-sama Do'a, yang akan dipimpin oleh petugas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, kami persilakan.

Petugas dari
Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Prov. Kalteng
H. Fahrudin, S.Ag : Teksterlampir.

Pimpinan : Terima kasih.
H. Jimmy Carter

HadirinRapatParipurnaDewan yang sayahormati,

Dengan demikian berakhirlah Agenda Rapat Paripurna ke – 14 Penutupan Masa Persidangan I (pertama) sekaligus Rapat Paripurna ke – 1 Pembukaan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan, mengucapkan terima kasih, kepada Saudara Wakil Gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan hadirin sekalian, atas kehadiran serta perhatiannya, mengikuti Rapat Paripurna Dewan dari awal hingga selesai, dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah, RapatParipurna, dinyatakanselesaianditutup.

----- **Ketuk Palu Tiga Kali** -----

Pimpinan : Terima kasih
H. Jimmy Carter

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rapat Paripurna berakhir dan
Ditutup Pukul : 11.50 WIB

Palangka Raya, 15 Juni 2020

MENGETAHUI :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

WAKILKETUA,



H. JIMMY CARTER

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SEKRETARIS,



**TANTAN, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640421 199203 1 012**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan S. Parman No. 2 Telpn (0536) 3236320, Fax. 3236329 Palangka Raya 73112

Palangka Raya, 11 Juni 2020

Nomor : 005/867/DPRD/2020
Lampiran : -
Perihal : **RAPAT PARIPURNA**

K e p a d a

Yth.

di -

PALANGKA RAYA

Bersama ini Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr(i) pada **Rapat Paripurna Ke -14 (Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020), sekaligus Rapat Paripurna ke - 1 (Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020)**, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : SENIN
Tanggal : 15 Juni 2020
Pukul : 10.30 WIB (setelah Rapat Paripurna Istimewa)
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
A c a r a : 1. Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020.
2. Pidato Gubernur Kalimantan Tengah.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

K E T U A,

WIYATNO, SP

Catatan :

1. Pakaian
 - Sipil : Pakaian Sipil Resmi (PSR) / menyesuaikan.
 - TNI/POLRI : Menyesuaikan.
 - Ibu-ibu : Menyesuaikan.
2. Undangan Hadir 15 (Lima Belas) Menit sebelum Acara dimulai.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan S. Parman No. 2 Telp. 0536 – 3236320 Fax 3236329 Palangka Raya 73112

A c a r a : RapatParipurnaKe-14 PenutupanMasaPersidangan I
(Pertama)TahunSidang 2020, sekaligus Rapat Paripurna
Ke – 1 Pembukaan Masa Persidangan II (Kedua)
Tahun Sidang 2020DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
=====

- H a r i : SENIN
- T a n g g a l : 15 JUNI 2020
- P u k u l : 10.30 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya.

Susunan Acara :

1. Pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Rapat.
2. Pidato Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Penutupan Masa Persidangan I (pertama) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020.
3. Pidato Gubernur Kalimantan Tengah pada Penutupan Masa Persidangan I (pertama) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020.
4. Pembacaan Do'a Penutupan Masa Persidangan I (pertama) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020.
5. P e n u t u p.

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

T A N T A N, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640421 199203 1 012



P I D A T O
KETUA DEWAN PEPWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



PADA RAPAT PARIPURNA KE-14
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN I, SEKALIGUS
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2020

PALANGKA RAYA, 15 JUNI 2020

SAMBUTAN KETUA DPRD PROV. KALTENG

1

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULAHI WABARAKATUH,

SYALOM, OM SWASTIASTU,

"TABE SALAMAT LINGU NALATAI, SALAM SUJUD KARENDEM
MALEMPANG, ADIL KATALINO, BACURAMIN KA'SARUGA,
BASENGAT KA'JUBATA"

SALAM SEJAHTERA DAN SELAMAT PAGI

YTH. SAUDARA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH;

YTH. SAUDARA WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH;

YTH. SAUDARA WAKIL-WAKIL KETUA DAN SEMUA
ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;

YTH. SAUDARA KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH **IRJEN
Pol. Dr. DEDI PRASETYO, M.Hum, M.Si, MM.,**
ATAU YANG MEWAKILI;

YTH. SAUDARA DANDREM 102 PANJU PANJUNG
KALIMANTAN TENGAH, **BRIGJEN TNI PURWO
SUDARYANTO.** ATAU YANG MEWAKILI;

YTH. SAUDARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN
TENGAH, **Dr. MUKRI, SH., MH.** ATAU YANG
MEWAKILI;

YTH. SAUDARA KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA
RAYA ATAU YANG MEWAKILI;

YTH. SAUDARA KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
KALIMANTAN TENGAH ATAU YANG MEWAKILI;

YTH. SAUDARA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH;

YTH. ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH;

YTH. SAUDARA KEPALA BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH;

YTH. INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;

YTH. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;

YTH. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH;

YTH. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;

YTH. KEPALA BADAN, KEPALA BIRO SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;

YTH. KELOMPOK PAKAR DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;

YTH. WARTAWAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK
SERTA UNDANGAN SEKALIAN YANG SAYA
MULIAKAN.

MARILAH KITA SELALU MEMPERSEMBAHKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA KUASA, YANG SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA KEPADA KITA, SEHINGGA DAPAT HADIR DAN MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN I, SEKALIGUS PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, PADA SIANG INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

PADA KESEMPATAN INI, PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DEWAN, "TURUT BERDUKACITA" TELAH MENINGGAL DUNIA, BAPAK Drs. H. RAFFLES MD BADDAK, M.Si, SUAMI DARI Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M.Si (ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2019-2024).

SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

SUDAH KITA KETAHUI BERSAMA, BAHWA BANGSA INDONESIA SAAT INI, TIDAK TERKECUALI KALIMANTAN TENGAH SEDANG MENGALAMI UJIAN YANG CUKUP BERAT, YAITU ADANYA WABAH PANDEMI COVID-19, YANG BUKAN HANYA BERDAMPAK PADA ANCAMAN KESEHATAN DAN JIWA MANUSIA, TETAPI JUGA TERHADAP TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA DAN POLITIK.

KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL (*SOCIAL DISTANCING*), PEMBATASAN FISIK (*PHYSICAL DISTANCING*), PSBB (PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR), REFOCUSING ANGGARAN UNTUK PENANGANAN COVID-19 TELAH MENURUNKAN TINGKAT KESEJEHTERAAN HIDUP MASYARAKAT, KARENA LUMPUHNYA SEKTOR RIEL, LESUNYA KEGIATAN MIKRO DAN MAKRO EKONOMI, ADANYA PHK TERHADAP PARA KARYAWAN DAN BURUH SANGAT TINGGI, JUGA SEMAKIN BERTAMBAHNYA JUMLAH MASYARAKAT YANG MISKIN.

SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

PADA FORUM YANG TERHORMAT INI, SAYA ATAS NAMA PIMPINAN DEWAN JUGA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMAKASIH, KEPADA PARA DOKTER, TIM MEDIS, TIM GUGUS TUGAS COVID-19 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, APARAT KEAMANAN (TNI/POLRI), YANG SETIA DAN BAHKAN BERKORBAN DEMI TUGAS KEMANUSIAAN DALAM PENANGANAN WABAH PANDEMI COVID-19, SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SELALU MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, KESEHATAN ATAS JASA-JASANYA.

PANDEMI COVID-19 SEJAK AWAL MARET 2020, JUGA TELAH MENGGANGGU KINERJA DEWAN DI MASA PERSIDANGAN I (PERTAMA) TAHUN SIDANG 2020, SEHINGGA BEBERAPA AGENDA PENTING BELUM DAPAT TEREALISASI, KARENA KEWAJIBAN UNTUK MELAKSANAKAN PROTOKOL COVID-19, DAN REFOCUSING ANGGARAN 47,72% DARI 49,183 MILYAR ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, YANG MEMBATASI GERAK KINERJA DEWAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN SECARA OPTIMAL.

DITENGAH-TENGAH ADANYA WABAH COVID-19, PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020, ANGGOTA DEWAN MASIH DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, DENGAN PROGRES CAPAIAN KINERJA ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT :

- DI BIDANG LEGISLASI, TELAH MEMBENTUK :
 1. PANSUS PERCEPATAN PENYELESAIAN TATA BATAS;
 2. PANSUS RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;

3. PANSUS RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA;
 4. PANSUS RAPERDA TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 5. PANSUS RAPERDA TENTANG ENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH; DAN
 6. PANSUS RAPERDA TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH;
- BIDANG PENGAWASAN DAN ANGGARAN, DEWAN TELAH MEMBENTUK PANSUS BANSOS DALAM RANGKA MENDUKUNG EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN APBD 2020 YANG DI REFOCUSING UNTUK PANDEMI COVID-19.
 - KEBIJAKAN LAINNYA SEPerti KUNJUNGAN KERJA DALAM DAN LUAR DAERAH/RESES, RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN DINAS/BADAN/BIRO, JUGA BERBAGAI KOMPONEN MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT.

SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020, BERHARAP AGAR KEMITRAAN DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA EKSEKUTIF-LEGISLATIF BISA BERJALAN LEBIH BAIK LAGI, SEHINGGA AGENDA-AGENDA PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN DENGAN OPTIMAL. EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF ADALAH MITRA SEJAJAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI KEKUASAANNYA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG. KEBERADAANNYA IBARAT SISI MATA YANG SALING MELENGKAPI. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, PASAL 57 DAN PASAL 95 AYAT (1) SANGAT JELAS MENGATUR TENTANG HAL TERSEBUT.

BEBERAPA AGENDA PENTING YANG BELUM TERLAKSANA PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020, AKAN MENJADI PRIORITAS DI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020, DAN AGENDA YANG SANGAT MENDASAK PENYELESAIANNYA ADALAH RAPERDA

TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA, MENINGAT TIDAK LAMA LAGI KITA AKAN MEMASUKI MUSIM KEMARAU, SEHINGGA DENGAN ADANYA RAPERDA TERSEBUT SEBAGAI PAYUNG HUKUM DALAM PELAKSANAAN DAN AGAR TIDAK MENGULANGI PERMASALAHAN YANG SAMA, YAITU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

SELANJUTNYA PERLU DISAMPAIKAN BEBERAPA USULAN DARI PIHAK EKSEKUTIF, YANG MENJADI PRIORITAS AGENDA DEWAN PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020, YAITU :

- DUKUNGAN DAN PERSETUJUAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, DALAM RANGKA PEMBANGUNAN RSUD KELAS A DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA;
- TINDAKLANJUT ASPIRASI PRESEDIUM PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU PROVINSI KOTAWARINGIN RAYA;
- PENYERTAAN MODAL BAGI PENDIRIAN MENARA PT. BANK KALTENG.

SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

MENCERMATI DAMPAK PANDEMI COVID-19 YANG CUKUP LUAR BIASA, PEMERINTAH PUSAT TELAH MENETAPKAN KEBIJAKAN NEW NORMAL. ARTINYA KITA SEMUA DAN MASYARAKAT HARUS BELAJAR HIDUP BERDAMPINGAN DENGAN COVID-19, YANG SATU SISI MENGANCAM KESEHATAN DAN JIWA, SERTA SISI LAIN MASYARAKAT HARUS BERAKTIVITAS, BERJUANG MEMPERTAHANKAN HIDUP EKONOMI KELUARGA.

DIHARAPKAN ADANYA INOVASI STRATEGI PENANGANAN DAN DESAIN KEBIJAKAN YANG TERUKUR, INTEGRAL DAN HOLISTIK AGAR MASYARAKAT BENAR-BENAR DAPAT TERLINDUNGI DAN TERBANGUN BUDAYA MASYARAKAT YANG PATUH TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN.

DI SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UNTUK PERCEPATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT, DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN TENGAH, DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENYAMBUT BAIK, PENETAPAN KALIMANTAN TENGAH KHUSUSNYA KABUPATEN PULANG PISAU DAN KABUPATEN KAPUAS, SEBAGAI KAWASAN PERTANIAN CADANGAN PANGAN NASIONAL TERPADU.

HENDAKNYA PELUANG INI DAPAT KITA MANFAATKAN DENGAN BAIK DAN BERHARAP KALIMANTAN TENGAH BENAR-BENAR DAPAT MENJADI SALAH SATU DAERAH DENGAN STOK LUMBUNG PANGAN NASIONAL YANG BERKONTRIBUSI SEBAGAI PENOPANG IBUKOTA NEGARA BARU DI WILAYAH KALIMANTAN.

SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

HAL LAIN BERDASARKAN KETENTUAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2020, KITA AKAN MELAKSANAKAN LANJUTAN PILKADA SERENTAK 2020. PERHELATAN KONTESTASI PILKADA, DIHARAPKAN TIDAK MENGHILANGKAN KETAJAMAN PENANGANAN PENDEMI COVID-19 DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI BAGI MASYARAKAT.

KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HARUS MENJADI PRIORITAS DAN BUKAN AMBISI KEKUASAAN, MARI KITA SUKSESKAN PILKADA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, DENGAN MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK YANG BAIK DAN ETIK BAGI MASYARAKAT, SEHINGGA PARTISIPASI POLITK MENINGKAT DAN KONDUSIF SERTA DAERAH TETAP TERJAGA DENGAN BAIK.

SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

DEMIKIANLAH BEBERAPA HAL YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, BERKAITAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN, SELAMA *MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020*, DAN BEBERAPA AGENDA YANG AKAN KITA BAHAS DAN DILAKSANAKAN, PADA *MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020*.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA, SELALU MENYERTAI SEGALA PERJUANGAN KITA, DALAM MEMBANGUN DAN MEMAJUKAN KALIMANTAN TENGAH, YANG LEBIH SEJAHTERA, BERMARTABAT SERTA BERKAH.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH,

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULAHI WABARAKATUH

PALANGKA RAYA, 15 JUNI 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

W I Y A T N O

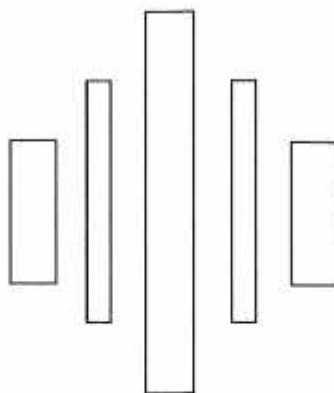
SAMBUTAN KETUA DPRD PROV. KALTENG

12



**SAMBUTAN
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**PADA RAPAT PARIPURNA KE – 14
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2020, SEKALIGUS
RAPAT PARIPURNA KE – 1 PEMBUKAAN
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TANGGAL 15 JUNI 2020**



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
2020**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PADA RAPAT PARIPURNA KE – 14 PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020, SEKALIGUS RAPAT PARIPURNA KE – 1 PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020 DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TANGGAL 15 JUNI 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Om Swastiastu. Salam Kebajikan

Syalom.

Salam Sejahtera untuk Hadirin Sekalian,

→ SELAMAT PAGI

Tabé Salamát Língu Nalataj / Salam Sujud Karendem
Malempang / Adil Ka'talino / Bacuramin Ka'saruga /
Ba'sengát Ka'jubata / ARUS !!!

* Yang Terhormat, :

- ✓ Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- ✓ Saudara-Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- ⊖ Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah; / MEWAKILI
- ✓ Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah;
- ✓ ~~Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;~~
- ✓ Saudara Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Kalimantan Tengah;
- ✓ Saudara Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;
- ⊗ ~~Saudara Pimpinan Bank Indonesia Kalimantan Tengah;~~
- ⊗ ~~Saudara Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah;~~

- ~~⊗ Saudara Pimpinan Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;~~
- ~~⊗ Saudara Pimpinan Perguruan Tinggi Baik Negeri dan Swasta Se Kota Palangka Raya;~~
- ~~⊗ Saudara-Saudara Rektor Universitas Negeri dan Swasta Se Kota Palangka Raya;~~
- ✓ Para Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, Kepala Instansi Vertikal, Kepala SOPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- ✓ Saudara-Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian/Dinas/Direktorat/Badan/Lembaga /Unit Satuan Kerja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ✓ Saudara-Saudara Tenaga Ahli DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- ✓ Para Sesepuh Daerah, Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat, Pimpinan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Insan Pers, ~~Generasi Muda~~, serta Hadirin dan Undangan yang Saya Hormati.

Marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama hadir ditempat ini untuk mengikuti Rapat Peripurna ke – 14 “ Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, sekaligus Rapat Paripurna ke – 1 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ” hari ini dalam keadaan sehat Wal’afiat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi dan keluarga serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 H Minal Aidin Wal Faidzin Mohon Maaf Lahir dan Bathin, untuk seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang merayakannya dan Hari jadi ke – 63 Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya pada tanggal 23 Mei 2020, meskipun dalam suasana keprihatinan karena

5

mewabahnya Virus Covid -19. Perkenankan Saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus, kepada para pendahulu kita yang telah berjasa dalam membangun Kalimantan Tengah serta seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga dalam membangun Daerah Kalimantan Tengah yang lebih baik sebagaimana visi kami yaitu Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

Sehubungan dengan adanya Bencana Non-Alam penyebaran Covid-19 di Kalimantan Tengah, telah dilakukan upaya-upaya dengan segenap daya dan dana dikerahkan dengan

6

bekerjasama melibatkan semua pihak, baik unsur pemerintah maupun semua komponen masyarakat diberbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, untuk memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat guna memutus mata rantai penularan Covid-19.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG SAYA MULIAKAN,

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 yang lalu DPRD Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sidang Paripurna, Rapat Komisi, Rapat Gabungan serta Rapat Dengar Pendapat yang telah diagendakan.

7

Meskipun kita juga menyadari bahwa dalam pelaksanaannya belum semuanya dapat memenuhi seluruh harapan, aspirasi dan tuntutan dari berbagai pihak, hal ini disebabkan masih banyak keterbatasan untuk dapat menampung dan merealisasikan aspirasi dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Namun kita yakin dan percaya bilamana semua pihak dapat bekerja sama dengan baik dan kompak niscaya apa yang menjadi cita-cita kita bersama pasti akan dapat terwujud.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

Memasuki Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020, sesuai dengan agenda/jadwal persidangan yang akan ditetapkan, tentunya akan dilanjutkan dan dibahas lagi beberapa materi pokok berupa :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Energi Daerah;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Melalui Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, saya berharap selain dapat merampungkan berbagai materi persidangan yang telah ditetapkan dan dijadwalkan, kita mampu menciptakan, memanfaatkan dan menggunakan peluang dengan kemampuan yang ada, sehingga dapat menghadapi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat menuju Kalimantan Tengah yang lebih baik.

Pada tahun 2020 ini kita juga akan melaksanakan agenda pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, kita berharap meskipun ditengah kondisi pandemi Covid-19, Pilkada serentak tahun 2020 dapat terlaksana dengan lancar, aman dan tertib.

10

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga kita senantiasa mendapat berkah, bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam kita menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab bersama, sehingga akan selalu memperoleh hasil yang optimal disertai dengan ridho-Nya.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Om Santi Santi Santi Om.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

**DO'A RAPAT PARIPURNA
KE 14 PENUTUPAN MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2020
SEKALIGUS PEMBUKAAN MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2020
SENIN, 15 JUNI 2020**

Ya Allah, Ya Tuhan Kami,

Kami mengawali doa ini dengan menyebut asma-Mu, menyampaikan puji dan syukur kehadirat-Mu, seraya memohon kiranya Engkau ya Allah melimpah kan rahmat dan ridla-Mu, pada rapat KE 14 PENUTUPAN MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2020 SEKALIGUS PEMBUKAAN MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2020 dalam keadaan sehat wal afiat, dan penuh kebahagiaan

Ya Allah, Yaa 'Aliim, Tuhan Yang Maha Mengetahui

Bimbinglah kami, abdi Negara dan seluruh aparaturnegara Prov. Kalimantan Tengah, agar dapat menjadi pionir penyelenggara negara yang bekerja semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat .Tiada daya dan kekuatan yang kami miliki kecuali daya dan kekuatan yang Engkau berikan, Anugerahi kami kekuatan untuk terus beramal, dan mengisi kesempatan hidup kami dengan kehidupan yang bermanfaat,

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk

Tunjukilah kami jalan menuju rahmat dan keridlaan-Mu, yaitu jalan orang-orang yang ketika diberi amanah ia menunaikannya dengan sebaik-baiknya, ketika diberi jabatan, ia menjalankannya sebagai bagian dari ibadah, ketika merasakan kebahagiaan, lidahnya basah dengan syukur, dan saat menghadapi cobaan, cobaan itu justru menjadi pengingat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi agar semakin mendekatkan diri kepada-Mu

Ya Allah, ya Haadi,

tunjukkanlah kami ke jalan yang benar sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan bukan jalannya orang-orang yang Engkau sesatkan.

Ya Allah Rabbana Ya Kariim

Perjuangan dan Pembangunan daerah kami belum selesai dan masih panjang. Disaat negara kami dalam situasi darurat penyebaran Virus COVID 19 yang meresahkan, oleh karena itu ya Allah Hindarkanlah Bangsa dan masyarakat kami dari fitnah dan mara bahaya tersebut semoga musibah atau ujian ini cepat berlalu dan kehidupan kami dapat normal kembali.

Ya Allah, YaGafuur, Tuhan yang Maha Pengampun

ampunilah dosa kami, orang tua kami, dosa guru / dosen kami dan dosa serta kesalahan para pemimpin dan pendahulu kami, jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal shaleh dan ibadah kepada Mu.

RAPAT PARIPURNA KE – 2
MASA PERSIDANGAN II (KEDUA) TAHUN SIDANG 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
=====

Hari : Rabu
Tanggal : 1 Juli 2020
Pukul : 13.15 WIB
Sifat Sidang : Terbuka untuk Umum
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. S. Parman No. 02 Palangka Raya.

A c a r a : 1. Pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Rapat.
2. Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2019.
3. Penyerahan Naskah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2019, oleh Gubernur Kalimantan Tengah, kepada Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Laporan Hasil Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, ke Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah I, II, III, IV dan V pada Masa Persidangan I (Pertama) Tahun Sidang 2020.
5. P e n u t u p .

PimpinanRapat : Wiyatno, SP, KetuaDewanPerwakilan Rakyat Daerah ProvinsiKalimantan Tengah.

Sekretaris : Tantan, SH, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Jumlah Anggota : 45 Orang.

1. FraksiPDI-Perjuangan.	12	Orang
2. FraksiPartai Golongan Karya.	7	Orang
3. FraksiPartaiDemokrat.	6	Orang
4. FraksiPartaiNasdem.	5	Orang
5. FraksiPartaiGerindra.	5	Orang
6. FraksiPKB.	4	Orang
7. FraksiGabungan (FGP4H).	6	Orang

Hadir

: 29 Orang.

1. Wiyatno, SP	Fraksi PDI-Perjuangan
2. Drs. Yohannes Freddy Ering, M.Si	Fraksi PDI-Perjuangan
3. H. Jubair Arifin	Fraksi PDI-Perjuangan
4. Ir. Yulilis	Fraksi PDI-Perjuangan
5. Drs. Duwel Rawing	Fraksi PDI-Perjuangan
6. Ina Prayawati, SE	Fraksi PDI-Perjuangan
7. Ir. Lohing Simon	Fraksi PDI-Perjuangan
8. Irawati, S.Pd	Fraksi PDI-Perjuangan
9. Ferry Khaidir	Fraksi PDI-Perjuangan
10. H. Maruadi, SH, S.Sos	Fraksi Partai Golkar.
11. Sri Neni Trianawati, SE	Fraksi Partai Golkar.
12. Sinar Kumala	Fraksi Partai Golkar.
13. H. Jimmy Carter	Fraksi Partai Demokrat.
14. Heri Santoso, ST	Fraksi Partai Demokrat.
15. Ir. H. Muhajirin, MP	Fraksi Partai Demokrat.
16. Siswandi	Fraksi Partai Demokrat.
17. Faridawaty Darland Atjeh, SE, MM	Fraksi Partai Nasdem.
18. Bryan Iskandar, SE	Fraksi Partai Nasdem.
19. H. Achmad Rasyid	Fraksi Gerindra.
20. Jainudin Karim, SE	Fraksi Gerindra.
21. Dra. Kuwu Senilawati	Fraksi Gerindra.
22. Andayani, SE	Fraksi Gerindra.
23. H. Purman Jaya, S.Sos	Fraksi PKB.
24. Fajar Hariady	Fraksi PKB.
25. Hj. Rusita Irma, S.Pi	Fraksi PKB.
26. Evi Kahayanti, S.Sos	Fraksi PKB.
27. Sirajul Rahman, S.Hut., M.I.Kom	Fraksi Gabungan (FGP4H).
28. Rizki Amalia Darwan Ali, BA(Hons), MSc	Fraksi Gabungan (FGP4H).
29. Sengkon, SE	Fraksi Gabungan (FGP4H).

Tidak Hadir

: 16 Orang.

		Ket :
1. Ir. Artaban, MH	Fraksi PDI Perjuangan	I z i n
2. Andina Thresia Narang, B. Comm	Fraksi PDI Perjuangan	I z i n
3. Hj. Maryani Sabran	Fraksi PDI-Perjuangan	I z i n
4. Ir. H. Abdul Razak	Fraksi Partai Golkar.	I z i n
5. Dra. Siti Nafsiah, M.Si	Fraksi Partai Golkar.	I z i n
6. H. Sudarsono, SH	Fraksi Partai Golkar.	I z i n
7. Sarwani	Fraksi Partai Golkar.	Alm.
8. H. Muhammad Sriosako, S.Sos., MH	Fraksi Partai Demokrat.	I z i n
9. Yeni Maria Marselina Katha	Fraksi Partai Demokrat.	I z i n
10. Henry, SE, MH	Fraksi Partai Nasdem.	I z i n
11. dr. Niksen S. Bahat	Fraksi Partai Nasdem.	I z i n
12. Toga Hamonangan Nadeak, SH., MH	Fraksi Partai Nasdem.	I z i n
13. Drs. H. Sugiyarto, MAP	Fraksi Gerindra.	I z i n
14. Tomy Irawan Diran, SE	Fraksi Gabungan (FGP4H).	I z i n
15. Natalia, ST	Fraksi Gabungan (FGP4H).	I z i n
16. H. Achmad Amur, SH, MH	Fraksi Gabungan (FGP4H).	I z i n

Pimpinan
Wiyatno, SP

: **Assalamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera dan Selamat Siang.**

Rapat Paripurna ke – 2 Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, Anggota Dewan yang hadir berjumlah 29 orang dari 44 Anggota Dewan, maka **korum tercapai.**

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Paripurna ke – 2 Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pada siang hari ini, Rabu 1 Juli 2020, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

----- **Ketukan Palu Satu Kali** -----

Marilah kita menyanyikan Lagu Kebangsaan **“Indonesia Raya”**

Pimpinan
Wiyatno, SP

: Hadirin dimohon berdiri.

----- **Menyanyikan Lagu Indonesia Raya** -----

Pimpinan
Wiyatno, SP

: Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Yang terhormat :

- Saudara Gubernur Kalimantan Tengah ;
- Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah ;
- Saudara Wakil-Wakil Ketua dan semua Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Saudara Kapolda Kalimantan Tengah IRJEN Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum, M.Si, MM. ;
- Saudara Danrem 102 Panju Panjung Kalimantan Tengah, BRIGJEN TNI Purwo Sudaryanto ;
- Saudara Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Dr. Mukri, SH., MH. ;
- Asisten Sekretaris Daerah / Staf Ahli Gubernur dan semua Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta undangan sekalian yang saya muliakan.

Pertama – tama marilah kita selalu mempersembahkan pujian dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, pada siang hari ini dalam keadaan sehat wal’afiat.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Adapun agenda RapatParipurnaDewan pada siang hari ini adalah, sebagai berikut :

- Pertama : Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan tengah, Tahun Anggaran 2019.
- Kedua : Penyerahan Naskah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan tengah, Tahun Anggaran 2019, oleh Gubernur Kalimantan Tengah, kepada Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
- Ketiga : Laporan Hasil Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, ke Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah I, II, III, IV dan V pada Masa Persidangan I (Pertama) Tahun Sidang 2020.

HadirinRapatParipurnaDewan yang sayahormati,

Selanjutnyakitadengarkanbersama, PidatoPengantarGubernur Kalimantan Tengah terhadapRancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan tengah, Tahun Anggaran 2019, kepadasaudaraGubernur Kalimantan Tengah, denganhormat kami persilakan,

Gubernur Kalteng : Teks terlampir.
H. Sugianto Sabran.

Pimpinan : Kepada Saudara Gubernur diucapkan terimakasih.
Wiyatno, SP

SelanjutnyaPenyerahanSecaraSimbolisNaskahRancanganPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, olehSaudaraGubernur Kalimantan Tengah kepadaPimpinanDewan, kepadaGubernurdimohonmengambiltempatdidepandandidampingiolehWakil Gubernur, KetuaDewandidampingiolehWakil-WakilKetuaDewan, di persilahkan.
Hadirindimohonberdiri.

**---- PenyerahanNaskahRaperda ----
dariGub. KaltengkepadaPimpinanDewan**

Pimpinan : Hadirin dipersilakan duduk kembali, kepada Saudara Gubernur diucapkan
Wiyatno, SP terimakasih.

Dengantelahdisampaikannya,

Pidato Pengantar telah diserahkan secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Tengah, kepada Pimpinan Dewan, dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, kami selaku Pimpinan Dewan secara resmi menerima, serta akan menyerahkan kepada Dewan, untuk dibahas pada tahap - tahap selanjutnya, sesuai Jadwal Kegiatan Dewan yang telah ditetapkan dan sesuai ketentuan peraturan dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang sayahormati,

Selanjutnya Laporan Hasil Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dari masing-masing Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah I, II, III, IV dan V, pada Masa Persidangan I (pertama) Tahun Sidang 2020, yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei sampai dengan 7 Juni 2020.

Untuk mengawal laporan ini, kepada Anggota Dewan, jurubicar dari Dapil Kalteng I, meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Katingan, kami persilakan.

Pelapor Dapil I : Teks terlampir.
Dra. Kuwu Senilawati

Pimpinan : Terima kasih
Wiyatno, SP

Berikutnya dipersilakan kepada Anggota Dewan, jurubicar dari Dapil Kalteng II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan, kami persilakan.

Pelapor Dapil II : Teks terlampir.
Irawati, S.Pd

Pimpinan : Terima kasih
Wiyatno, SP

Berikutnya dipersilakan kepada Anggota Dewan, jurubicar dari Dapil Kalteng III, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamau dan Kabupaten Sukamara, kami persilakan.

Pelapor Dapil III : Teks terlampir.
Bryan Iskandar, SE

Pimpinan : Terima kasih
Wiyatno, SP

Selanjutnya dipersilakan kepada Anggota Dewan, jurubicar dari Dapil Kalteng IV, meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Murung Raya, kami persilakan.

Pelapor Dapil IV : Teks terlampir.
Siswandi

Pimpinan
Wiyatno, SP : Terima kasih

Yang terakhir dipersilakan kepada Anggota Dewan, jurubicaradari Dapil kalteng V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, kami persilakan.

Pelapor Dapil V
H. Maruadi, SH, S.Sos : Teks terlampir.

Pimpinan
Wiyatno, SP : Terima kasih

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang sayahormati,

Demikian tadi, telah kita dengarkan bersama, Laporan Hasil Reses Pimpinan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, dari dapil kalteng I, II, III, IV dan V.

Laporan dari masing - masing Dapil telah diterima dengan resmi, oleh Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Gubernur Kalimantan Tengah, yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk jugaditindaklanjuti dengan skala prioritas dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang sayahormati,

Dengan demikian berakhir lah agenda Rapat Paripurna ke - 2, Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan, mengucapkan terima kasih, kepada Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan hadirin sekalian, atas kehadiran serta perhatiannya, mengikuti Rapat Paripurna Dewan dari awal hingga selesai, dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah, Rapat Paripurna dinyatakan selesai dan ditutup.

----- **Ketuk Palu Tiga Kali** -----

Pimpinan
Wiyatno, SP : Terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rapat Paripurna berakhir dan
Ditutup Pukul : 16.00 WIB

Palangka Raya, 1 Juli 2020

MENGETAHUI :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

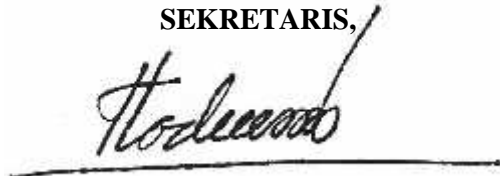
KETUA,



WIYATNO, SP

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SEKRETARIS,



**TANTAN, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640421 199203 1 012**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan S. Parman No. 2 Telpon (0536) 3236320, Fax. 3236329 Palangka Raya 73112

Palangka Raya, 30 Juni 2020

Nomor : 005/949/DPRD/2020
Lampiran : -
Perihal : **RAPAT PARIPURNA**

K e p a d a

Yth.

di -

PALANGKA RAYA

Bersama ini Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr(i) pada **Rapat Paripurna Ke -2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020**, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : RABU
Tanggal : 1 Juli 2020
Pukul : 13.00 WIB – selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
A c a r a : I. Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2019;
II. Laporan Hasil Reses Tim/Kelompok Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Kalteng dalam bentuk laporan Dapil I, II, III, IV dan V Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

K E T U A,

WIYATNO, SP

Catatan :

1. Pakaian
 - Sipil : Pakaian Sipil Resmi (PSR).
 - TNI/POLRI : Menyesuaikan.
 - Ibu-ibu : Menyesuaikan.
2. Undangan Hadir 15 (Lima Belas) Menit sebelum Acara dimulai.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan S. Parman No. 2 Telp. 0536 – 3236320 Fax 3236329 Palangka Raya 73112

A c a r a : RapatParipurnaKe – 2 Masa Persidangan II (Kedua) Tahun Sidang 2020,DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
=====

- H a r i : RABU
- T a n g g a l : 1 JULI 2020
- P u k u l : 13.00 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya.

Susunan Acara :

1. Pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Rapat.
2. Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2019.
3. Penyerahan Naskah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2019, oleh Gubernur Kalimantan Tengah, kepada Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Laporan Hasil Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, ke Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah I, II, III, IV dan V pada Masa Persidangan I (Pertama) Tahun Sidang 2020.
5. P e n u t u p.

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

T A N T A N, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640421 199203 1 012

Rejuaq Covid-19 Tsuki mautina



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PIDATO

**PENGANTAR GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LPJ) PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019**

Palangka Raya, 1 Juli 2020

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh;

Tabe Selamat Lingu Nalatai Salam Sujud Karendeng
Malempang;

Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kaju Bata;

Saloom, Om Swastiastu Namu Budaya, Salam Kebajikan;

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita Sekalian;

Yang terhormat :

- Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
- Saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Saudara Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Saudara Sekretaris Daerah;
- Asisten Sekda Provinsi Kalimantan Tengah dan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah;
- Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, kita mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada kita, dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Bumi Tambung Bungai, Bumi Berkah untuk Indonesia yang kita cintai ini.

Pagi ini kita kembali bersilaturahmi dengan jajaran legislatif dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penyampaian Pengantar Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

Anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Bahwa pelaksanaan penyampaian pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan tahapan lanjutan setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa opini yang di berikan oleh BPK RI selama 6 (enam) tahun berturut-turut mulai tahun 2014 sampai dengan 2019 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Hal ini membuktikan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui pelaksanaan APBD sangat bagus, dapat dipertanggungjawabkan berkat dukungan dan kerjasama dengan DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 secara riil telah dilaksanakan sebagaimana niat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan sinergitas upaya pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional dan daerah serta memenuhi kehendak masyarakat untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan

4

pemerintahan dan pembangunan daerah, yang diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian, serta lebih fokus kepada:

1. Pembangunan bidang infrastruktur.
2. Pembangunan bidang pendidikan.
3. Pembangunan bidang kesehatan.
4. Pembangunan bidang ekonomi secara luas.

Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan para Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Secara ringkas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan sebesar Rp4,959 triliun lebih dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp4,990 triliun lebih atau 100,61%, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah direalisasikan

5

sebesar Rp1,776 triliun lebih atau 104,89% dari target sebesar Rp1,693 triliun lebih, Pendapatan Transfer direalisasikan sebesar Rp3,191 triliun lebih atau 97,96% dari target sebesar Rp3,257 miliar lebih, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direalisasikan sebesar Rp22,758 milyar lebih atau 254,23% dari target sebesar Rp8,951 milyar lebih;

2. Anggaran Belanja sebesar Rp4,731 triliun lebih dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp4,312 triliun lebih atau 91,16%, yang terdiri dari Belanja Operasi direalisasikan sebesar Rp3,014 triliun lebih atau 89,58% dari target sebesar Rp3,365 triliun lebih, Belanja Modal direalisasikan sebesar Rp1,293 triliun lebih atau 95,63% dari target sebesar Rp1,352 triliun lebih, Belanja Tidak Terduga direalisasikan sebesar Rp4,382 milyar lebih atau 35,26% dari target sebesar Rp12,429 milyar lebih;
3. Anggaran Transfer sebesar Rp922,606 milyar lebih dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2019

sebesar Rp751,187 milyar lebih atau 81,42%, yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan direalisasikan sebesar Rp714,590 milyar lebih atau 80,71% dari target sebesar Rp885,356 milyar lebih. Transfer Bantuan Keuangan direalisasikan sebesar Rp36,597 milyar lebih atau 98,25% dari target sebesar Rp37,250 milyar;

4. Anggaran Pembiayaan Daerah (Pembiayaan Neto) sebesar Rp693,702 milyar lebih dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp685,274 milyar lebih atau 98,78%, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan direalisasikan sebesar Rp690,274 milyar lebih atau 98,79%, serta Pengeluaran Pembiayaan direalisasikan sebesar Rp5 milyar atau 100%. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan adalah sebesar Rp.611,326 milyar lebih;

Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Dapat kami informasikan bahwa naskah lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang sudah dilakukan perbaikan dan koreksi-koreksi sesuai hasil temuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Anggota Dewan dan Hadirin yang saya hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar Penyampaian RAPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019, kami persilahkan kepada Anggota Dewan untuk meneliti Naskah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 ini, sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan jadwal pembahasan yang sudah ditentukan.

Selanjutnya kami mohon persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dan atas kerjasama serta dukungannya saya sampaikan terima kasih.

Sekian dan Terima Kasih.

Wabillahitaufiqwalhidayah.

Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi

Wabarakatuh;

Palangka Raya, 1 Juli 2020
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



LAPORAN

**HASIL RESES DAPIL I ANGGOTA DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020
TANGGAL 31 MEI S/D 07 JUNI 2020**

PALANGKA RAYA, 29 JUNI 2020

L A P O R A N
HASIL RESES TIM DAERAH PEMILIHAN KALTENG I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KE KOTA PALANGKA RAYA, KABUPATEN KATINGAN DAN
KABUPATEN GUNUNG MAS
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020

*Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh;
Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua.
Tabe Selamat Lingu Nalatai Sembah Sujut Karendem Malempang Adil
Katalino Basuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Harus.*

Yang Terhormat,

- Saudara Gubernur Kalimantan Tengah;
- Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
- Saudara Wakil-Wakil Ketua dan Semua Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
- Saudara Kapolda Kalimantan Tengah Atau Yang Mewakili;
- Saudara Danrem 102 Panju Panjung Kalimantan Tengah atau yang mewakili;
- Saudara Ketua Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah atau yang mewakili;
- Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah atau yang mewakili;
- Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah atau yang mewakili;
- Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Saudari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili;
- Saudara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang mewakili;

- Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Saudara-saudara Staf Ahli Gubernur dilingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- Wartawan Media Cetak dan Elektronik Serta Undangan Sekalian Yang Saya Muliakan.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita senantiasa mempersembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita semua sampai saat ini masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk mengikuti Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan agenda Penyampaian Hasil Reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, dari masing-masing Tim Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah.

Selanjutnya Kepada Pimpinan Rapat Paripurna, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Tim Reses dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi, *Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas*, untuk menyampaikan Hasil Reses yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2020 sampai 07 Juni 2020 selama 8 (delapan) hari kerja, semoga apa yang kami laporkan dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan di Kalimantan Tengah, khususnya pada 2 Kabupaten dan 1 Kota tersebut. Dalam laporan ini telah kami susun dengan sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan :

Sebagai implementasi bahwa kegiatan Reses yang dilaksanakan oleh masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengunjungi daerah pemilihan masing-masing yang bersangkutan, guna menyerap dan menampung aspirasi masyarakat serta untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah, baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang berjalan, dengan terlebih dahulu dalam setiap pertemuan Tim Reses menjelaskan maksud dan tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Anggota DPRD kepada konstituen sebagai peserta dalam pertemuan.

II. Dasar Pelaksanaan : ✓

1. Jadwal kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, tanggal 09 Maret 2020;
2. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.4.43/12/DPRD/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Tugas Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan

Tengah ke Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020;

3. Surat Perintah Tugas Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 84/SPT/DPRD/2020 tanggal 29 Mei 2020.

Surat Perintah Tugas Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 85/SPT/DPRD/2020 tanggal 29 Mei 2020.

4. Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 094/84/DPRD/2020 tanggal 29 Mei 2020.

Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 094/85/DPRD/2020 tanggal 29 Mei 2020.

5. Surat Perintah Tugas dari Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 200/SPT/Setwan/2020 tanggal 29 Mei 2020.

Surat Perintah Tugas dari Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 201/SPT/Setwan/2020 tanggal 29 Mei 2020.

6. Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 094/203/Setwan/2020 tanggal 29 Mei 2020.

Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 094/204/Setwan/2020 tanggal 29 Mei 2020.

III. Maksud dan Tujuan : L

Maksud dan Tujuan Reses Tim Dapil I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Untuk menghimpun data, mencari informasi, menampung usul dan saran, menyerap aspirasi masyarakat serta mengevaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan baik yang dibiayai dari APBN maupun APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020;

2. Melihat secara umum hasil pelaksanaan pembangunan beberapa sektor di wilayah Kabupaten Gunung Mas (khususnya Wilayah Kecamatan Mihing Raya Desa Kampuri, Kelurahan Sepang Kota, Kelurahan Pematang Limau, Kelurahan Talaken, Kelurahan Bereng Jon dan Kelurahan Takaras), Wilayah Kabupaten Katingan (khususnya wilayah Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Kamipang dan Kelurahan Tangkiling), yang telah maupun yang sedang dilaksanakan. Dan apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya untuk ditindaklanjuti berdasarkan skala prioritas dan sesuai bidangnya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Dinas/Badan/Lembaga teknis terkait.

IV. Ruang Lingkup Laporan :

Laporan Hasil Reses Tim Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah I, secara umum dan keseluruhan menyangkut bidang Tugas Pokok dan Fungsi Dewan pada Komisi-komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya dari hasil reses tersebut, untuk penyelesaiannya diharapkan dapat dibahas dan ditindaklanjuti bersama melalui rapat kerja Komisi-komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Dinas/Badan/Lembaga Teknis terkait pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai bidang dan tugasnya masing-masing, apabila permasalahan yang harus diselesaikan menyangkut kewenangan Kabupaten/Kota, maka kita perlu menyampaikannya baik melalui rapat kerja maupun melalui kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota tersebut.

V. Personil / Tim Reses :

Komposisi Personalia Tim Reses Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah I sebagai berikut :

1. FARIDAWATY DARLAND ATJEH, SE., MM : Koordinator Tim
2. Drs. DUWEL RAWING : Ketua Tim
3. Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M.Si : Sekretaris Tim
4. Dra. KUWU SENILAWATI : Anggota Tim
5. Ir. LOHING SIMON : Anggota Tim
6. H. M. SRIOSAKO, S.Sos., MH : Anggota Tim
7. NATALIA, ST : Anggota Tim
8. SENGKON, SE : Anggota Tim
9. EVI KAHAYANTI, S.Sos : Anggota Tim

Pendamping dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

VI. PELAKSANAAN RESES

A. Sasaran dan objek kegiatan :

Pelaksanaan kegiatan Reses Tim Dapil I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, Pada umumnya menjalankan salah satu fungsi Dewan yaitu di bidang pengawasan khususnya dalam penyaluran Bansos untuk Masyarakat yang terdampak Covid 19.

Wilayah dan sasaran sebagai objek kunjungan adalah : Kabupaten Gunung Mas (khususnya Wilayah Kecamatan Mihing Raya Desa Kampuri, Kelurahan Sepang Kota, Kelurahan Pematang Limau, Kelurahan Talaken, Kelurahan Bereng Jon dan Kelurahan Takaras), Wilayah Kabupaten Katingan (khususnya wilayah Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan

Katingan Tengah, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Kamipang dan Kelurahan Tangkiling).

B. Kegiatan dan Waktu Reses :

Pelaksanaan kegiatan reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 dilaksanakan dari tanggal 31 Mei sampai dengan 07 Juni 2020 8 (delapan) hari kerja, walaupun kegiatan reses dilaksanakan dengan alokasi waktu yang sangat singkat dan dirasa masih belum cukup, terutama untuk objek kunjungan lapangan ke daerah-daerah terpencil, namun kami pergunakan waktu tersebut dengan semaksimal mungkin.

VII. HASIL PELAKSANAAN RESES :

A. KABUPATEN GUNUNG MAS :

1. Kecamatan Mihing Raya Desa Kampuri :

- Reses saat ini Dewan melaksanakan salah satu fungsi Dewan dalam bidang pengawasan, maka Dewan Fokus pada masalah penanganan pandemi Covid 19 dan Bantuan Sosial oleh Pemerintah Daerah.
- Menurut info dari Pa. Camat Mihing Raya untuk data penerima Bansos masih di gunakan data yang lama
- Pendataan penerima BLT DD di data oleh Perangkat Desa
- Bansos dari Dinas Sosial Kabupaten berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari APBD Kabupaten selama 3 bulan.
- Bansos dari APBD Provinsi yang di salurkan oleh Dinas Sosial Provinsi yang katanya Rp. 500.000,- 1 kali untuk 1 bulan tapi sampai sekarang belum ada ke jelasan nya.
- Bansos dari Kabupaten belum tau nilainya oleh belum realisasi dari pihak Kabupaten (belum di proses).
- Untuk sembako pasukan ke daerah stabil.
- Data Penerima Bansos masih belum palid.

- Pengangkatan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kouta yang di berikan se Kabupaten Kota 40-50 Orang Pengajiannya dari APBD Provinsi.
- Peninjauan Jalan Palangka Raya - Kuala Kurun ada spot-spot atau titik-titik yang rusak berpotensi akan putus kalau tidak segera di tangani.
- Peninjauan Jalan di Wilayah Desa Kampuri Kec. Mihing Raya pada umumnya rusak parah perlu segera di tangani.

2. Kelurahan Sepang Kota, Kecamatan Sepang :

- Untuk Bantuan dari BPNT yang mendapat bantuan Cuma 24 KK.
- Bansos yang sudah realisasinya sebanyak 137 kk yang pembayarannya dari kantor Pos
- Bansos dari Kabupaten sampai saat ini belum realisasinya.
- Posko Kelurahan sudah berjalan selama 2 bulan.
- Bantuan dari Provinsi belum/tidak ada kejelasannya info dari Camat dan Kades.
- Untuk 107 KK di bebaskan dari dana Desa (BLTDD) sudah di lakukan pencairannya.
- BLTDD nilainya Rp. 600.000,- selama tiga bulan untuk bulan april, Mei dan Juni.
- Informasi dari Ibu Camat Sepang total dana bansos dari dana Desa yang sudah di cairkan untuk Kecamatan Sepang sebanyak Rp. 110.000,000,- lebih.
- Untuk data penerima Bansos sudah baik menurun informasi dari Ibu Camat, Anggota Dewan menyarankan data supaya di perbaiki lagi yang lebih akurat agar bantuan betul-betul yang berhak menerimanya karena data hari kehari bisa berubah-ubah sangat dinamis.

- Keluhan dari Camat dan Kades dalam pendataan penerima bansos banyak Masyarakat berlomba-lomba memiskin diri supaya bisa dapat bantuan.
- Pensiunan, PNS/ASN, Wiraswasta tidak dapat bantuan.
- Daftar usulan penerima Bantuan langsung tunai (BLT) dampak Covid 19 dari Dana Desa (DD) Desa Sepang Kota periode bulan april – Juni 2020 sebanyak 107 kk.
- Daftar penerima Bansos Covid 19 sumber dana dari Kementrian Sosial tahun 2020 untuk sepang kota sebanyak 122 kk.
- Peninjauan Jalan Palangka Raya - Kuala Kurun ada spot-spot atau titik-titik yang rusak, Berpotensi akan putus kalau tidak segera di tangani.
- Peninjauan Jalan di Wilayah Desa Kecamatan Sepang pada umumnya rusak parah perlu segera di tangani.

3. Kelurahan Pematang Limau Kec. Mihing : _____

- Bansos dari Kabupaten sampai saat ini belum realisasinya.
- Posko Kelurahan sudah berjalan selama 2 bulan.
- Bantuan dari Provinsi belum/tidak ada kejelasannya info dari Camat dan Kades.

- I - Untuk data penerima Bansos sudah baik menurun informasi dari Ibu Camat, Anggota Dewan menyarankan data supaya di perbaiki lagi yang lebih akurat agar bantuan betul-betul yang berhak menerimanya karena data hari kehari bisa berubah-ubah sangat dinamis.
- Keluhan dari Camat dan Kades dalam pendataan penerima bansos banyak Masyarakat berlomba-lomba memiskin diri supaya bisa dapat bantuan.
 - Kriteria pendataan oleh pihak Kelurahan yang tidak dapat Bansos seperti PNS/ASN, Pensiunan, Wiraswasta.

- Peninjauan Jalan di Wilayah Desa Pematau Limau pada umumnya rusak parah perlu segera di tangani.

4. Kelurahan Tbg. Talaken Kec. Manuhing :

- Kelurahan Tbg. Talaken Kec. Manuhing masih daerah hijau tidak ada kasus covid 19.
- Kades Tbg. Talaken menginfokan bagi tamu selain penduduk harus ada surat keterangan ravid tes nya.
- Dana Bantuan untuk 6 Posco dari 3 Perusahaan sawit di daerah se kecamatan Manuhing sebanyak Rp. 28.350.000,- berjalan 1,5 bulan.
- Dari Perusahaan Sawit PT. BMA 100 Paket sembako untuk Kelurahan Talaken dan sebanyak 2000 masker di bagikan ke 6 Posco se Kecamatan Manuhing.
- Info dari Ibu Lurah Tbg. Talaken data penerima Bansos dari RT dan RW sudah akurat.
- Bansos dari Kemensos dan BLT Provinsi masih belum realisasinya.
- Saran dari Anggota Dewan jangan sampai Masyarakat yang masuk kriteria menerima bansos tidak masuk data dan juga data penerima bantuan harus valid dan di perivikasi terus, Data yang sudah dapat bansos supaya di tempelkan di papan pengumuman Kantor Desa/Kecamatan agar seluruh Masyarakat tau yang dapat dan tidak.
- Daftar penerima bantuan sosial tunai dari Pemerintah Pusat tahun 2020 yang sudah di verifikasi dan layak sesuai ketentuan sebanyak 19 kk, yang di anggap tidak layak dan sudah di verifikasi sesuai ketentuan ada 4 kk.
- Daftar nama penerima Bansos Covid 19 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah oleh Dinas Sosial Provinsi

Kalimantan Tengah yang sudah di verifikasi untuk warga Kelurahan Tumbang Takaken sebanyak 294 kk.

- Peninjauan Jalan dari muara km 45 ke Tbg. Talaken Kec. Manuhing (Tumbang Jotoh) ada spot-spot atau titik-titik yang rusak parah berpotensi akan putus kalau tidak segera di tangani.
- Peninjauan Jalan di Wilayah Desa Tbg. Talaken Kec. Manuhing pada umumnya rusak parah perlu segera di tangani.

5. Kelurahan/Desa Bereng Jon Kec. Manuhing :

- Pj. Kades Bereng Jon mengatakan Posco berdiri atas swadaya Masyarakat setempat.
- Pasar mingguan di Desa Bereng Jon di tutup sementara sambil melihat kondisi keadaan pandemi covid 19
- Dana Desa (ADD) khusus untuk BLT dan untuk operasional Posco di anggarkan 30 %.
- Kementrian Sosial belum mencairkan dana BLT oleh data masih belum di verifikasi (belum valid).
- Bansos dari Provinsi belum cair info besaran dana Rp. 500.000,- per KK / bulan.
- Bansos dari Kabupaten masih belum cair.
- Menurut Pa. Kades pendataan penerima bansos pada intinya jangan sampai double dan banyak Masyarakat yang mampu mengatakan tidak mampu ini menjadi masalah bagi aparat Desa.
- Daftar Penerima Bansos tahun 2020 untuk Desa Bereng Jon sebanyak 62 kk.
- Pj. Kades sangat mengharapkan skala prioritas pembangunan pasar Desa.
- Masyarakat minta supaya di bangun tiang tower telkomsel di wilayah Tumbang Talaken umumnya Wilayah Rungan selama ini Masyarakat sangat kesulitan berhubungan karena tidak ada sinyal.

- Listrik juga sekarang ini hidupnya bergantian dan sering mati hidup.
- Menurut info dari Pj. Pa. Kades Begin Jl. Bereng Jon – Jl. Perempei di lalui oleh tiga Kecamatan, Kec. Manuhing Bereng Jon, Takaras dan Kec. Rungan sangat sangat rusak dan ada beberapa titik yang rusak perlu perhatian segera.
- Kantor Desa tidak memadai sebagai Kantor Desa.
- Mantir Adat minta supaya pembangunan di daerah Bereng Jon di perhatikan oleh pihak terkait.
- Peninjauan Jalan di Kelurahan/Desa Bereng Jon banyak yang rusak perlu perhatian oleh pihak terkait.

6. Kelurahan Takaras Kec. Manuhing :

- Daftar Nama-nama Penerima Bantuan Sosial bagi Masyarakat miskin atau pekerja rentan terdampak covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah untuk se Kabupaten Gunung Mas sebanyak 3012 kk
- Peninjauan Jalan yang ada dalam Kelurahan/Desa Takaras banyak yang rusak perlu perhatian oleh pihak terkait.

B. KABUPATEN KATINGAN :

1. Peninjauan Objek Wisata Bukit Batu Kasongan :
 - Harapan dari Pihak Pengelola Objek Wisata Bukit Batu Kasongan agar mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi dalam rangka Peningkatan sarana prasarana objek wisata agar dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Katingan yang representatif;
 - Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan telah mengusulkan pengembangan objek Wisata Bukit Batu

pembangunan berbagai fasilitas penunjang disekitar objek wisata. Namun karena pandemi corona, anggaran tersebut ditunda, dialihkan untuk penanggulangan wabah pandemi Covid-19;

- Objek Wisata Bukit Batu Kasongan ditutup untuk wisatawan selama masa wabah pandemi Covid-19, sampai waktu yang tidak ditentukan.

2. Peninjauan Pasar Besar Kasongan :

- Kunjungan ke Pasar Besar Kasongan, untuk melihat langsung aktivitas ekonomi masyarakat di tempat itu, terlebih ditengah wabah Pandemi Covid-19 sekarang ini;
- Dilakukan pembagian masker dan sabun cuci tangan secara gratis kepada masyarakat sekitar dan pengunjung Pasar Besar Kasongan.

3. Kecamatan Katingan Hilir :

- Data sebaran Covid-19 di Kecamatan Katingan Hilir :

OTG	ODP	PDP	Positif	Sembuh	Meninggal
1	13	1	4	2	0

- Kuota Bantuan Sosial dari Kabupaten Katingan untuk Kecamatan Katingan Hilir sebanyak 1.866 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan 750 paket PKD (Pemenuhan Kebutuhan dasar) berupa sembako, yang dibagi untuk keluarga miskin, sangat miskin dan rentan miskin.
- Untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari Provinsi Kalimantan Tengah yang disetujui adalah 2.212 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk 6 desa, dan ada 2 desa tidak dapat.

4. Kecamatan Tewang Sanggalang Garing :

- Data sebaran Covid-19 di Kec. Tewang Sanggalang Garing :

OTG	ODP	PDP	Positif	Sembuh	Meninggal
0	50	3	0	2	1

- Untuk penanganan dan penanggulangan Wabah Pandemi Covid-19, Pemerintah Kecamatan Tewang Sanggalang Garing telah mendirikan posko pencegahan dan antisipasi penyebaran Covid-19.
- Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Pusat di sebanyak 240 KK;
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 257 orang disalurkan melalui Bank BRI;
- Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial Republik Indonesia sebanyak 598 KK;
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Provinsi belum ada informasi dari Pemerintah Provinsi / Pemkab Katingan per tanggal 1 Juni 2020;
- Bantuan Sosial PKD (Pemenuhan Kebutuhan Dasar) berupa Sembako dari Pemerintah Kabupaten Katingan sebanyak 530 paket;
- Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah Kabupaten Katingan sebanyak 538 KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

5. Kecamatan Katingan Tengah :

- Data sebaran Covid-19 di Kecamatan Katingan Tengah :

OTG	ODP	PDP	Positif	Sembuh	Meninggal
3	3	0	3	3	0

- Upaya yang dilakukan di Kecamatan Katingan Tengah dalam rangka penanganan dan penanggulangan penyebaran wabah Covid-19 adalah dengan terus menerus mensosialisasikan pola hidup bersih kepada masyarakat dan mendirikan posko satgas Covid-19 di tiap desa/kelurahan;
- Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Katingan Tengah terkait dengan Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :
 - a) Jumlah kuota Bantuan Sosial yang diterima oleh Pemerintah Kecamatan/Desa/Kelurahan tidak sesuai dengan yang diusulkan padahal Basis Data Terpadu (DBT) diupdate setiap bulan;
 - b) Terdapat Penerima Bansos yang tidak sesuai dengan kriteria/tidak tepat sasaran, masyarakat lebih dulu tahu dari pemerintah kecamatan terkait dengan daftar penerima bansos sehingga banyak komplain dari masyarakat padahal data penerima bansos tersebut belum diverifikasi oleh petugas kecamatan;
- Kuota Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Kabupaten Katingan adalah sebanyak 14.026 Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- Terdapat beberapa desa di Katingan Tengah yang belum tersentuh Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bahkan ada desa yang sama sekali tidak mendapat bantuan sosial dari provinsi maupun dari kementrian, hanya mengandalkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang jumlahnya tidak dapat mengcover semua warganya;
- Besaran jumlah dan jangka waktu Bantuan Sosial Tunai yang diterima oleh masyarakat berbeda, antara lain sebagai berikut :

1. BST dari Kementrian diterima Rp. 600.000,- per bulan dengan jangka waktu 3 bulan (3 kali pencairan),total yang diterima per KPM adalah sebanyak Rp. 1.800.000,-
 2. BLT dari Dana Desa diterima Rp. 600.000,- per bulan dengan jangka waktu 3 bulan (3 kali pencairan),total yang diterima per KPM adalah sebanyak Rp. 1.800.000,-
 3. BLT dari Pemerintah Provinsi diterima Rp. 500.000,- per bulan hanya 1 (satu) kali
- Total Data penerima beberapa jenis Bantuan sosial untuk 15 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Katingan Tengah adalah sebanyak : 53 PKH (Program Keluarga Harapan), 146 BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), 1564 BST (Bantuan Sosial Tunai), 2084 BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa), 916 BST (Bantuan Sosial Tunai) dari Kabupaten, 2086 BST (Bantuan Sosial Tunai) dari Provinsi, 1450 Bantuan Sosial dari Perusahaan.
 - Kelurahan Samba Kahayan :
 - a) ODP di Kelurahan Samba Kahayan diminta untuk melakukan isolasi mandiri dirumah dan diawasi ketat oleh pihak Kelurahan serta semua kebutuhannya dipenuhi oleh pihak kelurahan;
 - b) Kelurahan Samba Kahayan tidak bisa mendirikan posko satgas covid-19 karena anggaran sangat terbatas, pihak kelurahan tetap berupaya maksimal dalam rangka melaksanakan sosialisasi pencegahan wabah covid-19, mengingatkan warganya untuk selalu melakukan pola hidup bersih;
 - c) Kuota Bantuan Sosial Tunai untuk Kelurahan Samba Kahayan hanya sebanyak 174 KPM, tidak dapat mengcover semua masyarakat yang terdampak Covid-19 karena Kelurahan tidak ada anggaran seperti Anggaran Dana Desa;

- d) Stiker Tanda Penerima Bantuan Sosial baru dipasang ketika Bantuan sudah diterima, seyogyanya Stiker tersebut dipasang pada saat pendataan/verifikasi data calon penerima.
- Desa Samba Katung :
- a) Posko Satgas Covid-19 aktif setiap hari sampai pukul 20.00 WIB, melakukan pembatasan akses masuk padagang yang dari wilayah Banjarmasin Kalimantan Selatan;
 - b) Bantuan Sosial Tunai yang disalurkan kepada Desa Samba Katung antarlain : Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pokok Non Tunai = 85 KK, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa = 254 KK, Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementrian= 254 KK, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Provinsi = 465 KK.
Untuk masyarakat yang berstatus PNS dan Tenaga Kontrak tidak dimasukkan kedalam data penerima, yang didata hanya untuk masyarakat yang terdampak;
 - c) Usulan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih, karena berdasarkan informasi / laporan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan bahwa air sungai katingan tidak layak lagi untuk dikonsumsi, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa telah menyiapkan hibah tanah/lahan untuk pembangunan instalasi pengolahan air bersih dan hibah tanah untuk jalan masuk ke lokasi di Desa Samba Katung;
 - d) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) / program bedah rumah, diharapkan tetap berjalan dan anggaran tidak dialihkan untuk penanggulangan Covid-19 mengingatkan program tersebut juga sasarannya untuk masyarakat yang tidak mampu khususnya untuk

masyarakat Desa Katung yang terdaftar sebanyak 20 KPM.

- Desa Samba Danum :
 - a) Samba Danum akan membuka akses jalan menuju Jembatan Tumbang Samba ± 330 meter, namun ditunda karena pergeseran Anggaran untuk penanganan covid-19 dan Anggaran Dana Desa digunakan untuk Dana Desa yang disalurkan 3 tahap;
 - b) Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah Provinsi masih kekurangan, data sudah disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Kecamatan Sanaman Mantikei :

- Data sebaran Covid-19 di Kecamatan Sanaman Mantikei :

OTG	ODP	PDP	Positif	Sembuh	Meninggal
0	2	0	0	0	0

- Untuk penanganan dan penyebaran wabah Covid-19, Pemerintah Kecamatan Sanaman Mantikei telah mendirikan posko pencegahan dan antisipasi penyebaran Covid-19;
- BLT dari Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH) & Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) dari Kementrian untuk wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei sudah disalurkan, namun masih banyak data yang tidak valid / tidak tepat sasaran karena masih terdapat nama orang yang sudah meninggal dunia dan yang sudah pindah domisili. Pemerintah Pusat (Kementrian terkait) sudah membuat draft usulan penghapusan data dan usulan nama penerima tetapi tidak merubah jumlah kuota penerima bantuan;

- BLT dari Pemerintah Provinsi, Kecamatan Sanaman Mantikei mendapat kuota sebanyak 500 KPM yang juga masih kurang tetap sasaran. Sebagai contoh, di Desa Tumbang Manggu terdapat sebanyak 59 KPM dari total 500 KPM untuk Kecamatan Sanaman Mantikei yang setelah diteliti secara kebetulan rata-rata dianggap masyarakat mampu karena memiliki penghasilan tetap dan yang menerima terdata dominan di RT. 03. Sama halnya juga yang terjadi di Desa Tumbang Kaman, rata-rata yang menerima bantuan tergolong masyarakat mampu (memiliki mobil) dan dominan hanya di RT.02;
 - Data calon Penerima BLT dari Pemerintah Provinsi diusulkan sebanyak 484 KK, yang masuk dalam daftar penerima hanya sebanyak 38 KK dan semua domisilinya berada di RT.02, setelah diteliti lebih lanjut, terdapat 25 KK dari 38 KK tersebut yang double (yang bersangkutan mendapatkan BST , PKH & BPNT). Kesepakatan Bersama Apartur Desa Tumbang Kaman untuk tidak menyalurkan kepada Penerima yang double dan yang dianggap masyarakat mampu, untuk itu Pemdес membuat surat berita acara pernyataan dari 25 orang tersebut untuk menyerahkan kepada yang lebih layak menerima bantuan.
7. Puskesmas Tumbang Kaman :
- Usulan pengaspalan jalan menuju Puskesmas Tumbang Kaman sepanjang ± 600 meter karena kondisi jalan yang pada saat hujan sangat licin sehingga akses jalan menuju ke puskesmas sangat sulit dan berbahaya untuk dilalui;
 - Usulan Pengadaan Mobil Ambulance;
 - Usulan Penambahan Tenaga Kesehatan;

- Data SDM Kesehatan yang tersedia di Puskesmas Tumbang Kaman, UPTD Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan :

No.	Jenis SDM Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Dokter Umum	1	
2	Perawat (Non Nurse)	24	
3	Bidan Klinik	5	
4	Bidan Desa	14	
5	Farmasi (Assisten Apoteker)	1	Belum ada Apoteker
6	Kesehatan Masyarakat Umum	1	
7	Sanitasi Lingkungan	1	
8	Nutrisionis	1	
9	Terapis Gigi dan Mulut	1	

- Data Permohonan penambahan penunjang operasional Puskesmas Tumbang Kaman sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Dinas (Sepeda Motor)	6	
2	Pelayan :		
	Posyandu Madya	15	
	Desa Siaga	11	
	Polindes	7	
	Pustu	6	

8. Puskesmas Baon Bango :
 - Sudah tersedianya rumah tunggu persalinan tanpa ada penarikan biaya untuk meningkatkan fasilitas Kesehatan puskesmas;
 - Bangunan puskesmas belum pernah direhab sejak tahun 1970;

- Kapasitas ruang rawat inap tersedia 3 ruangan;
- Usulan tambahan Tenaga kesehatan : bidan dan perawat di Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah Kecamatan Kamipang;
- Usulan penambahan mobil operasional Puskesmas Baon Bango;
- Usulan perbaikan jalan menuju Puskesmas Baon Bango.
- Data SDM Kesehatan yang tersedia di Puskesmas Baon Bango, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan :

No.	Jenis SDM Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Dokter Umum	1	
2	Perawat (Non Nurse)	10	
3	Perawat (SPK)	1	
4	Bidan Klinik	4	
5	Bidan Desa	5	
6	Bidan Umum	1	
7	Farmasi (SMF)	1	
8	Kesehatan Masyarakat Umum	1	
9	Sanitasi Lingkungan	1	
10	Nutrionis	1	
11	Terapis Gigi dan Mulut	1	
12	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Analisis Kesehatan)	1	

- Data Permohonan penambahan penunjang operasional Puskesmas Baon Bango sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Dinas : Sepeda Motor Pusling Roda 4 Pusling Air	1 1 1	
2	Pelayanan :		

Posyandu Pratama	11
Desa Siaga	9
Polindes	3
Pustu	8

9. Kecamatan Kamipang :

- Data sebaran Covid-19 di Kecamatan Kamipang :

OTG	ODP	PDP	Positif	Sembuh	Meninggal
0	0	0	0	0	0

- Posko Satgas Covid-19 di Desa Baon Bango aktif 24 jam setiap hari;
- Usulan perbaikan akses jalan dari Kereng Balawan menuju Desa Baun Bango;
- Jumlah masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kecamatan Kamipang sebanyak 1.000 KK, yang mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Katingan sebanyak 211 KK;
- Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Kecamatan Kamipang sebanyak 300 KK disalurkan melalui Kantor Pos;
- Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa senilai Rp.600.000,- x 3 bulan yang masih berjalan/dalam proses sinkronisasi data penerima di Kecamatan Kamipang;
- Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk Kecamatan Kamipang sebanyak 59 KK senilai Rp.200.000,- per bulan x 9 bulan;
- Bantuan Sembako dari Pemerintah Kabupaten untuk Kecamatan Kamipang sebanyak 300 Paket diterima awal Mei 2020 terdiri dari 10kg beras, 1 dus mie, sarden dan sabun cuci;
- Bantuan dari Non Pemerintah untuk Posko Covid-19 :

- a) Bantuan Sembako dari Partai NasDem untuk Puskesmas Baun Bango sebanyak 89 paket;
- b) Bantuan sembako dari Koni Kabupaten Katingan untuk Kecamatan Kamipang sebanyak 169 paket;
- Pemerintah Kabupaten Katingan sudah mengalokasi anggaran untuk perbaikan jalan menuju Desa Baon Bango sebesar Rp. 9.000.000.000 (Sembilan Miliar Rupiah), namun untuk tahun 2020 realisasinya ditangguhkan karena Pandemi Corona;
- Data Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah Pusat untuk Desa Baun Bango sebanyak 121 KK dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Desa Baun Bango sebanyak 173 KK. Setelah dilakukan verifikasi data oleh Pemerintah Desa Baun Bango terdapat temuan hanya ada 27 KK penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak double masuk ke data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah Pusat, sedangkan jumlah KK yang tidak masuk sama sekali di data Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah Pusat maupun di data Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 60 KK;

C. KOTA PALANGKA RAYA :

1. Peninjauan Objek Wisata Batu Banama :
 - Wisata Batu Banama adalah salah satu objek wisata di Kalimantan Tengah yang terletak di kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. Bukit Batu Banama adalah salah satu bukit dari 3 bukit yang ada di Desa Tangkiling kecamatan Bukit Batu.
 - Harapan dari Pihak Pengelola Objek Wisata Batu Banama agar mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi dalam

rangka Peningkatan sarana prasarana objek wisata tersebut agar dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

2. Kelurahan Tangkiling :

- Data sebaran Covid-19 di Kelurahan Tangkiling :

OTG	ODP	PDP	Positif	Sembuh	Meninggal
0	0	0	1	0	0

- Kuota Bantuan Sosial dari Provinsi Kalimantan Tengah untuk masyarakat miskin atau pekerja rentan terdampak Covid-19 di Kelurahan Tangkiling, Kota Palangka Raya adalah sebanyak 388 KK.

3. Peninjauan Obyek Wisata Danau Sabangau :

- Akses jalan menuju obyek wisata Danau Sabangau perlu ditingkatkan, karena akses jalan yang ada selama ini hanya berupa titian yang terbuat dari papan. Untuk itu diharapkan adanya perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Peninjauan Pelabuhan Kapal Wisata Danau Sabangau :

- Perlunya perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Pelabuhan Wisata Danau Sabangau, sehingga bisa lebih banyak menarik wisatawan untuk datang berkunjung;
- Perlu ditingkatkan penataan Pelabuhan Wisata Danau Sabangau agar lebih menarik dan bisa memiliki nilai tinggi bagi bidang pariwisata di Provinsi Kalimantan Tengah Khususnya Kota Palangka Raya.

VIII. PENUTUP :

Demikian laporan hasil Reses Tim Dapil Kalteng I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, sebagai bahan masukan dan evaluasi kita bersama, untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah.

Kepada hadirin yang dengan sabar untuk mengikuti Laporan Hasil Reses ini diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ;

Palangka Raya, 01 Juli 2020.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TIM RESES DAPIL KALTENG I**

Ketua Tim,



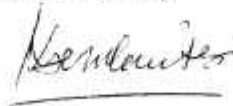
Drs. DUWEL RAWING

Sekretaris Tim,



Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M.Si

Juru Bicara,



Dra. KUWU SENILAWATI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



BATANG GARING
PALANGKA RAYA

LAPORAN

HASIL TIM RESES DAPIL KALTENG II DPRD PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH KE KAB. KOTIM SERTA
KAB. SERUYAN, DARI TANGGAL 31 MEI S/D 7 JUNI 2020
DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA KE - 2
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020

PALANGKA RAYA, JUNI 2020

**LAPORAN HASIL RESES DAERAH PEMILIHAN KALTENG II
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020
KE KABUPATEN KOTIM DAN KABUPATEN SERUYAN**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera dan Selamat Pagi bagi kita sekalian*

- YTH. SAUDARA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH ;
- YTH. SAUDARA WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH ;
- YTH. SAUDARA WAKIL - WAKIL KETUA DAN SEMUA ANGGOTA DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ;
- YTH. SAUDARA UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH ATAU YANG MEWAKILI ;
- YTH. SAUDARA KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH ATAU
YANG MEWAKILI ;
- YTH. SAUDARA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ;
- YTH. SAUDARA KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ATAU YANG MEWAKILI;
- YTH. SAUDARA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ATAU YANG MEWAKILI ;
- YTH. ASISTEN SEKRETARIS DAERAH / STAF AHLI GUBERNUR DAN
SEMUA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH ;
- YTH. SAUDARA - SAUDARA TIM AHLI DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI ;
- YTH. WARTAWAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA UNDANGAN
SEKALIAN YANG SAYA MULIAKAN.

Yang Pertama dan utama marilah kita mempersembahkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nyalah kita di berikan kesempatan, kemampuan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna ke – 2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 dengan acara Penyampaian Laporan Hasil Reses DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020.

Selanjutnya guna memanfaatkan waktu yang tersedia, akan di bacakan laporan hasil Reses Dapil Kalteng II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmatNya kepada kita sehingga kami dapat menyelesaikan semua tugas dan kewajiban kami dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kegiatan reses Kelompok Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 ini, memberikan masukan dan wadah bagi masyarakat untuk bertemu secara langsung sekaligus menyampaikan aspirasinya. Kegiatan ini sangat positif dan telah dirangkumkan untuk menjadi prioritas sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam menyusun program Kesehatan dan Bantuan Sosial di masa yang akan datang. Dalam pelaksanaan reses Kelompok tahun ini, Pelaksanaan Reses Khusus penekanan pada Percepatan Penanganan Copid 19 dan bantuan sosial dana APBD provinsi Kalteng, mendapatkan banyak beragam apresiasi yang sangat baik, oleh karena itu kami menghaturkan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang ikut berperan dan terlibat dalam kegiatan ini, terutama kepada pemerintah kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Gugus Tugas Copid 19, Dinas Sosial dan Bank Kalteng. Oleh karena itu kami haturkan ucapan terimakasih atas bantuan dan doanya bagi kami untuk terus berjuang menyampaikan berbagai harapan dan keinginan masyarakat. Semoga amal baik kita semua mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian akhir kata kami, semoga harapan dan perjuangan kita semua mendapatkan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

I. PENDAHULUAN

A. DASAR

1. Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020.
2. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 188.4.43/12//DPRD/2020 tanggal, 29 Mei 2020 tentang Tugas Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Daerah Pemilihan pada Kabupaten / Kota dan Kecamatan di Kalimantan Tengah Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020.
3. Surat Perintah Tugas Nomor : 86/SPT/DPRD/2020 Tanggal 29 Mei 2020 ; serta Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 094/86/DPRD/2020. Tanggal 29 Mei 2020

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Laporan ini dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran Pelaksanaan Kegiatan Reses Tim Dapil Kalteng II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kotawaringin timur serta Kabupaten Seruyan dalam Kunjungan / Peninjauan Lapangan di Pemerintah Kabupaten Dinas Sosial, Sekretariat Copid 19, Bank Kalteng dan Pemerintah Kecamatan Serta pemantauan langsung di lapangan tentang pelayanan pemerintahan, terhadap Penyaluran Bantuan Sosial, Bantuan Langsung Tunai dan pembinaan kemasyarakatan yang bersumber dari dana Provinsi.
2. Tujuannya untuk melihat sejauh mana pelayanan kemasyarakatan dan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah berjalan sesuai yang diharapkan selain itu yang bertujuan menampung dan menyerap aspirasi masyarakat, di Kabupaten Kotawaringin Timur Serta Kabupaten Seruyan.

C. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA.

Ruang lingkup laporan ini, adalah hasil peninjauan lapangan dan pertemuan dengan Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur serta Pemerintah kecamatan di Kabupaten Seruyan, Baik pemantauan secara Tim, maupun secara perorangan di lapangan selama masa Reses Tim Dapil Kalteng II berlangsung. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN.
- II. KEGIATAN RESES
- III. HASIL RESES.
- IV. KESIMPULAN DAN SARAN.
- V. PENUTUP.
- VI. LAMPIRAN.

II. KEGIATAN RESES.

A. PERSONIL DAPIL KALTENG II

NO	N A M A	JABATAN	KOMISI
1	JAINUDIN KARIM. SE	KETUA TIM	II
2	IRAWATI, S.Pd	SEKRETARIS	I
3	Ir. ARTABAN, MH	ANGGOTA	IV
4	H. SUDARSONO	ANGGOTA	II
5	YENI MARIA MARSELINA KAHTA	ANGGOTA	II
6	RIZKI AMALIA DA.BA.,(HONS)., M.SC	ANGGOTA	IV
7	FERRY KHAI DIR	ANGGOTA	I
8	TOGA HAMONANGAN NADEAK, SH.,MH	ANGGOTA	I
9	FAJAR HARIADY	ANGGOTA	II
10	SINAR KAMALA	ANGGOTA	I

B. PENDAMPING DARI SEKRETARIAT DPRD PROV. KALTENG

1. YANTO B. SAKTI.(Staf Setwan Prov. Kalteng)
2. YOHANES HARYONO.(Staf Setwan Prov. Kalteng)
3. SAHDO MIARDO. (Staf Setwan Prov. Kalteng)

C. WAKTU DAN TEMPAT.

Kegiatan Reses Tim Dapil Kalteng II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan selama 8 (Delapan) hari kerja terhitung dari tanggal 31 Mei s/d 7 Juni 2020 dengan sasaran / lokasi Daerah Kabupaten Kotim meliputi Dinas Sosial, Sekretariat Gugus Tugas Copid 19, Bank Kalteng, Kecamatan Cempaga dan Kecamatan Cempaga Hulu serta Kabupaten Seruyan meliputi Dinas Sosial, Sekretariat Gugus Tugas Copid 19, Bank Kalteng, Kecamatan Seruyan Hilir Timur dan Kecamatan Seruyan Raya

KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR.

Tim Reses Dapil Kalteng II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kunjungan / peninjauan lapangan di Dinas Sosial dan Bank Kalteng Kabupaten Kotim, Pertemuan di Laksanakan di Bank Kalteng Dengan di Hadiri Pihak Pemerintah Kab. Kotim, Dinas Sosial dan Bank Kalteng

Pertemuan di Pimpin Langsung oleh Sekda Kab. Kotim (**Bpk. H. HALIKINNOR, SH., MH**) beserta jajarannya, Kepala Dinas Sosial (**Ibu. RUSMIATI**) dan Kepala Cabang Bank Kalteng dalam kesempatan pertemuan tersebut telah berkembang usul, saran dan pendapat Serta data - data dari wilayah Kabupaten Kotim Sebagai Berikut :

- Program Penyaluran Bansos Copid 19 Pemprov. Kalteng per tanggal 28 Mei s/d 02 Juni 2020. Dengan jumlah KPM 20.986 kepala keluarga (KK) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah. Bantuan tersebut disalurkan secara bertahap dan terjadwal melalui Bank Kalteng Cabang Kotim dengan total pagu dana sebesar Rp. 10.493.000.000.
- Sampai saat ini progress penyaluran BLT sudah mencapai 9,41 % dan sudah di salurkan sebanyak 1.974 KK dengan jumlah dana sebesar Rp. 987.000.000.

Tim Reses Dapil Kalteng II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah juga melaksanakan Kunjungan / Peninjauan Lapangan di Laksanakan di Aula Sekretariat Gugus Tugas Copid 19 Kotim Dengan di Hadiri Pihak Gugus Tugas Copid 19, Pertemuan di Pimpin Langsung Sekretaris Gugus Tugas Copid 19 Kotim (**Bpk. Dr. FAISAL NOVENDRA CAHYANTO**) dan Juru Bicara Gugus Tugas Copid 19 (**Bpk. MULTAZAM, ST., M.MT**) Beserta Jajarannya dalam kesempatan pertemuan tersebut telah berkembang usul, saran dan pendapat dari Gugus Tugas Copid 19 Kotim Antara Lain :

1. Tim Gugus Tugas Covid 19 Kotim untuk penyaluran bansos Masyarakat terdampak Copid 19.
2. Sosialisasi Sanitaiser, protokol Kesehatan.
3. Melakukan Identifikasi kelompok Masyarakat yang berpotensi Terjangkit Virus Copid 19.
4. Sudah melakukan Testing terhadap kelompok Masyarakat dengan 2 Jenis bantuan Rapid Test yang berasal dari Provisasi dan pusat
5. Gugus Tugas Copid 19 Kab. Kotim sudah mempersiapkan Rumah Sakit karantina Yang bertempat di Asrama Haji dengan kapasitas 70 Bed tempat tidur.
6. Mohon Bantuan pada Anggota DPRD Prov. untuk dapat mendorong para pelaku usaha dan Perkebunan agar Karyawannya bisa dilakukan Rapid Test.

INFORMASI BANTUAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Ada banyak akses bantuan, sementara di Kabupaten Kotawaringin Timur ada 8 Pintu masuk, yaitu :

1. Program Kel. Harapan. (Dinsos Kab. Kotim)
2. Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)/Program Sembako menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (Dinsos Kab. Kotim)
3. BLT Dana Desa (Desa)
4. Kartu Pra Kerja. (Disnaker)
5. Bantuan Sosial Tunai Kemensos (Dinsos Kab. Kotim)
6. Bansos Provinsi (Dinsos Provinsi)
7. Bansos Pemkab (ASN dan Gugus Tugas)
8. Gerakan Swadaya Masyarakat. (Perusahaan/LSM/Masy).

Penjelasan :

Program Kel. Harapan. (Dinsos Kab. Kotim)

Program Keluarga Harapan (PKH) didapat Per-Komponen. Disalurkan sebelum Covid per triwulan, tetapi setelah Covid disalurkan setiap bulan. Jumlah keluarga penerima manfaat/KPM sebesar 10.772 Kepala Keluarga. Program ini sasarannya adalah keluarga kurang mampu. Bantuan ini diperuntukan kepada komponen pendidikan, kesehatan, orang lansia dan disabilitas.

Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)/Program Sembako menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (Dinsos Kab. Kotim)

Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako) dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Nama Program ini sebelumnya Raskin/Rastra. Bantuan ini di berikan Per KK Rp. 200.000, disalurkan setiap bulan. Jumlah penerima 18.702 KK. Penerima Program KKS ini juga penerima PKH, tetapi tidak semua.

BLT Dana Desa (Desa)

Program Bantuan Langsung Tunai Desa yang di selenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melakukan refocusing dana desa untuk di distribusikan kepada masyarakat (melalui mekanisme Musyawarah Luar Biasa Desa).

Kartu Pra Kerja. (Disnaker)

Program Kartu Pra Kerja di selenggarakan oleh Menko Bidang Perekonomian. Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Didesain sebagai sebuah produk, program ini dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih, dan memberi evaluasi. Karena hanya dengan cara ini, produk bisa terus diperbaiki, tumbuh, dan relevan. Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat. Gotong royong. Demi SDM Unggul, Indonesia Maju. Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga buruh, karyawan dan pegawai. Pendeknya, semua warga bangsa yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah, boleh mendaftar. Karena kami percaya, belajar dan berlatih semestinya tak mengenal usia. Lifelong learning. Namun prioritas diberikan pada pencari kerja usia muda karena langkah pertama di dunia kerja akan membawa pada langkah-langkah selanjutnya yang lebih gemilang di masa depan. Merespon dampak COVID-19, untuk sementara waktu, Kartu Prakerja akan diprioritaskan bagi pekerja maupun pelaku usaha mikro/kecil yang terdampak penghidupannya.

Bantuan Sosial Tunai Kemensos (Dinsos Kab. Kotim)

Bantuan Sosial Tunai/Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 600.000 / Kepala Keluarga. Disalurkan setiap bulan selama 3 bulan (April s/d Juni). Jumlah penerima 9.190 KK

Bantuan Sosial Tunai untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 yang di berikan Pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 8 Mei 2020 mulai didistribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Bantuan Sosial sebagai wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang terdampak Covid-19. Bantuan Sosial Tunai ini di salurkan melalui Kantor Pos dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Rincian data Bantuan Sosial Tunai yang akan didistribusikan secara bertahap untuk 17 kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) adalah bantuan tunai yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan Dampak Covid-19 Rp 600.000,- Per keluarga per bulan untuk bulan April, Mei, Juni (3 Bulan) saja Penerima Bansos Tunai adalah sebagai berikut :

- Kouta : 11.189 KK
- Jumlah Bansos Tunai Kotim 9.190 KK terdiri dari :
 - Data DTKS (KEMSOS) : 6.774 KK
 - Non DTKS (Usulan Pemda) : 2.416 KK

Penyalurannya :

- Melalui Rekening Bank BRI dan BNI : 788 KK
- Melalui Kantor Pos : 8.492 KK

Perkembangan Penyampaian Data BNBA (By Name By Address) :

- Tahap I = 788 KK
- Tahap II = 6.892 KK
- Tahap III = 1.443 KK
- Belum dikirim = 67 KK

Data yang diusulkan tersebut kemudian akan diverifikasi oleh tim Kemensos, guna memastikan bahwa yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah pusat yang lain, sehingga tidak terjadi data ganda.

Data per kecamatan (data per tanggal 6 Mei 2020) sebagaiberikut :

Nama Kecamatan	Jumlah
1. Antang Kalang	275
2. Baamang	972
3. Bukit Santuai	61
4. Cempaga	335
5. Cempaga Hulu	367
6. Kobes	331
7. MBK	1108
8. MHS	561
9. MHU	346
10. Mentaya Hulu	242
11. Parenggean	430
12. Pulau Hanaut	517
13. Seranau	349
14. Telaga Antang	409
15. Telawang	76
16. Teluk Sampit	270
17. Tualan Hulu	243
Jumlah	6892

Bansos Provinsi (Dinsos Provinsi)

Program Gubernur melalui Dinsos Provinsi Kalimantan Tengah sudah diusulkan Kuota 16.093 KK. Bentuk Bantuan belum terkonfirmasi.

Bansos Pemkab (ASN dan Gugus Tugas)

Program Bantuan dari Kabupaten untuk Keluarga ODP, PDP dan Positif yang tidak mampu dengan nilai per KPM. Program ini didistribusikan melalui Gugus Tugas Covid 19 Kab. Kotim.

Gerakan Swadaya Masyarakat. (Perusahaan/LSM/Masy).

Program Swadaya masyarakat di lakukan banyak oleh masyarakat baik secara berkelompok atau secara mandiri.

Program dari Perusahaan besar berupa bantuan Sembako yang di distribusikan langsung oleh Perusahaan kepada masyarakat dengan berkoordinasi dengan Kecamatan dan Desa.

Kecamatan Cempaga

Tim Reses Dapil II melaksanakan kunjungan / peninjauan di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kota Waringin timur, dan mengadakan Pertemuan bertatap muka dengan pihak Pemerintah Kecamatan Kota Cempaga dipimpin Langsung oleh Plt. Camat (**Bpk. DEDI PURWANTO**) dan dihadiri oleh

Kapolsek dan para Kepala Desa yang ada diwilayah Kec. Kecamatan Cempaga dalam pertemuan telah berkembang usulan sehingga saran dan pendapat dari Bpk.Camat dan beberapa Kepala Desa dapat direspon. usulan tersebut sebagai berikut :

1. Di Kecamatan Cempaga telah masuk beberapa Bantuaan social yangbersumber dari dana pemerintah; BPNT/PKH,BST via pos,BLT DD dan Bansos Provinsi
2. Untuk mengendalikan agar Bantuan sesuai dengan ketentuan (bahwa tidak boleh ada tumpang tindih bantuan untuk satu keluarga) maka di Kecamatan Cempaga Proses penyaluran melalui control Pemerintah Desa dengan proses :
 - Desa melakukan pengecekan dan menyeleksi daftar dengan menyandingkan semua daftar penerima bantuan
 - Mengeluarkan dan mencoret nama – nama yang terdobel
 - Proses penyaluran bantuan sudah terlaksana ; BPNT/PKH regular sesuai jadwal dari Kemensos, BST BRI dan Pos tahap 1 sudah di terima oleh penerima BST tanggal 12 s/d 15 Mei 2020. BLT DD sudah semua Desa menyalurkan sebelum Hari Raya.
 - Untuk penyaluran Bansos Provinsi di lakukan dengan surat kuasa yang di ketahui oleh Camat untuk mengontrol agar tidak terjadi Duplikasi.
 - Desa Jemaras sudah melakukan penyaluran kepada Masyarakat pada Jum'at, tanggal. 29 Mei 2020, sedangkan 7 Desa lainnya berkas sudah masuk di Bank Kalteng,menunggu pemberitahuan jika berkas sudah selesai di verifikasi oleh Bank

3. Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan Cempaga ada beberapa kendala dan permasalahan antara lain :
- Penerima BNPT / PKH yang terdaftar ada yang belum memiliki rekening karena yang bersangkutan tidak hadir pada saat penyerahan dan pembuatan rekening oleh Bank.
 - Daftar penerima BST Pos yang di kirim oleh Dinas sosial berbeda dengan daftar undangan yang di kirim oleh pos (misal; Desa Luwuk Ranggan,terdaftar hanya 57 kk tetapi yang dapat undangan dari pos 122)
 - Setelah di lakukan pengecekan,ada undangan yang dobel dengan nama yang sama,suami dan Istri menerima undangan,terdobel dengan BLT DD,BPNT dan PKH.
 - Tim Reses Dapil II masih banyak menemukan permasalahan di beberapa daerah,yang mana salah satunya terkait data penerima bansos social tunai (BST) atau bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov)
 - Di Desa Patai Kec.Cempaga Tim Reses Dapil II menemukan data Masyarakat Calon penerima bansos dari Pemprov.masih banyak yang belum terdata dan tidak tepat sasaran Kerena data yang di ajukan dari tingkat Kelurahan / Kades, Rt/Rw banyak yang tidak terakomodasi, dari 162 kk yang terdata,yang terealisasi hanya 21 kk. Di Sela pertemuan ini pula Kepala Desa Petai mohon pada Pemerintah Untuk melakukan perbaikan Jembatan di Desanya antara Rt 3 ke Rt 4 Karena sudah banyak menelan korban Warga Desa.
 - Desa Jemaras Kec.Cempaga telah Memasukan data 400 lebih kepala keluarga (KK) tapi yang dapat bantuan hanya 1 KK dan ini sangat jauh dari yang di usulkan.
 - Daftar penerima Bansos Provinsi terdobel dengan bantuan lain.
 - Tidak sesuai dengan NIK yang tertulis di daftar penerima dengan NIK di KK padahal alamat sama,sehingga Bank mengembalikan barkas untuk di teliti dan di lengkapi oleh Pemerintah Desa.

REKAPITULASI PENERIMA BANTUAN DI KECAMATAN CEMPAGA PER 3 JUNI 2020.

NO	DESA	KK	BPNT	PKH	BST BRI	BST POS		BLT DD	BANSOS PROV		JML	Yg bl dpt
						Terdaftar	Realisasi		Terdaftar	Realisasi		
1	Rubung Buyung	664	196	150	1	53	53	108	287	181	539	125
2	Patai	973	232	139	5		75	120	484	300	732	241
3	Luwuk Ranggan	899	276	192	5		57	73	429	340	751	148
4	Jemaras	566	87	60			28	62	357	281	458	108
5	Camba	1445	192	117	1		80	110	860	730	1113	332
6	CMT	491	136	88			19	58	269	208	421	70
7	Sungai Paring	686	70	47	1		47	118	418	315	551	135
8	Luwuk Bunter	473	63	36	2		26	61	255	196	348	125
	Jumlah	6197	1252	829	15		385	710	3359	2551	4913	1284

Kecamatan Cempaga Hulu

Tim Reses Dapil II melaksanakan kunjungan / peninjauan di Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kota Waringin timur, dan mengadakan Pertemuan bertatap muka dengan pihak Pemerintah Kecamatan Cempaga Hulu dipimpin Langsung oleh Camat (**Bpk. UBAIDILAH ASMARIN**) dan dihadiri oleh

Kapolsek, Danramil dan para Kepala Desa yang ada di wilayah Kec. Kecamatan Cempaga Hulu dalam pertemuan telah berkembang usul dan sehingga saran dan pendapat dari Bpk. Camat dan beberapa Kepala Desa dapat direspon. usulan tersebut sebagai berikut :

- yang dapat bantuan hanya 1 KK dan ini sangat jauh dari yang di usulkan.
- Permasalahan yang sering timbul dan sering di sampaikan oleh bpk. Camat dan beberapa Kepala Desa adalah Data penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, hal yang sangat di sesalkan Masyarakat adalah banyak warga yang tergolong tidak mampu malah tidak dapat bantuan, sebaliknya warga yang secara ekonomi dianggap mampu justru menerima bantuan.
- Akibat semrawutnya data tersebut menimbulkan keresahan dan kecemburuan di Masyarakat. Ujung – ujungnya banyak pihak yang di persalahkan. Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat terkait hal ini.

KABUPATEN SERUYAN.

Tim Reses Dapil Kalteng II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Seruyan melaksanakan kunjungan / peninjauan lapangan di Dinas Sosial, Sekretariat Gugus Tugas Copid 19 dan Bank Kalteng Kabupaten Seruyan, Pertemuan di Laksanakan di Dinas Sosial Kab. Seruyan. Tim Reses Dapil Kalteng II diterima oleh Plt. Kadis Sosial (**Bpk. ANGGA, SE**) dan jajarannya serta Kunjungan / peninjauan lapangan di lanjutkan ke Bank Kalteng Kab. Seruyan, pertemuan di pimpin oleh Kepala Cabaang (Bpk. SOPIAN) dan Jajarannya.

dalam kesempatan pertemuan tersebut telah berkembang usul, saran dan pendapat Serta data - data dari wilayah Kabupaten Seruyan Sebagai Berikut :

- Rekapitulasi data penerima bantuan Sosial Copid 19 Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk Kab. Seruyan. Data Update 17 Mei 2020 Dinas Sosial 1.387 kk, Dinas UMKM 323 kk. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan 3.040 kk. Dinas Kelautan dan Perikanan 581 kk. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3 kk. Biro Kesra 41 kk. Jumlah. 5.475 kk.

- Bantuan sosial terdiri dari beberapa SOPD sebagai pengusul bantuan seperti Dinas Sosial 912 kk, DKPP 2.871 kk, Dinas Perikanan 136 kk, bagian Kesra Setda Seruyan 40 kk dan Dinakertrans 3 kk. Baru tersalur 1.487 kk dari 4 Desa atau sekitar 7,62 % dengan besaran dana Bansos Kab. Seruyan yang berasal dari APBD Pemprov. 1.8 Milyar.
- BLT Untuk Kab. Seruyan Yang baru terealisasi jumlah penerima 302 kk dari 3.689 kk dengan nilai total jumlah bantuan Rp. 1.869.000.000,-. Baru realisasi sebesar 151.000.000,- atau sebesar 6.72 %.
- Dinas sosial Kabupaten Seruyan, saat ini tengah melakukan proses pemilahan terkait penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Kalteng yang disalurkan untuk Warga terdampak Covid 19, pemilahan penerima bantuan tersebut dilakukan, lantaran banyaknya data yang terduplikasi dan banyak penerima telah mendapatkan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran bantuan lainnya.
- Ada satu Desa yang warganya tidak mau menerima bantuan dari Provinsi karena sudah menerima dari Kabupaten yaitu Desa Suling Tambun Kec. Rantau Pulut.

Kecamatan Seruyan Raya

Kunjungan / peninjauan Tim Reses Dapil Kalteng II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Kecamatan Seruyan Raya, Pertemuan di Laksanakan di Aula Kecamatan Seruyan Raya Dengan di Hadiri Pihak Pemerintah Kecamatan Seruyan Raya, Pertemuan di Pimpin Langsung Camat Seruyan Raya (**Bpk. ROBY KURNIAWAN**) dan dihadiri oleh Pihak Pemerintah Kecamatan Seruyan Raya, juga hadir Kepala Desa dan Staf Puskesmas Wilayah Kecamatan Seruyan Raya, dalam kesempatan pertemuan kunjungan tersebut telah berkembang usul, saran dan pendapat data – data dari Pemerintah Kecamatan Seruyan Raya dan beberapa Kepala Desa yang hadir, sebagai berikut :

- Bansos di Wilayah ini sudah di salurkan satu minggu sebelum Lebaran dan daftar penerima BLT dari APBD Provinsi masih di cek datanya agar tidak terjadi tumpang tindih.
- Jumlah Masyarakat penerima Bansos dari APBD Provinsi yang terdata hanya 123 kk dan ada satu Desa yang tidak terdata yaitu Desa Selunuk.
- Disampaikan petugas puskesmas di kecamatan ini terdapat 4 orang ODP dan mendapat 10 alat Rapid Test.
- Di sela kunjungan ini pula Bpk. Camat dan beberapa Kades menyampaikan permohonan bantuan pada Pemerintah agar di Kecamatan ini dibuatkan lahan pertanian dan perkebunan Masyarakat.
- Mohon bantuan Pada Pemerintah untuk penataan / normalisasi Sungai Rungan Desa Terawan karena rawan terjadi pendangkalan. Panjang Sungai ± 25 km.

Kecamatan Seruyan Hilir Timur

Tim Reses Dapil Kalteng II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Kunjungan / peninjauan di Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan, pertemuan bertempat di Aula Kecamatan Seruyan Hilir Timur, pertemuan dipimpin Camat Seruyan Hilir Timur (**Bpk HM. HASAN, SH., MSM**). Di hadiri oleh pihak pemerintah Kecamatan serta beberapa Kepala Desa yang ada diwilayah Kec. Kecamatan Seruyan hilir Timur.

dalam Peninjauan ini telah berkembang usul, saran dan pendapat serta data-data Sehingga dapat direspon Pemerintah sebagai berikut :

- Jumlah Masyarakat penerima bansos anggaran APBD Provinsi sebanyak 442 kk dari 6 Desa yang ada di Kecamatan Seruyan Hilir Timur.
- Tidak sinkron data antara Dinas sosial Kabupaten dan Dinas Sosial Provinsi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN.

Tim Reses Dapil kalteng II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Melaksanakan kegiatan Reses ini khusus penekan pada Percepatan penanganan Copid 19 dan Bansos Provinsi seperti :

Melaksanakan Kunjungan / Peninjauan Lapangan dengan Dinas Terkait pada setiap Kabupaten dan Kecamatan yang menjadi objek tujuan Tim Reses Dapil Kalteng II dan melakukan pantauan dan cek lapangan. Untuk menjadi perhatian kita bersama antara lain :

- a. Harapan kami dari Tim Reses Dapil II, dalam percepatan penanganan Copid - 19 di Kabupten Kotim dan Kab.Seruyan Supaya selalu tetap disiplin menjalankan protocol kesehatan agar penyebaran virus dapat di kendalikan. Hasil pantauan di Bank Kalteng Jl.Achmad Yani,warga antre untuk mencairkan Dana bantuan yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah terjadi kepadatan lalu lintas dan membludaknya antrean Masyarakat, supaya pihak Bank Sebagai Penyalur bantuan agar tetap memperhatikan Sosial Discenting dan jaga jarak sesuai protocol kesehatan.
- b. Program Pendataan Masyarakat Penerima Bansos tunai terdampak Copid - 19 dari Pemprov.Kalteng agar Benar - benar valid dan akurat karena keakuratan data penerima bantuan social yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan warga terdampak Copid - 19 saat ini banyak di keluhkan Masyarakat karena banyak tumpang tindih di harapkan pada Pemerintah Supaya segera membenahi dan memperbaiki serta pemutakhiran data penerima bansos agar tepat sasaran.

- c Hasil pengamatan selama kegiatan kunjungan / peninjauan lapangan baik di Kabupaten dan Kecamatan banyak ditemukan permasalahan yang di sampaikan oleh kepala Desa terutama dengan kondisi saat ini di tengah pandemic Copid - 19. Banyak Desa tidak biasa menunjukkan data - data warga yang masuk dalam daftar penerima bantuan pusat, baik itu penerima PKH, BST, BPNT atau jenis bantuan lainnya. Sementara itu kepla Desa berdalih bahwa mereka tidak mengetahui tentang pendataan warganya oleh Dinas Sosial sebab mereka tidak pernah di beritahu dan di libatkan sehingga dapat menimbulkan polemic di Masyarakat.
- d. Bidang Pembangunan, Di sela kunjungan ini pula Bpk. Camat Seruyan Raya dan beberapa Kades menyampaikan permohonan bantuan pada Pemerintah agar di Kecamatan ini dibuatkan lahan pertanian dan perkebunan Masyarakat Serta Mohon bantuan Pada Pemerintah untuk penataan / normalisasi Sungai Rungan Desa Terawan karena rawan terjadi pendangkalan. Panjang Sungai ± 25 km.
- e. Peran serta dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal kesehatan Masyarakat dan penanganan Bansos terdampak Copid - 19 serta Pembangunan di Kalimantan Tengah agar ditingkatkan khususnya dalam hal percepatan penanganan Copid - 19, penyaluran bansos dan Pembangunan serta pemeliharaan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten, supaya pembangunan di Kalimantan Tengah ini berkesinambungan.

V. PENUTUP.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia. Demikian Laporan hasil Kunjungan Tim Reses Daerah Pemilihan Kalteng II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kotawaringin Timur serta Kabupaten Seruyan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, semoga apa yang kami peroleh selama Reses di Kabupaten Kotawaringin Timur serta Kabupaten Seruyan tersebut dapat dijadikan pertimbangan dan direalisasikan dalam rangka pelaksanaan percepatan penanganan Copid - 19 dan pembinaan kemasyarakatan untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kalimantan Tengah pada khususnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesabaran hadirin guna mengikuti Rapat Paripurna Dewan dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Reses, kepada Pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada Tim Reses Dapil Kalteng II untuk menyampaikan laporan Reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah serta kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pemerintah Kabupaten Seruyan sekali lagi agar memerintahkan SOPD terkait untuk menindaklanjuti usulan dari masyarakat melalui Tim Reses Dapil Kalteng II serta semua pihak yang telah mendukung sehingga kegiatan Reses Dapil Kalteng II DPRD Provinsi Kalteng dapat terlaksana dengan baik.

***Sekian dan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Palangka Raya, Juni 2020

**DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TIM RESES DAPIL KALTENG II**

KETUA TIM,


IAINUDIN KARIM, SE

SEKRETARIS TIM,


IRAWATI S.Pd

JURU BICARA,


IRAWATI S.Pd



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

L A P O R A N
HASIL PELAKSANAAN RESES
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020



DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TENGAH III
M E L I P U T I :
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, KABUPATEN LAMANDAU
DAN KABUPATEN SUKAMARA

Palangka Raya, Juni 2020

L A P O R A N
HASIL RESES DAERAH PEMILIHAN KALTENG III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh;

Syalom, Om Swastiastu, Namu Budaya Salam Kebajikan Rahayu;

Tabe Selamat Lingu Nalatai, Salam Suhujud Karendem Malempang, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata,... Arus...

Yth. Saudara Gubernur Kalimantan Tengah;

Yth. Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;

Yth, Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, atau Yang Mewakili;

Yth. Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, atau Yang Mewakili;

Yth. Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, atau Yang Mewakili;

Yth. Saudara Wakil-Wakil Ketua dan Semua Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Yth. Saudara Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, atau Yang Mewakili;

Yth. Saudara Kepala Badan Narkotika Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, atau Yang Mewakili;

Yth. Saudara Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, atau Yang Mewakili;

Yth. Saudara Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Palangka Raya, atau Yang Mewakili;

Yth. Saudara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, atau Yang Mewakili;

Yth. Saudara Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, atau Yang Mewakili;

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Provinsi Kalimantan Tengah, atau Yang Mewakili;

2

- Yth. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, atau Yang Mewakili;
- Yth. Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Palangka Raya, atau Yang Mewakili;
- Yth. Saudara Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, atau Yang Mewakili;
- Yth. Asisten Sekretaris Daerah/Staf Ahli Gubernur dan Semua Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Yth. Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- Yth, Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta Undangan sekalian yang saya hormati.

Pertama-tama marilah kita mempersembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita semua saat ini masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk mengikuti Rapat Paripurna ke-....., Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan agenda "*Penyampaian Laporan Hasil Reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah III*", yang telah dilaksanakan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020.

Selanjutnya Kepada Pimpinan Rapat Paripurna kami ucapkan terima kasih, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah III meliputi, "*Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara*", untuk menyampaikan Laporan Hasil Reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, yang dilaksanakan dari tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan 7 Juni 2020, semoga apa yang kami laporkan nantinya dapat dipergunakan, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah, "*khususnya Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah III*".

Kegiatan Reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, tentunya berbeda dengan kegiatan reses ditahun-tahun sebelumnya, dimana pada saat pelaksanaan reses, di Indonesia, negara-negara di dunia, bahkan di Kalimantan Tengah, telah dilanda wabah Pandemi Covid-19, yang hingga saat ini masih belum selesai dan berakhir, sehingga dalam situasi dan kondisi tersebut, sangat membatasi aktifitas secara global, baik dipemerintahan, lembaga maupun dimasyarakat secara luas.

Dalam situasi dan kondisi seperti tersebut, pelaksanaan kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, tentunya juga harus mengacu pada SOP Protokol Kesehatan, sesuai ketentuan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, namun hal tersebut tidak mengurangi semangat bagi Anggota Dewan, untuk melaksanakan kegiatan reses, karena sudah merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab untuk mengabdikan terhadap masyarakat di Kalimantan Tengah.

Dalam Laporan Hasil Reses ini, kami susun dengan sistematika dan mekanisme sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang :

Dalam situasi dan kondisi ditengah-tengah Wabah Pandemi Covid-19, tidak terkecuali di Kalimantan Tengah, juga pentingnya pelaksanaan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka menjangkau dan menampung aspirasi masyarakat secara berkala, untuk bertemu dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta mewujudkan peran, tugas dan fungsi, khususnya pengawasan serta monitoring, juga perlunya check and balances antara DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

Adapun dasar dalam pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, antara lain adalah :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;

4. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.4.43/12/DPRD/2020 Tanggal 29 Mei 2020 tentang Tugas Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ke Daerah Pemilihan pada kabupaten/kota dan kecamatan di Kalimantan Tengah Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020;
5. Surat Edaran No.5/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran No.4 Tahun 2020, tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, yang mengatur Kebijakan Mengenai Persyaratan Wajib Dipenuhi Dalam Perjalanan Orang Yang Bekerja Pada Lembaga Pemerintah Atau Swasta.

C. Maksud dan Tujuan :

Mengingat kegiatan reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, saat itu dalam situasi dan kondisi wabah pandemi Covid-19 secara global, tidak terkecuali di Kalimantan Tengah, maka maksud dan tujuan reses diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Monitoring dan pengawasan terhadap penanganan wabah pandemi Covid-19 di Kota/Kabupaten Se-Kalimantan Tengah.
2. Menjaring dan menampung berbagai permasalahan dari Pemerintah Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, juga aspirasi dari masyarakat secara langsung.
3. Untuk menjaga dan menjalin komunikasi, bersinergi antara wakil rakyat dengan rakyat melalui konstituen.
4. Terselenggaranya proses sosialisasi kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota/Kabupaten Se-kalimantan Tengah.
5. Sosialisasi berbagai produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Sebagai wujud proses sosialisasi terhadap masyarakat serta pendewasaan nilai-nilai demokrasi yang sedang berkembang.
7. Untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan di segala bidang khususnya di daerah.
8. Untuk meningkatkan dan percepatan pembangunan dan perekonomian di daerah, khususnya dalam situasi dan kondisi wabah pandemi Covid-19.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Nama Kegiatan :

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah ; *"Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020"*, ke masing-masing Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah.

B. Organisasi Kegiatan :

Nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah III ; berjumlah 7 orang, 1 (satu) orang An. H. SARWANI telah meninggal dunia dan sudah diusulkan untuk Pergantian Antarwaktu (PAW), yang saat ini masih dalam proses di Kementerian Dalam Negeri, sehingga Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah III ada 6 orang, sebagai berikut :

1. Ir. H. Abdul Razak : Koordinator Tim (tidak reses)
2. Bryan Iskandar, SE : Ketua Tim
3. Heri Santoso, ST : Sekretaris Tim
4. H. Jubair Arifin : Anggota Tim
5. Hj. Maryani Sabran : Anggota Tim
6. Drs. H. Sugiyarto, M.A.P : Anggota Tim

C. Waktu dan Tempat :

Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, *dilaksanakan dari tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan 7 Juni 2020*, selama 8 (delapan) hari kalender, tujuan dan objek kegiatan Reses ditentukan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dari masing-masing Daerah Pemilihan diwilayah Kota/Kabupaten Se-Kalimantan Tengah.

D. Sasaran :

Sasaran dalam Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah III adalah; Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan serta masyarakat secara umum, di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Bentuk Kegiatan :

Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah III, mengingat Kegiatan Reses dalam situasi dan kondisi wabah pandemi Covid-19, adalah :

1. Dialog dan komunikasi intensif dengan pihak pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa dengan skala prioritas dan terbatas.
2. Pertemuan dengan skala kecil dan terbatas dengan pihak pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa sesuai dengan protokol kesehatan.
3. Sosialisasi program kerja, kebijakan produk-produk hukum yang dihasilkan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Menyerap dan menampung aspirasi terhadap konstituen dan masyarakat melalui pihak pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.
5. Peninjauan lapangan sesuai objek dengan skala prioritas dan terbatas.

F. Materi Kegiatan :

1. Program dan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya monitoring dan pengawasan.
3. Sosialisasi nilai-nilai demokrasi sesuai perkembangan di pusat, provinsi maupun di daerah.
4. Sosialisasi dan Diskusi terkait wabah pandemi Covid-19 di masing-masing kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.
5. Saran dan masukan terhadap pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.

G. Anggaran Pembiayaan :

1. Sumber pembiayaan kegiatan reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.
2. Pengeluaran anggaran biaya kegiatan reses dan laporan reses disampaikan secara lengkap, dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dan Laporan Hasil Reses.

BAB III

HASIL KEGIATAN RESES

Berbagai aspirasi dari hasil pertemuan secara terbatas, dialog, wawancara dan komunikasi secara aktif dengan pihak pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat secara umum, secara terbuka menyampaikan berbagai permasalahan, harapan dan usulan, untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, yang sangat menyentuh dan bermanfaat untuk masyarakat secara umum, terutama dalam situasi dan kondisi wabah pandemi Covid-19 secara global, dan kita semua belum tau sampai kapan akan selesai dan berakhir, namun tentunya kita semua selalu berdo'a dan berusaha semoga wabah pandemi Covid-19 segera selesai dan berakhir.

Adapun berbagai permasalahan dan harapan dari pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa, hasil pertemuan secara terbatas dan kunjungan lapangan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, yang dapat kami rangkum dan kami simpulkan sebagai berikut :

A. KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

1. Bidang Pemerintahan :

- Dalam situasi dan kondisi Wabah Pandemi Covid-19 saat ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat bersinergis dengan tokoh agama dan organisasi keagamaan (MUI), Muhammadiyah, NU dan lain-lain yang berkompeten dalam memberikan pemahaman keagamaan terhadap masyarakat, terkait tata cara beribadah di masa Wabah Pandemi Covid-19.
- Untuk penanganan dan penanggulangan Wabah Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga seperti halnya pada pemerintah daerah lainnya, yaitu telah mendirikan posko-posko penanganan dan pengamanan Covid-19 yang tersebar di semua kecamatan, kelurahan dan desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Sektor Perhubungan di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan adanya surat Kementerian dan Perhubungan, maka jenis transportasi udara, transportasi darat (bus dan travel) dihentikan sementara, yang beroperasi hanya untuk pengiriman barang, begitu juga transportasi laut dilarang membawa penumpang dan hanya diperuntukkan sembako dan barang, transportasi darat (travel) saat ini juga sangat terbatas, itupun perlu persyaratan khusus bagi sopir dan penumpang.

Kecamatan Kumai (Desa Sungai Kapitan) :

- Kantor Desa Sungai Kapitan berlokasi di gang kecil, sehingga menyulitkan dalam mengakses segala keperluan masyarakat, sehingga perlu pembangunan Kantor Desa Sungai Kapitan yang baru dan representatif, dengan memanfaatkan lokasi/lahan Bangunan Terminal Bongkar Muat Barang milik Pemerintah Daerah, yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi di Jalan Panglima Utar RT.08 Desa Sungai Kapitan, pihak pemerintah desa mengharapkan adanya hibah Bangunan tersebut dari pemerintah.
- Untuk mendorong pemerintah daerah dan pemerintah terkait, perlu adanya hibah lahan dari masyarakat ke pemerintah daerah untuk Pembangunan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) di Kawasan Arah Pantai RT.07 Desa Sungai Kapitan.
- Dengan adanya program PTSL dari pemerintah pusat, juga untuk mendorong pemerintah daerah dalam pengajuan kawasan zona merah (HPK) menjadi zona hijau (HPL), yang berlokasi di RT.10 s/d RT.12 Desa Sungai Kapitan.
- Perlu adanya dukungan moral dan bantuan terhadap keluarga dan warga yang terdampak Covid-19 dari pemerintah daerah, yang terjadi di wilayah Desa Sungai Kapitan, agar yang bersangkutan tetap melakukan isolasi mandiri di rumah, demi menahan laju penyebaran wabah tersebut.

Kecamatan Pangkalan Lada :

- Di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada terdapat beberapa masyarakatnya yang dinyatakan positif Covid-19, namun kegiatan sosialisasi dan penanganannya berjalan dengan baik serta tetap memakai ketentuan protokol kesehatan untuk mengantisipasi adanya penularan/penyebarannya.
- Perlu adanya Pos Lalu Lintas di Pertigaan Jalan Simpang Runtu depan SPBU Kecamatan Pangkalan Lada, hal tersebut untuk meminimalisir yang hampir setiap minggu terjadi kecelakaan, mengingat intensitas dan mobilitas kendaraan yang melewati jalan tersebut cukup ramai dan padat.
- Kondisi Kecamatan Pangkalan Lada pada saat musim kemarau selalu mengalami kekeringan, terdapat 3 sumur gali dan 2 sumur bor tetapi masih belum bisa mencukupi kebutuhan air, di areal kebun belakang perkantoran Kecamatan Pangkalan Lada terdapat sungai kecil yang bisa dijadikan embung untuk menyimpan cadangan air, untuk itu mohon dukungan dan bantuan baik dari pemerintah kabupaten/provinsi agar bisa dibangun embung dimaksud untuk menyimpan cadangan air pada musim kemarau.

Kecamatan Kotawaringin Lama :

- Kondisi Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama saat ini sudah tua dan sudah kurang layak huni, diharapkan bisa dibangun untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Pihak Pemerintah Kecamatan sudah merancang desain bangunan kantor camat yang baru, dengan kisaran dana ± 4,5 Milyar, selama ini hanya ada bantuan sebesar 1,5 Milyar dan ada tambahan 1 Milyar hanya bisa untuk membangun pondasi dan tiang saja.
- Pada Kecamatan Kotawaringin Lama, jumlah ASN sebanyak 53 orang, namun dimasa wabah pandemi Covid-19 saat ini, untuk bekerja di kerja kantor jam kerja dibagi menjadi 2 sip, hal tersebut selain karena ruang kantor yang sangat sempit dan untuk jaga jarak dari kerumunan ASN serta masyarakat, juga mengikuti anjuran pemerintah dalam menekan dan mengantisipasi penyebaran wabah pandemi Covid-19.
- Dalam penanganan wabah pandemi Covid-19, pihak kecamatan terus melakukan koordinasi dengan pihak kabupaten, terkait penanganan pasien positif Covid-19 yang berasal dari Desa Rungun sudah ditangani dengan baik, begitu juga dalam penyaluran bantuan sosial baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten.
- Di setiap desa juga telah dibangun posko-posko untuk mengantisipasi penyebaran wabah pandemi Covid-19, namun secara umum masyarakat belum begitu menyadari bahayanya Covid-19, dimana saat situasi dan kondisi mulai reda, masyarakat yang beraktifitas masih banyak yang tidak memakai masker.
- Masih banyak data dari provinsi terhadap masyarakat yang menerima bantuan sosial belum sesuai dengan SOP, dimana saat itu pihak kecamatan masih memverifikasi dan memperbaiki data tersebut, sehingga pendistribusian bantuan sosial sementara depending untuk menghindari permasalahan di masyarakat.

Kecamatan Kumai (Kelurahan Candi) :

Penanganan penyebaran wabah pandemi Covid-19 di Kelurahan Candi sangat baik, karena adanya posko relawan yang proaktif dan sangat membantu dalam penanganan wabah pandemi Covid-19, sehingga kegiatan relawan tersebut sangat perlu menjadi percontohan yang baik bagi daerah-daerah lainnya.

10

Kecamatan Kumai (Kelurahan Kumai Hulu) :

- Kantor Kelurahan Kumai Hulu letaknya kurang strategis, berada di tengah permukiman yang padat dan di dataran rendah, sehingga saat curah hujan tinggi kantor terendam banjir, maka perlu segera relokasi. Rencana Pembangunan Kantor Kelurahan Kumai Hulu yang baru, di tanah Pemerintah Daerah yang terletak di samping Pasar Tanjung Putting, dengan lebar 19 Meter dan panjang 50 meter.
- Penanganan penyebaran wabah pandemi Covid-19 di Kelurahan Kumai Hulu, di bantu oleh relawan dengan swadaya dari masyarakat sekitar, karena pihak kelurahan tidak mempunyai dana desa, dimana dana desa sudah di alokasikan untuk penangan wabah pandemi Covid-19, yang telah menjadi keputusan kementerian terkait.
- Walaupun masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Kumai Hulu, hingga saat itu tidak ada yang dinyatakan positif dari wabah pandemi Covid-19, namun sekitar 50% masyarakat di Kelurahan Kumai Hulu terdampak akibat wabah pandemi Covid-19, termasuk tempat pariwisata, sopir taksi, pedagang, petani dan peternak.
- Diharapkan adanya bantuan pembangunan pos pengamanan di tengah kota yang tidak jauh dari Polsek, yaitu di lahan yang sudah tersedia di dekat Pasar Tanjung Putting, mengingat Kelurahan Kumai Hulu berpenduduk sangat padat dan menjadi akses keluar masuk kapal di pelabuhan.

2. Bidang Kesejahteraan Rakyat :

- Dimasa Wabah Pandemi Covid-19 saat ini, Rumah Sakit yang menjadi rujukan untuk penanganan pasien penderita Covid-19 masih banyak kekurangan tenaga medis. Selain faktor lambatnya surat edaran dari kementerian terkait untuk disosialisasikan kepada masyarakat, dalam hal lain juga yang menjadi penyebab adalah honor dan insentif lambat/belum diterima oleh tenaga-tenaga medis/tenaga kesehatan.
- Yang menjadi kendala utama untuk menarik minat tenaga medis dan untuk mendaftarkan dirinya dalam penanganan Covid-19 adalah honor dan insentif yang memadai, karena kapasitas tenaga medis yang memadai juga, merupakan salah satu bentuk antisipasi percepatan penangan pasien Covid-19, apabila hal tersebut tidak diperhatikan dikhawatirkan pasien Covid-19 semakin meningkat.

- Dalam penanganan Covid-19, fasilitas perluasan ruang LPTQ dan Rumah Sakit Muhammadiyah yang disediakan Pemerintah Daerah, masih bermasalah dengan kekurangan arus listrik dan jaringan wifi, karena para tenaga medis juga harus selalu mengikuti update data dan perkembangan yang selalu terjadi dimasa pandemi Covid-19.
- Karena tidak adanya alat PCR di Rumah Sakit Imanudin Kabupaten Kotawaringin Barat, maka durasi yang sangat lama dalam pengiriman sample dan hasil dari Swap ODP dan PDP, menjadi kendala untuk men-tracking masyarakat yang berinteraksi dengan pasien penderita Covid-19, juga sangat berisiko adanya kesempatan penyebaran yang lebih masif.

Kecamatan Pangkalan Lada :

- Dalam pendistribusian bantuan sosial dari pemerintah masih terjadi polemik kecil di masyarakat, namun tidak berpengaruh secara signifikan dan hal ini akan menjadi bahan evaluasi selanjutnya.
- Perlu adanya rehap tempat ibadah melalui dana hibah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :
 1. Masjid Al-Mu'minin, Masjid Attaqwa, Masjid Baiturrahman, di Desa Lada Mandala Jaya.
 2. Mushola Nurul Iman, Mushola Al-Koiriyah, Mushola Al- Iklas, Mushola Miftahul Jannah, Mushola Al-Muhajirin, Mushola Al-Azhar, Mushola Nurul Hidayah, Mushola Al- Amin, di Desa Lada Mandala Jaya.
 3. Mushola At-Taqwa, Mushola Al-Barokah, Mushola Nurul Islah, di Desa Pandu Senjaya
 4. Masjid Darus Salam dan Mushola Babut Taqwa Al-Muhajirin, di Desa Makarti Jaya.
- Perlu pembangunan pagar SAM-1 Pangkalan Lada untuk pengamanan dan kedisiplinan, terutama untuk menghindari Siswa-Siswi bolos pada jam sekolah, dikarenakan kondisi lingkungan sekolah saat ini belum ada pagar. Areal pada SMA-1 Pangkalan Lada seluas 45.920 M², fasilitas ruangan 19 kelas, 580 Siswa, selain pagar di halaman Sekolah SMA-1 Pangkalan Lada Juga memerlukan pembangunan paving untuk meningkatkan kenyamanan di lingkungan sekolah.

- Mohon dukungan dari pemerintah kabupaten dan provinsi agar mendapatkan alokasi anggaran dalam pengembangan pembangunan fasilitas pendidikan, yaitu peningkatan status madrasah swasta dengan strata pendidikan Tsanawiyah dan SMA dari swasta menjadi negeri di Pangkalan Dewa, dikarenakan murid sudah ada dan semakin meningkat serta lahan sudah memadai.

Kecamatan Kotawaringin Lama :

Mohon bantuan dana untuk perbaikan Rumah Ibadah (Masjid Al-Hikmah di Despot) dan (Masjid Al-Mutaqin Desa Riam Durian), yang saat ini kondisinya sudah mulai rusak.

Kecamatan Kumai (Kelurahan Candi) :

- Bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah diterima dan terdata dengan baik, namun pada saat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Tim Dapil III Reses), bantuan tersebut belum didistribusikan ke masyarakat.
- Usulan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk pembangunan pengelolaan pemilahan sampah di Jalan AMPI RT.08 Kelurahan Candi, karena lahan sudah tersedia seluas 5 Hektar, hal ini sudah disarankan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Tim Dapil III) saat Reses, kepada Pihak Kelurahan agar membuat profosal secara lengkap.
- Masyarakat mengharapkan adanya Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan skala prioritas (bantuan untuk pertanian dan ternak sapi), guna pemberdayaan para petani dan peternak, karena notabene masyarakat Kelurahan Candi profesinya adalah petani dan peternak.

Kecamatan Kumai (Kelurahan Kumai Hulu) :

Dengan adanya wabah Covid-19, mobilitas di Pelabuhan Kumai harus diatur secara ketat terhadap para penumpang dengan mewajibkan para penumpang membawa surat keterangan bebas Covid-19, serta menjadikan ruang tunggu penumpang di pelabuhan menjadi ruang/tempat penginapan khusus para penumpang yang baru datang maupun akan pergi, agar diadakan pemeriksaan secara ketat, sehingga tidak meresahkan warga sekitar.

3. Bidang Perekonomian :

- Pada Sektor UMKM, sebagai pelaku usaha juga pariwisata sangat terdampak dengan adanya wabah pandemi Covid-19, sehingga harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah untuk pemberdayaan di sektor UMKM dan Pariwisata.
- Sektor ketahanan pangan, pada Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat tidak bermasalah, dan dalam kategori cukup untuk 6 bulan kedepan, namun juga terdampak bagi petani dan pedagang dikarenakan daya beli masyarakat yang sangat menurun akibat pandemi Covid-19.
- Begitu juga di sektor wisata sementara di tutup, untuk menghindari para pengunjung yang melakukan wisata, karena melibatkan orang banyak/berkerumun, sebagai antisipasi penyebaran wabah pandemi Covid-19.

Kecamatan Pangkalan Lada :

- Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya dorongan program pemerintah daerah, khususnya dalam pengembangan Sektor Pertanian Jenis Tanaman SORGUM, jenis tanaman tersebut cukup produktif untuk peningkatan pendapatan para petani, selain itu jenis tanaman sorgum juga bisa dijadikan bahan dasar olahan makanan, karena kandungan karbohidrat yang tinggi dan kandungan gula yang rendah.
- Masyarakat mengharapkan adanya Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan skala prioritas, yaitu bantuan pertanian, ternak sapi dan ternak ikan lele bioflok, guna meningkatkan perekonomian serta pemberdayaan para petani dan peternak, karena mayoritas masyarakat Kecamatan Pangkalan Lada profesinya sebagai petani dan peternak.

4. Bidang Fisik dan Prasarana.

- Masyarakat wilayah Kotawaringin Barat dan Sukamara mengusulkan pengaspalan Jalan Lintas dari Kotawaringin Barat-Lamandau-Sukamara, antara Kecamatan Balai Riam-Despot Riam Durian Jalan Rusak Berat.
- Usulan pembangunan jalan arah Kotawaringin-Sukamara ke Desa Sukamakmur, Ipuh, Bangun Jaya wilayah Kecamatan Kotawaringin Lama sepanjang ± 20 Km yang kondisinya saat ini jalan tanah dan spot-spot aspal.

Kecamatan Kumai (Desa Sungai Kapitan) :

Perlu dukungan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Pembangunan Masjid Syarif Utsman di lingkungan Pondok Pesantren Yayasan Al-Miftah Cabang Kotawaringin Barat, Jalan Pasir Putih RT. 10 Desa Sungai Kapitan, sebagai bentuk upaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan para santri-santri. Adapun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Masjid Syarif Utsman sebesar ± Rp.4 Milyar, karena pembangunan masjid tersebut tidak mungkin selesai dengan biaya dari swadaya masyarakat setempat.

Kecamatan Pangkalan Lada :

- Mohon bantuan untuk kelanjutan pekerjaan-pekerjaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang belum terselesaikan, salah satunya peningkatan Jalan Jalak dan sekitarnya, serta kelanjutan pembangunan Jalan Usaha Tani yang masih belum selesai di Desa Lada Mandala yang merupakan Jalan Provinsi.
- Untuk menunjang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat dan membantu mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kotawaringin Barat di sektor wisata, Kecamatan Pangkalan Lada mempunyai 2 tempat wisata unggulan, yaitu Agro Wisata Tani Subur di Desa Pangkalan Tiga dan Patakan Ecopak di Desa Lada Mandala Jaya, untuk membantu percepatan pembangunan di sektor wisata ini juga perlu perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kecamatan Kotawaringin Lama :

- Infrastruktur jalan di Kecamatan Kotawaringin Lama semakin membaik dengan adanya jembatan, hal ini juga berdampak bagi perkembangan ekonomi masyarakat, baik masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau juga Kalimantan Barat.
- Dengan difungsikannya jembatan baru juga dimanfaatkan oleh pengguna jalan yang tidak mengikuti instruksi gubernur, bahwa jalan dan jembatan hanya bisa dilewati kendaraan dengan tonase tidak lebih dari 8 ton, untukantisipasi terjadinya kerusakan pada jalan dan jembatan.
- Jembatan baru dari Kotawaringin Barat menuju Kotawaringin Lama dan Sukamara tersebut, perlu Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), mengingat semakin padatnya mobilitas yang melintasi jembatan.

15

- Usulan pembangunan dan peningkatan Jalan Ampoi (Jalan Provinsi) di Kelurahan Kotawaringin Hulu RT.05 sepanjang 2,5 KM, yang saat ini dalam keadaan rusak.
- Usulan Pembangunan Bundaran berdiameter 8 di Desa Riam Durian, yang saat ini rusak akibat padatnya mobilitas, bundaran tersebut menjadi pertemuan arah lintas ke tiga kabupaten (Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau).
- Usulan pembangunan/pemasangan jaringan PLN sepanjang 6-7 KM di Desa Lalang yang sampai saat ini masih belum ada sama sekali ketersediaan jaringan arus listrik.
- Usulan penambahan jaringan PLN di Desa Babual (Desa Baboti) sepanjang 3,5 KM, karena semakin meningkatnya perkembangan dan penduduk.

Kecamatan Kumai (Kelurahan Candi) :

- Mohon perbaikan jalan dari masjid ke arah Jalan Bagung yang sudah rusak parah, perbaikan jalan pertigaan ke arah SMA-N Kumai, Kelurahan Kumai Hilir dan jalan lingkungan masjid Kelurahan Candi yang saat ini keadaan jalan bergelombang dan sering terjadi kecelakaan.
- Mohon perbaikan jalan dari Polsek Kumai ke arah Bundaran Pangkalan Lima, karena saat ini kerusakan jalan tersebut sangat parah.

Kecamatan Kumai (Kelurahan Kumai Hulu) :

Usulan perbaikan Jalan Poros Tempenek menuju Sungai Kakap sepanjang 2 KM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan juga adanya nilai history bagi warga transmigrasi didaerah tersebut.

B. KABUPATEN LAMANDAU.

1. Bidang Pemerintahan :

- Pemerintah Kabupaten Lamandau berharap proyek-proyek Multy Year tetap ada walaupun dipotong tetapi jangan dihapus, karena pembangunan infrastruktur jalan sangat diperlukan oleh masyarakat, hal ini juga terkait dengan janji Gubernur Kalimantan Tengah saat Kunjungan Kerja ke Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau.

- Proyek-proyek bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah di Wilayah Kabupaten Lamandau diharapkan tetap berjalan, silakan kena refocusing dikurangi tetapi mohon tidak dihapus.
- Proyek-proyek APBD-1 yang telah dilaksanakan tahun-tahun lalu, khususnya bantuan Rumah Ibadah mohon tetap dilanjutkan penyelesaiannya pada tahun yang akan datang, karena masih banyak Rumah Ibadah yang telah dibantu pada tahun sebelumnya untuk pembangunan dan hingga saat ini masih belum selesai, sehingga perlu bantuan untuk kelanjutan penyelesaian pembangunan tersebut.

2. Bidang Kesejahteraan Rakyat :

- Untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak menerima di masa wabah pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Lamandau telah menyalurkan bantuan tersebut berupa sembako ada 2 tahap dan juga mengadakan pasar murah sembako untuk keperluan masyarakat.
- Untuk bantuan sosial tunai dari provinsi agar bisa ditambah bulannya, karena dari pusat ada bantuan yang diterima 12 kali, ada yang 6 kali dan ada yang 3 kali, sehingga apabila bantuan dari provinsi hanya ada 1 kali akan menjadi kecemburuan sosial, hal ini perlu menjadi perhatian dan pertimbangan selanjutnya dari pemerintah provinsi.

Kecamatan Sematu Jaya (Desa Purwareja dan Desa Wonorejo) :

- Mohon bantuan untuk hibah kegiatan keagamaan yang ada di Desa Wonorejo, mengingat banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh yayasan bidang keagamaan di Desa tersebut.
- Usulan dari Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya, bahwa pada Tahun 2019 ada Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan memperoleh Juara 1, yang hadiahnya waktu itu diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada Upacara Kenegaraan 17 Agustus 2019, sebesar Rp.440.000.000,- yang Rp.40.000.000,- sudah ditransfer/diterima ke Kas Desa Wonorejo, sedangkan hadiah program dan kegiatan sebesar Rp.400.000.000 belum dikucurkan, mohon segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) Provinsi Kalimantan Tengah, karena ini sudah diumumkan kepada masyarakat, jangan sampai ada asumsi hadiah menjadi hutang, karena Pemerintah Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya sudah membuat perencanaan pembangunan desa yang akan menggunakan dana tersebut.

- Dengan adanya musibah Pandemi Covid-19, yang kita semua belum tau kapan akan selesai dan berakhir, Pemerintah Kabupaten Lamandau telah menyediakan anggaran sebesar 83 Milyar, diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga tetap memberikan bantuan untuk penanganan selanjutnya terlebih untuk yang prioritas (peralatan kesehatan).
- Tentang Penanganan Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Lamandau menyediakan Tempat Karantina di Mes Desa, yang berkapasitas ± 100-150 orang dan sampai saat ini telah dimanfaatkan untuk isolasi bagi warga masyarakat hasil traking maupun yang terindikasi reaktif.

3. Bidang Fisik dan Prasarana :

Kecamatan Bulik (Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Bumi Agung) :

- Camat Bulik mengusulkan untuk pembangunan jalan lingkungan Kelurahan Nanga Bulik dan jalan lingkungan di pedesaan serta saluran drainase yang ada dipinggir jalan lingkungan Kecamatan Bulik.
- Lurah Bulik mengusulkan perbaikan dan peningkatan jalan lingkungan di Kelurahan Bulik, yaitu Jalan Seroja, Jalan Melati I dan IV, Jalan Anggrek, Jalan Teratai, Jalan Mawar dan Jalan Kamboja.
- Kepala Desa Bumi Agung mengusulkan adanya pembangunan dan peningkatan jalan di lingkungan RT.1, RT.IV, RT.6. RT.8 dan RT.10.
- Juga mengusulkan lanjutan pembagunan Masjid dan Rumah Ibadah di wilayah Kecamatan Bulik, yang sudah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat segera dimanfaatkan fasilitas tersebut oleh masyarakat.

Kecamatan Sematu Jaya (Desa Purwareja dan Desa Wonorejo) :

- Camat Sematu Jaya mengusulkan agar Rumah Ibadah Masjid wilayah Kecamatan Sematu Jaya, di Desa Purwareja dan Desa Tritunggal yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi pada tahun sebelumnya agar dapat dilanjutkan pembangunannya dimasa-masa yang akan datang.
- Usulan pembangunan jalan lingkungan diwilayah Kecamatan Sematu Jaya, mohon dapat dipenuhi mengingat Kecamatan Sematu Jaya merupakan pintu gerbang masuk Kota Nanga Bulik Kabupaten Lamandau.

- Kepala Desa Purwareja memohon agar pembangunan jalan dilingkungan sekitar lapangan desa, yang telah dianggarkan pada Tahun 2020 dapat segera dimulai pelaksanaannya.
- Kepala Desa Purwareja mengusulkan Pembangunan Embung Desa yang letaknya di bukit berbatasan dengan wilayah Bumi Perkemahan (BUPER) Desa Bina Bhakti, Embung Desa tersebut agar dapat dipergunakan di tahun-tahun yang akan datang, mengingat pada musim kemarau Desa Purworejo kesulitan air minum.

C. KABUPATEN SUKAMARA.

1. Bidang Pemerintahan :

- Pemerintah Kabupaten Sukamara berharap sesuai DPA Tahun 2020, ada proyek lanjutan pembangunan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Sukamara-Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, hal tersebut merupakan kesepakatan antara Bupati Sukamara dengan Bupati Ketapang dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, bahwa pada Tahun 2020 kedua Provinsi dan Kabupaten akan bekerjasama, untuk membangun infrastruktur jembatan dan jalan tersebut, sehingga diharapkan jembatan dan jalan tersebut dapat difungsikan pada Tahun 2020-2021.
- Bupati Sukamara juga berharap, bahwa anggaran yang sudah ada di DPA Tahun Anggaran 2020 yang terkena refocusing, diharapkan tetap ada dan tidak dihilangkan/dihapus, sehingga pembangunan tetap berjalan.

2. Bidang Kesejahteraan Rakyat :

- Bantuan Sosial Tunai (BLT) Provinsi Kalimantan Tengah untuk Kabupaten Sukamara mohon untuk segera ditindaklanjuti, karena bantuan-bantuan dari pusat dan kabupaten sudah didistribusikan, agar tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial, dengan harapan bukan hanya 1 kali, karena bantuan dari pusat ada yang 6 kali dan ada yang 12 bulan, sehingga apabila bantuan dari provinsi hanya dapat 1 bulan akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
- Diwilayah Kabupaten Sukamara ada sekitar 600 KK masyarakat yang belum terkafer/terdata dalam bantuan sosial, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukamara telah mendata dan mengusulkan agar sesuai data tersebut masuk dan dapat bantuan sosial dari Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bantuan sosial ekonomi diharapkan tetap berlanjut seperti Bantuan Tunai Langsung (BLT) hingga wabah pandemi Covid-19 selesai/berakhir.
- Untuk bantuan sosial yang jumlahnya cukup banyak, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pusat, PKH yang diterima setiap bulan dalam 1 tahun, bantuan pangan Non Tunai (Sembako) setiap bulan selama 1 tahun. BLT DD yang diberikan 3 kali, begitu juga Bantuan Sosial Langsung Tunai dari pusat melalui Kementerian Sosial juga sudah dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima melalui Kantor Pos.
- Anggaran untuk Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sukamara disediakan sebesar 67 Milyar, yaitu 58 Milyar ditambah 9 Milyar dana DID dan Penanganan yang telah dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Sukamara cukup luar biasa dan sangat sesuai dengan protokoler dan SOP kesehatan perlu mendapatkan apresiasi, karena semua masyarakat yang datang dari luar harus di screning secara ketat, termasuk Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah saat datang reses juga discrening dan dicek dengan ketat, masyarakat yang keluar daerah dari zona merah dan masuk kembali harus di isolasi, penanganan seperti ini berdampak baik sekali dan sangat perlu dicontoh oleh daerah-daerah lain, sehingga saat ini di Kabupaten Sukamara hanya 2 orang yang positif Covid-19 itupun klaster dari daerah lain.
- Penanganan Covid-19 pada Pemerintah Kabupaten Sukamara sangat bagus, dimana setiap desa melakukan gotong royong untuk mendirikan/membuat posko-posko secara mandiri dengan anggaran gotong royong masyarakat desa, hal ini sangat berdampak positif terhadap masyarakat yang keluar dan masuk desa.

3. Bidang Perekonomian :

Bantuan ekonomi berupa UMKM pada masyarakat pelaku usaha agar tetap berlanjut dan tetap produktif, karena UMKM saat ini merupakan tulang punggung perekonomian bagi masyarakat, sehingga pelaku usaha termasuk UMKM selalu produktif dan berkembang dan bisa membantu melayani kepada masyarakat yang lain.

4. Bidang Fisik dan Prasarana :

- Usulan Jalan Provinsi yang menghubungkan Lamandau lewat wilayah Sukamara - Kotawaringin Barat - Sukamara yang saat ini ada kerusakan dan sangat mengganggu lalu lintas, jalan dari Balai Riam sampai ke Riam Durian kondisi jalan rusak cukup parah, mohon bantuan agar bisa dimasukkan dalam program pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020/2021, karena saat ini untuk perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh hanya perlu waktu 25 Menit menjadi 1 jam.
- Mohon dapat dibantu pembangunan jalan Sukamara menuju ke Kecamatan Jelai dari Anggaran APBD I (Provinsi) yang kondisinya saat ini jalan tanah ± 20,88 Km, mengingat jalan tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, di Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah III yang meliputi; Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, walaupun dalam pelaksanaan di lapangan secara teknis dan administrasi masih terdapat beberapa hambatan, karena situasi dan kondisi di daerah tujuan, juga karena pelaksanaan reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 saat ini masa Pandemi Covid-19 secara global, sehingga pelaksanaan dan aktifitas di lapangan sangat terbatas dan harus mengacu pada protokol kesehatan dimasing-masing daerah tujuan.

B. Masukan dan Saran

1. Untuk pemerataan pembangunan, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perekonomian, listrik, untuk meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, sumber daya manusia, agar mendapat perhatian dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, terutama dimasa wabah Pandemi Covid-19 secara global, masyarakat sangat memerlukan bantuan dari pemerintah.

2. Aspirasi masyarakat perlu tanggapan yang serius, agar ada kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten maupun Aparatur Sipil Negara, agar hasil reses ke Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, hingga kedesa-desa dapat terealisasi dengan baik dengan skala prioritas.
3. Berbagai hal sebagaimana tersebut di atas, perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, guna pemerataan pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah dan pedesaan terpencil, yang hingga saat ini masih ada yang belum terjangkau dari sarana, prasarana dan fasilitas lainnya.
4. Di saat masa wabah Pandemi Covid-19 secara global, tidak terkecuali di Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota masih mengharapkan adanya dana untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan perekonomian secara menyeluruh, terutama di daerah, walaupun kita semua tau bahwa anggaran untuk Tahun 2020 secara global sebagian untuk penanganan wabah Pandemi Covid-19.
5. Perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan dalam hal pendataan terhadap masyarakat yang berhak untuk menerima penyaluran bantuan sosial, dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi terkait data-data masyarakat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tumpang tindih data dan dapat mengantisipasi terjadinya permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial, terutama di daerah-daerah.
6. Saran dan masukan kepada pemerintah pusat maupun provinsi, bahwa untuk bantuan sosial bermacam2 bentuk dan jenisnya, pihak pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa secara teknis masih merasa bingung untuk mendata dan mendistribusikan kepada masyarakat, karena dalam petunjuk teknis ada yang tidak boleh dabling dalam menerima bantuan sosial, begitu juga masyarakat yang menerima bantuan ada yang mengeluh, mengapa bentuk dan jenis bantuan tidak diprogramkan menjadi 1 atau dua jenis saja (BLT dan Sembako), sehingga jelas bentuk dan jenis serta besaran yang diterima oleh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan hasil reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, yang dilaksanakan dari tanggal 31 Mei s/d 7 Juni 2020, dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah III, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara.

Semoga laporan ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk ditindaklanjuti dalam kerangka mempercepat proses pembangunan di berbagai aspek, khususnya di Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah III, sebagai upaya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terimakasih.

Palangka Raya, Juni 2020

DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ANGGOTA TIM DAPIL KALTENG III

1. Ir. H. Abdul Razak. (tidak reses).
2. Bryan Iskandar, SE.
3. Heri Santoso, ST.
4. Drs. H. Sugiyarto, M.A.P.
5. H. Jubair Arifin.
6. Hj. Maryani Sabran.

KETUA TIM,



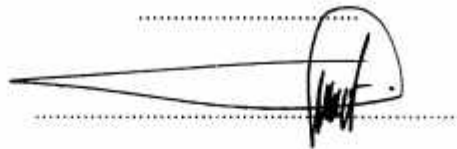
BRYAN ISKANDAR, SE

SEKRETARIS TIM,

.....

HERI SANTOSO, ST

JURU BICARA TIM DAPIL III,



LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN RESES



MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TENGAH IV

MELIPUTI WILAYAH :

KABUPATEN BARITO SELATAN, KABUPATEN BARITO UTARA
DAN KABUPATEN MURUNG RAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, Juni 2020

LAPORAN

PELAKSANAAN TUGAS RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAERAH PEMILIHAN KALTENG IV, MELIPUTI KABUPATEN : BARITO SELATAN, BARITO UTARA DAN KABUPATEN MURUNG RAYA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera dan Selamat Siang bagi kita sekalian
Tabe Selamat Lingu Nalatai, Salam Sujud Karendem Malempang, Adil Ka'Talino, Bacuramin Ka'Saruga,
Basengat Ke'Jubata. Arussss.*

- YTH. SAUDARA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH ;
- YTH. SAUDARA WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH ;
- YTH. SAUDARA KETUA/WAKIL – WAKIL KETUA DAN SEMUA ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ;
- YTH. SAUDARA UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ATAU YANG MEWAKILI ;
- YTH. SAUDARA KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA ATAU YANG MEWAKILI ;
- YTH. SAUDARA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ;
- YTH. SAUDARA KEPALA BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI PALANGKA RAYA, ATAU YANG MEWAKILI ;
- YTH. SAUDARA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI PALANGKA RAYA ATAU YANG MEWAKILI ;
- YTH. ASISTEN SEKRETARIS DAERAH/STAF AHLI GUBERNUR DAN SEMUA KEPALA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ;
- YTH. KELOMPOK PAKAR DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ;
- YTH. WARTAWAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA UNDANGAN SEKALIAN YANG SAYA MULIAKAN.

Sebagai insan yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita untuk senantiasa mempersembahkan puji dan syukur ke hadiratNya karena atas segala berkat dan rahmatNya sehingga kita semua sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan tugas pada bidang masing-masing.

Kepada Pimpinan Rapat Paripurna kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami Tim Reses dari Daerah Pemilihan Kalteng IV untuk menyampaikan Laporan Hasil Reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada masa Reses I Tahun Sidang 2020.

Dasar pelaksanaan Reses I Tahun Sidang 2020 ini berdasarkan pada : 188.4.43/12/DPRD/2020, tanggal 29 April 2020 tentang Tugas Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ; Surat Perintah Tugas Nomor : 89/SPT/DPRD/2020, tanggal 29 Mei 2020. dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/89/DPRD/2020, tanggal 29 Mei 2020.

Adapun maksud dibuat dan disusunnya Laporan Reses ini adalah untuk diketahui, dievaluasi, dikaji dan ditindak lanjuti baik oleh Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah maupun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas terkait, yang menjadi temuan dan dipandang sangat perlu untuk ditindaklanjuti, karena ini diyakini adalah juga motivasi besar dari pengabdian sebagai jawaban dari kepercayaan masyarakat, diharapkan dengan informasi Reses ini dapat dicarikan solusi dan penanganan permasalahan yang sedang dihadapi khususnya penanganan bagi pasien yang sedang menjalani perawatan/karantina dan juga percepatan penanganan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat Pandemi Covid-19.

Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Dapil Kalteng IV terdiri dari :

1. H. Jimmy Carter : Koordinator Tim
2. Ina Prayawati, S.E : Ketua Tim
3. Sirajul Rahman, S. Hut., M. Kom : Sekretaris Tim
4. H. Achmad Rasyid : Anggota Tim
5. Henry Midel Yoseph, S.E.,M.H : Anggota Tim
6. H. Purman Jaya, S. Sos : Anggota Tim
7. Hj. Sri Neni Trianawati, S.E : Anggota Tim
8. Siswandi : Anggota Tim
9. Ir. Yulilis : Anggota Tim

Pendamping Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Dapil Kalteng IV di dampingi oleh ASN Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan wilayah yang menjadi tujuan Kunjungan Reses Tim Daerah Pemilihan Kalteng IV yaitu :

1. Kabupaten Barito Selatan
2. Kabupaten Barito Utara
3. Kabupaten Murung Raya

Adapun yang menjadi Topik/Obyek dari Kunjungan Tim Reses Daerah Pemilihan Kalteng IV ini antara lain :

- Monitoring dan Evaluasi terkait pembangunan Infrastruktur serta yang lainnya dari dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah khususnya untuk Daerah DAS Barito.
- Untuk mengetahui sampai sejauh mana Realisasi Penyaluran Bantuan yang telah dikucurkan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi juga untuk mengetahui Akumulasi Data orang-orang yang terpapar Covid-19 serta bagaimana Sistem Percepatan Penanganan Siaga Darurat Bencana Pandemi COVID-19 yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pertemuan dan peninjauan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten dan Dinas terkait di Kabupaten :

Barito Selatan, Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya, diperoleh berbagai informasi, bahkan usul dan saran yang dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. KABUPATEN BARITO SELATAN

Dari hasil pertemuan yang dilaksanakan di Sekretariat Bersama Kabupaten Barito Selatan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 diperoleh beberapa informasi antara lain : Untuk Kasus Positif berjumlah 15 orang, Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 7 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 2 orang, sedangkan Operasi Percepatan Penanganan Covid-19 yang telah dilakukan antara lain :

a. Pencegahan

Kegiatan Operasi Percepatan Penanganan Covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten antara lain, selain dengan menggunakan Baliho/foster yang berisi Himbauan/anjuran untuk selalu menjaga Kebersihan, menjaga jarak, menggunakan Masker bila keluar rumah serta rajin mencuci tangan juga Operasi Pelaksanaan Kegiatan Lapangan berupa penempatan Posko Gugus Tugas di titik-titik pintu keluar masuk Kabupaten untuk dilakukan Skrining bagi masyarakat yang akan keluar ataupun yang memasuki wilayah kota Buntok, Patroli Rutin yang dilakukan oleh TNI/Polri dan Satpol PP, Penyemprotan Desinfektan di tempat-tempat umum dan jalan-jalan protokol,

Pembagian Masker serta siaran dengan menggunakan Mobil Siaran Keliling yang menghimbau/menganjurkan masyarakat untuk selalu tetap melaksanakan Pola Hidup Sehat untuk mengantisipasi penyebaran Virus.

b. Pemulihan

Bagi Pasien yang telah ditetapkan ODP ataupun PDP akan ada Petugas atau Tim Surveilans dari Dinas Kesehatan/petugas Puskesmas di wilayahnya masing-masing yang selama 14 hari akan selalu memantau kegiatan pasien yang terduga ODP/PDP, namun jika setelah 14 hari tersebut pasien sudah tidak ada keluhan maka akan diberikan surat keterangan sehat, sedangkan untuk pasien yang terkonfirmasi Positif akan dilakukan Karantina.

c. Bantuan Sosial Pemerintah

1. Rekapitulasi Bantuan Sosial Program Sembako Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	KPM Program Sembako			Keterangan
		Reguler	Penambahan/ Perluasan	Jumlah	
1	2	3	4	5=3+4	6
1	DUSUN HILIR	558	177	735	
2	DUSUN SELATAN	700	427	1.127	
3	DUSUN UTARA	482	169	651	
4	GUNUNG BINTANG AWAL	460	282	742	
5	JENAMAS	141	96	237	
6	KARAU KUALA	543	247	790	
JUMLAH		2.884	1.398	4.282	

2. Rekapitulasi Bantuan Sosial Tunai
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Penyaluran Melalui				Keterangan
		Kantor Pos	BRI	BNI	Jumlah	
1	2	3	4	5	6=3+4+5	6
1	DUSUN HILIR	246	1	2	249	
2	DUSUN SELATAN	1.541	38	20	1.559	
3	DUSUN UTARA	292	11	18	321	
4	GUNUNG BINTANG AWAI	323	30	16	369	
5	JENAMAS	757	2	2	761	
6	KARAU KUALA	358	19	6	383	
JUMLAH		3.517	101	64	3.882	

3. Untuk Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah Terealisasi sebesar 95,09 %, dengan rincian :

Dari jumlah Penerima sebanyak 1.278 KK telah tersalurkan sebanyak 1.226 KK, dari yang diusulkan lebih dari 6.000 KK

Jumlah Penerima 1.278 KK x Rp. 500.000 = Rp. 639.000.000,-

Realisasi 1.226 KK x Rp. 500.000 = Rp. 613.000.000,-

Posisi/Sisa Dana Rp. 26.000,000,- karena 52 KK masih belum mengambil.

2. KABUPATEN BARITO UTARA

Dalam Pertemuan yang dilaksanakan diperoleh beberapa informasi antara lain sebagai berikut :

Untuk Jumlah Kasus Positif sebanyak 4 orang

Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 48 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 18 orang, Sembuh 3 orang dan Dalam Perawatan 1 Orang.

Sedangkan kegiatan Operasi Percepatan Penanganan Covid-19 yang telah dilakukan antara lain :

1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

a. Pengamanan

- Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Covid-19 di Kabupaten Barito Utara telah melibatkan Polres Barito Utara, Kejaksaan Negeri Barito Utara, Kodim 1013/Muara Teweh, BINDA, Satpol PP dalam pelaksanaan Pengamanan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- Patroli Rutin yang dilakukan oleh TNI/Polri dan Satpol PP di Wilayah Kota Muara Teweh.

b. Penegakan Hukum

- Dalam Pelaksanaan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kabupaten Barito Utara telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan amanat Kapolri
- Bagi masyarakat yang terduga OTG,ODP dan PDP tidak mematuhi anjuran pemerintah untuk melakukan isolasi

mandiri akan dilakukan/diberikan sanksi sampai dengan penegakan hukum.

2. OPERASI PENCEGAHAN

I. Mitigasi

- a. Kegiatan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas Umum dan fasilitas Kesehatan antara lain : Tempat ibadah, ATM, Pasar Mini Market, RSUD Muara Teweh, Puskesmas Muara Teweh dan Puskesmas Lanjas serta tempat Pelayanan Publik lainnya.
- b. Kegiatan Disinfektan disepertaran Jalan Protokol dan tempat-tempat Umum.

II. Sosialisasi

- a. Membuat Baliho, foster dn sudah dibagikan ke semua fasilitas kesehatan serta warga masyarakat di wilayah Kabupaten barito Utara.
- b. Siaran Keliling setiap hari melalui Megaphone oleh bidang Kesehatan Masyarakat seksi Promosi Kesehatan.
- c. Surat Himbauan Kepala Dinas Kesehatan Barito Utara Perihal : Kewaspadaan dan antisipasi Penyebaran Penyakit Pneumonia berat dan Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja.
- d. Menghimbau masyarakat sesuai rekomendasi WHO untuk selalu menggunakan Masker bila keluar rumah baik yang sakit maupun yang sehat.
- e. Ketua RT/RW membuat himbauan tertulis maupun lisan kepada masyarakat di wilayah RT/RW masing-masing.

III. Deteksi.

- a. Skrining Covid-19 Pelaku Perjalanan (PP) di Pos Komando Induk dan Posko Kecamatan/Desa di beberapa titik lokasi perbatasan dan Pintu Keluar-Masuk Kabupaten Barito Utara:

Posko 01 Kabupaten Km 12 SIKUI, Posko 02 Kabupaten Pelabuhan Pasifik, Posko 03 Kabupaten Km. 52 Sei Rahayu, Posko 04 Pendreh, Posko 06 Lemo, Posko 08 Bukit Sawit, Posko 09 Luwe Hulu, Posko 10 Luwe Hilir, Posko 11 Nihan Hilir, Posko 12 Batu Raya, Posko 13 Jangkang, Posko 14 Benangin, Posko Air 19 Benao Hulu (Perbatasan Mura-Barut) dan Posko 23 Benao Hilir.

- b. Kegiatan Skrining Awal/Deteksi Dini Pemeriksaan Rapid Test Covid-19 Petugas Posko Kabupaten Barito Utara, Posko Terpadu Km.12 Sikui, Posko Terpadu Pelabuhan Pasifik Muara Teweh dan Posko Km. 52 Sei Rahayu.

- c. Patroli Rutin oleh Tim Terpadu Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Polres Barito Utara, Kodim1013/Muara Teweh, Satpol PP, BPBD dan Dinas Kesehatan Kabupaten MuaraTeweh.

3. OPERASI PENANGANAN

- a. Isolasi dan Karantina
- b. Tindakan Medis

4. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

a. Surveilans

- Kegiatan Surveilans dilaksanakan secara terus menerus oleh petugas Puskesmas sesuai wilayah kerja untuk memfollow-up pasien yang terduga ODP untuk dipantau selama 14 hari, setelah selesai dan tidak ada keluhan maka akan diberikan Surat Keterangan Sehat dan sudah melaksanakan proses pemantauan selama 14 hari.
- Kegiatan Surveilans Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan guna mengantisipasi peningkatan kasus dan untuk memutus mata rantai penularan melalui Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan Penanggulangan Kasus Guna mengetahui sumber penularan dan sejauh mana penularan tersebut.

b. Aturan/Protap

Untuk informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (ODP, PDP, POSITIF, SEMBUH dan MENINGGAL) Covid-19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Barito Utara :

1. Mengisi Formulir bagi masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Barito Utara dan Pulang dari daerah yang terjangkit Covid-19 dalam waktu 14 hari terakhir.
2. Dengan pengisian FORMULIR PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upaya antisipasi penularan Virus tersebut.

sudah dianggap Valid dan akan langsung kerumah masyarakat yang melapor.

c. Dukungan Kebutuhan Dasar.

- Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebesar Rp. 2.143.500.000,- dengan Jumlah Penerima Bantuan sebanyak 4.287 KK, dari jumlah yang diusulkan sebanyak 13.000 lebih KK.
- Layanan Gratis PDAM bagi masyarakat yang kurang Mampu
- Pembagian Sembako bagi warga yang kurang mampu.

Prasarana Kesehatan dan Infrastruktur.

Selain pembahasan tentang Percepatan Penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga menyampaikan beberapa usulan, antara lain :

- Selain usulan pengadaan alat-alat kesehatan untuk Penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga mengusulkan bantuan / penambahan Alat Kesehatan (Alkes) untuk Rumah Sakit di Muara Teweh, lebih lebih mengingat bahwa Rumah Sakit Muara Teweh telah ditunjuk sebagai Rumah Sakit Rujukan untuk DAS Barito, namun selama Pandemi Covid-19 belum mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- Usulan **Kelanjutan** Pengerjaan Ruas jalan Km 30 – Simpang Benangin, karena sampai sekarang masih belum tuntas.
- Penanganan ruas jalan Malawaken – Lampeong yang masih bermasalah, karena telah beberapa kali turun proyek pengerjaannya tidak sesuai harapan, serta kualitas pekerjaan tidak sesuai (tidak sesuai speck) dan setiap akhir masa Pemeliharaan, jalan tersebut telah rusak kembali.

3. **KABUPATEN MURUNG RAYA.**

Dalam Pertemuan yang dilaksanakan diperoleh beberapa informasi dan data antara lain sebagai berikut :

Untuk Jumlah Kasus POSITIF di Kabupaten Murung Raya sebanyak 15 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 9 orang dan Pasien Sembuh 34 orang dari data tersebut maka Kabupaten Murung Raya khususnya di Kecamatan Murung ditetapkan sebagai Zona Merah

Sedangkan kegiatan Operasi Percepatan Penanganan Covid-19 yang telah dilakukan antara lain :

1. Pendirian Pos Covid-19 di setiap Pintu masuk Kabupaten Murung Raya diantaranya :

- Pos Jaga di Kecamatan Permata Intan
- Pos Jaga di Kecamatan Tanah Siang
- Pos Jaga di Kecamatan Laung Tuhup
- Pos Jaga Simpang Polres.

2. Sosialisasi

Selain mendirikan Pos-pos penjagaan dalam kegiatan Operasi Percepatan Penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Murung

Raya juga bersama Dinas Instansi terkait secara terjadwal melakukan kegiatan Sosialisasi maupun Penyuluhan kepada masyarakat tentang cara-cara Pencegahan penularan Covid-19, baik secara langsung maupun berupa Foster/Baliho serta menganjurkan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker bila bepergian atau keluar rumah.

3. Penelusuran (Tracking) dan Pemeriksaan Rapid

Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya juga membentuk Tim Surveilans di mana di setiap Desa yang terdapat pasien terkonfirmasi Covid-19 maka Tim akan mendatangi dan melakukan penelusuran sehingga dapat memutuskan mata rantai penyebaran Virus tersebut dan sampai sejauhmana penularannya dan Tim juga akan melakukan Pemeriksaan Rapid Test terhadap masyarakat yang pernah kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi Covid-19.

4. Operasi Penanganan

Selain melakukan penanganan langsung, Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga telah mempersiapkan beberapa fasilitas/Gedung untuk Karantina bagi pasien yang terkonfirmasi Covid-19 diantaranya Gedung Diklat di Desa Konut Kecamatan Tanah Siang dengan kapasitas 120 tempat tidur dan Gedung Politeknik Kecamatan Murung dengan kapasitas 150 tempat tidur dan juga telah mempersiapkan lahan lokasi pemakaman Covid-19 yang terletak di Tahujan Ontu.

5. Bantuan Sosial Pemerintah

1.	Bantuan Kartu Murung Raya Sejahtera (KMS) Kompensasi Covid-19	Jumlah Penerima Bantuan 1.410 KPM, diberikan selama bulan April, Mei, Juni 2020 dengan besaran Rp.600.000/KPM/Bulan
2.	Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) Pusat melalui Kantor Pos, Bank BNI dan BRI	Jumlah Penerima Bantuan 6.734 KPM dengan Besaran Bantuan Rp.600.000/KPM/Bulan yakni Bulan April, Mei dan Juni 2020
3.	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Provinsi Kalimantan Tengah	Target Penerima Bantuan 1.434 KK dengan Realisasi 1.169 KK, Total bantuan 671.500.000,- Tersalur 635.500.000,- (94,64%) dari yang diusulkan
4.	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19, Sumber Dana BTT APBD 2020 Kabupaten Murung Raya	Tahap I. 125 Orang @ Rp.600.000 x 3 Bulan Tahap II. 187 Orang @ Rp. 600.000 x 3 Bulan Dengan Total Bantuan Rp.500.000.000, untuk lebih dari 6.000 KK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil kegiatan kunjungan/peninjauan yang telah dilakukan di tiap-tiap Kabupaten, diperoleh beberapa Kesimpulan, Usul dan Saran antara lain :

Kesimpulan.

Pelaksanaan Reses Kelompok Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 ini telah terlaksana secara baik dan lancar serta mendapat respon yang sangat baik dari Pemerintah Kabupaten yang di kunjungi. Kegiatan/kunjungan ini dinilai sangat positif dan diharapkan menjadi prioritas sebagai bahan kajian dan pertimbangan untuk mempercepat Proses Pembangunan di segala bidang dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan Penanganan Bantuan Pandemi Covid-19 serta Bencana Alam (Banjir)

Usul.

- Pemerintah di Ketiga Kabupaten yang dikunjungi mengusulkan agar bantuan yang diberikan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp.500.000,-/KK/Bulan, agar bisa disama ratakan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang lain sebesar Rp.600.000,-/KK/Bulan agar tidak terjadi kesenjangan / polemik bagi keluarga penerima Bantuan.
- Diharapkan agar Pemerintah Daerah melakukan Revisi berkala terhadap Data Penerima Bantuan Sosial baik dari Pusat maupun Daerah karena masih carut marutnya data penerima Bantuan Sosial,

masih banyak masyarakat yang belum mendapat bantuan dan masih banyak juga Penerima yang tidak tepat sasaran.

- Agar tidak terjadi polemik, pendataan seharusnya melibatkan tokoh masyarakat yang ada di tiap RT, Desa atau Kelurahan setempat.
- Usulan Bantuan/Penambahan Sarana dan Prasarana serta Alat Kesehatan (Alkes) untuk Ketiga Rumah Sakit, baik Rumah Sakit Buntok, Rumah Sakit Muara Teweh dan Rumah Sakit Puruk Cahu, terlebih untuk Rumah Sakit Muara Teweh yang ditunjuk sebagai Rumah Sakit Rujukan di DAS Barito, karena selama masa Pandemi Covid-19 belum pernah mendapat bantuan, bahkan bantuan yang sudah dianggarkan di pangkas habis.
- Kepala Dinas Kesehatan Murung Raya juga mengusulkan bantuan Sarana dan Prasarana Kesehatan untuk Puskesmas serta Penambahan Tenaga Medis khususnya di Kecamatan Tanah Siang karena hanya terdapat 1 Puskesmas bertugas menangani 17 Desa.
- Perlunya adanya Penanganan yang serius dari pemerintah untuk menangani permasalahan ruas jalan Malawaken – Lampeong yang pengerjaannya selalu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
- Penanganan kelanjutan pengerjaan ruas jalan Km 30 – Simpang Benangin agar bias dikerjakan hingga tuntas.
- Usulan percepatan perbaikan pengerjaan ruas jalan Murung Raya - Kuala Kurun, khususnya ruas jalan dari Murung Raya – Sungai Hanyo karena masih banyak yang belum beraspal.

Saran.

Demi menunjang dan mempercepat proses Percepatan Penanganan Covid-19 dan Penyaluran Bantuan, serta beberapa usulan yang disampaikan kami menyarankan dan berharap agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk tetap memperhatikan dan menindaklanjuti hasil temuan dalam rangka Reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah IV, untuk dapat segera merealisasikannya sebagai upaya mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang Sehat Sejahtera, bermartabat dan Berkah.

PENUTUP

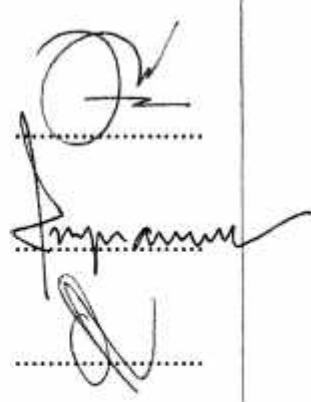
Demikian Laporan Hasil Reses Kelompok Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, yang telah dilaksanakan selama 8 (Delapan) hari, mulai dari tanggal 31 Mei sampai dengan 7 Juni 2020 di Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah IV. Laporan ini akan menjadi masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk bisa ditindaklanjuti dalam upaya mempercepat proses Percepatan Penanganan Covid-19 juga untuk mewujudkan berbagai usulan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten, khususnya di Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah IV maupun daerah Kalimantan Tengah lainnya, sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera lahir dan bathin menuju Kalimantan Tengah yang bermartabat dan Berkah.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.

Palangka Raya, Juni 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAERAH PEMILIHAN KALTENG IV

KOORDINATOR TIM : H. JIMMY CARTER KETUA TIM : INA PRAYAWATI, S.E JURU BICARA : SISWANDI	
---	---

LAPORAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



HASIL RESES KELOMPOK DAPIL KALTENG V
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KE KABUPATEN PULANG PISAU DAN KABUPATEN KAPUAS
DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA KE -2
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020

Palangka Raya, 1 Juli 2020

LAPORAN

HASIL RESES KELOMPOK DAERAH PEMILIHAN KALTENG V DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KE KABUPATEN PULANG PISAU DAN KABUPATEN KAPUAS PADA MASA RESES I MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Salam sejahtera bagi hadirin sekalian dan selamat pagi.

Yth. Saudara Gubernur Kalimantan Tengah ;

Yth. Saudara-saudara Unsur Forum koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Tengah ;

Yth. Saudara ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya ;

Yth. Saudara Ketua ,wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah provinsi Kalimantan Tengah ;

Yth. Saudara Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Palangka Raya ;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah ,Sekretaris DPRD,Inspektur Provinsi,Kepala Badan, Kepala Dinas,Kepala Kantor Satuan kerja perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;

Yth. Para Rektor Universitas /Ketua Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Palangka Raya ;

Yth. Para Kepala Kantor Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen di Provinsi Kalimantan Tengah ;

Yth. Para Sesepuh Daerah, Tokoh-tTokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat,Insan Pers, Pimpinan Rapat Paripurna, Undangan dan Hadirin sekalian yang saya banggakan.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita senantiasa memersembahkan puji dan syukur ke hadirat Nya, karena atas segala rahmat,taupiq dan hidayah-Nya,kita semua sampai saat ini masih diberikan nikmat,kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk menghadiri dan mengikuti rapat paripurna ke III masa persidangan II tahun sidang 2020 , dengan agenda Rapat penyampaian hasil Reses dari masing-masing Kelompok Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya Kepada Pimpinan Rapat Paripurna, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Tim Reses dari daerah Pemilihan Kalimantan Tengah V DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi Kabupaten Pulang pisau dan Kabupaten Kapuas untuk menyampaikan hasil Reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada masa Reses I masa persidangan I Tahun sidang 2020. semoga apa yang kami laporkan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Kalimantan Tengah.

Guna menyingkat waktu yang tersedia selanjutnya akan kami bacakan Laporan Hasil Kunjungan Reses I Tahun sidang 2020 dari Kelompok Daerah Pemilihan Kalteng V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Sebagai implementasi Pelaksanaan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor I Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah BAB VII ayat (3) dan pasal 49 ayat (2),(3),(4),(5) (6) dan (7) setiap berakhir masa Persidangan dilaksanakan reses yang dilaksanakan oleh masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengunjungi Daerah pemilihan yang bersangkutan guna menghimpun data, menyerap aspirasi masyarakat serta mengevaluasi pembangunan yang telah dan sedang berjalan.

Hasil pelaksanaan tugas Reses Anggota DPRD baik perorangan atau kelompok dibuat dalam laporan tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang kita lakukan saat ini.

II. DASAR PELAKSANAAN :

Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, tanggal 31 Mei sampai dengan 7 Juni 2020 Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah selama 8 hari kerja.

Keputusan Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.44.43/12/DPRD/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang tugas Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Daerah Pemilihan pada Kabupaten /kota dan Kecamatan di KalimantanTengah pada Masa Persidangan I Tahun sidang 2020.

Surat perintah tugas Ketua DPRD provinsi kalimantan Tengah Nomor :62 SPT/DPRD/2020 Tanggal 29 mei 2020.

Surat Perintah Perjalanan Dinas Sekretaris DPRD Provinsi kalimantan Tengah Nomor :094/...../Setwan/2020 tanggal 29 Mei 2020

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Maksud dan tujuan Reses Kelompok Dapil Kalteng V DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada masa Persidangan I tahun Sidang 2020 adalah :

Untuk menghimpun data, mencari informasi, menampung dan menyerap aspirasi masyarakat serta mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan pembangunan baik yang dibiayai dari APBN maupun APBD Provinsi tahun Anggaran 2019-2020 yang telah/sedang dilaksanakan, serta menampung usul dan saran dari pihak Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan, maupun dari masyarakat untuk ditindaklanjuti berdasarkan skala prioritas oleh pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Dinas / Badan /Lembaga Teknis terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi kalimantan Tengah.

IV. RUANG LINGKUP LAPORAN

Laporan Kelompok Reses Daerah Pemilihan Kalteng V secara keseluruhan menyangkut bidang tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya permasalahan-permasalahan,temuan-temuan dan usul maupun saran serta aspirasi dari masyarakat tersebut, penyelesaiannya diharapkan dapat dibahas dan ditindaklanjuti oleh komosi-komisi pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah serta dinas / badan Lembaga Teknis terkait sesuai bidang dan tugasnya masing-masing.

V. PERSONALIA ANGGOTA RESES

NO	NAMA	Kom	JABATAN
1	WIYATNO,SP		Kordinator
2	Ir.H.MUHAJIRIN,M.P	I	Ketua tim
3	TOMY IRAWAN DIRAN,SE.	IV	Sekretaris
4	Drs.YOHANES FREDDY ERING,M Si	I	Anggota
5	Hj. RUSITA IRMA,Spi	I	Anggota
6	H.ACHMAD AMUR,SH.MH	III	Anggota
7	H.MARUADI,SH,S.Sos.	IV	Anggota
8	ANDAYANI,SE.	III	Anggota
9	dr.NIKSEN S.BAHAT	III	Anggota

. PERSONALIA PENDAMPING RESES

1	SALAMPAK,S Sos.	:	Kordinator
2	HERIYANTO	:	Anggota
3	DODI ANTONI,SE	:	Anggota

Namun karena bertepatan dengan wabah pandemi Covid 19, 1 (satu) orang Anggota Kelompok Reses DAPIL KALTENG V berhalangan mengikuti Reses, karena berdomisili di Jakarta..

VI. PELAKSANAAN RESES

Sasaran dan objek :

Pelaksanaan reses I Masa Sidang I Tahun Sidang 2020 lebih terfokus pada objek peninjauan lapangan dengan Wilayah yang menjadi sasaran peninjauan lapangan Kelompok Reses daerah pemilihan Kalimantan Tengah V adalah :

1. Wilayah Kabupaten Pulang Pisau

Peninjauan Kesiapan penanganan Covid 19 dan penyaluran Bansos dari Pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten.

1. Kecamatan Kahayan Tengah Pertemuan Kota Kecamatan Bukit Rawi
2. Peninjauan ke Sekolah ke Polisian Negara (SPN).
3. Peninjauan ke Kecamatan Banama Tingang (Bawan).
4. Peninjauan ke Kecamatan Jabiren Raya.
5. Peninjauan pos Gugus tugas perbatasan kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas.

2. Wilayah Kabupaten Kapuas

- a. Peninjauan /Pertemuan dikantor kecamatan Kapuas hulu (sungei Hanyu).
- b. Peninjauan Puskesmas Kecamatan sungei hanyu.
- c. Peninjauan/ Pertemuan dikantor Kecamatan Kapuas Tengah (Pujon).
- d. Peninjauan/ Pertemuan dikantor KecamatanTimpah.
- e. Peninjauan/ Pertemuan dikantor Kecamatan Basarang dan Peninjauan Pos Covid 19 di kilometer 9 Basarang.

B. Methode Reses :

Untuk menghimpun berbagai data, Informasi, permasalahan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, maka Kelompok reses Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah V Menggunakan methode : Kunjungan ke lokasi/lapangan tanpa mengumpulkan masyarakat langsung ke kantor-kantor milik Pemerintah dan Pos-pos Covid 19.

Waktu Reses :

Reses dilaksanakan selama 8(delapan) hari kerja,dari tanggal 31 Mei S/d 7juni 2020.

VII. HASIL RESES

Dari hasil pertemuan,wawancara dan dialog selama pelaksanaan Reses I Masa persidangan 1 Tahun sidang 2020 disamping telah teratasinya permasalahan yang perlu penegasan dan penanganan secara serius,cepat dan fokus,terutama penanganan pandemi Covid 19 dan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

serta tokoh masyarakat pada pertemuan dan peninjauan langsung ke lapangan dapat kami sampaikan Berdasarkan hasil Peninjauan lapangan di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas serta pemerintah Kecamatan dari masing-masing Kabupaten tersebut, juga informasi dan masukan dari berbagai elemen sebagai beriku.

A. KABUPATEN PULANG PISAU

Kecamatan Kahayan Tengah

Bidang Infrastuktur /Prasarana

Kapolda mengusulkan Sekolah Kepolisian Negara (SPN) yang berada di Kabupaten Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Tengah,di Bukit Rawi agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bisa memasukan Dana dalam pembahasan anggaran 2020/2021 untuk pembangunan ruang kelas mengingat selama ini dirasakan masih kurang ada beberapa kelas saja yaitu **kelas** Kabupaten Lamandau ,**Kelas** Barito selatan kelas Kotawaringin Timur Sampit dan lain-lain usulan ini langsung dari Polda, rombongan diterima oleh Kepala SPN.

Bidang Pendidikan

Pembangunan Aula,laboratorium dan pembangunan serana olah raga seperti lapangan sepak bola,mengingat tanah sudah tersedia.

Bidang Ekonomi.

Menurut penjelasan Bapak Camat Kahayan Tengah **I Ketut Mitra,se** masyarakat Kecamatan Kahayan Tengah dalam wabah pandemi Covid 19 tidak terlalu berdampak.

Karena masyarakat semua sadar akan anjuran pemerintah,dan taat akan petunjuk Pertokoler Kesehatan.

Kecamatan Banama Tinggang

Bidang Pemerintahan

Bapak Camat **Drs.SEM HEDRAWAN BODOI** menyapaikan kepada Kelompok Reses Dapil V agar bisa dengan cepat membantu masyarakat Kecamatan Banama Tinggang supaya pamdemi Covid 19 tidak terlalu banyak memakan korban.

Kecamatan Jabiren Raya

Kepala PUSKESMAS Jabiren Raya menyampaikan kepada Kelompok Reses Dapil V agar pihak pemerintah menambah anggaran mengingat Puskesmas ini menerima pasien 24 jam dalam pandemi Covid 19 ini.

Bidang Kesejahteraan.

Bantuan langsung tunai yang berasal dari pemerintah pusat sudah diterima oleh sebagian masyarakat yang berhak menerimanya,dan tepat sasaran.terkecuali yang berasal dari Provinsi dan Kabupaten belum ada sama sekali sampai saat ini.

B. KABUPATEN KAPUAS

Kecamatan Timpah

Di Kecamatan Timpah terdapat dua (2) orang pusitef Covit 19 **suami istri** ,namun suami sudah meninggal sedangkan istri masih dirawat dirumah sakit.

Kecamatan Timpah diadakan tes Rapid masal masyarakat sebanyak 287 orang yang ikut namun hasilnya semua negatip.

Bidang Kesejahteraan

Kecamatan Timpah terdiri dari 9 Desa dan 3 buah Dusun masyarakat timpah berjumlah 140 kk sedangkan penerima BLT berjumlah 70 orang,yang menerima BKIH berjumlah 50 orang.Kecamatan Timpah ada menerima bantuan beras dari Mabes sebanyak kurang lebih satu ton (1 ton) untuk 1.106 kk tahap pertama ,tidak menutup kemungkinan ada tahap kedua apabila wabah Covid 19 masih berlanjut menurut penjelasan Camat Timpah

Kecamatan Pujon.

Kecamatan Pujon terdiri dari 13 Desa terdapat 10.146 kk dengan rician laki-laki berjumlah 9.822 Jiwa,dan perempuan berjumlah 9.474 Jiwa, sehingga penduduk kecamatan Pujon berjumlah 19.296 jiwa ,di Kecamatan Pujon terdiri dari bermacam penganut agama sehingga terdapat bangunan 10 buah Langgar,4 buah Gereja,dan 13 buah Balai Kaharingan (Balai Basara) terdiri dari 53 Ketua RT,Desa Pujon merupakan Calon Ibokata Kabupaten dalam pemekaran Kabupaten Kapuas Ngaju.

Bidang Pendidikan

Selama pandemi Covid 19 semua sekolah diliburkan banyak pemuda dan remaja tinggal dirumah, namun ada dampak buruk bagi mereka karena banyak salah menggunakan waktu yang sangat merugikan mereka sendiri karena banyak diantara mereka mengunsumsi lem Pox dan Narkoba,serta obat-obatan terlarang sehingga terkenal dengan istilah **TAKATEK** ini informasi yang kami terima dari Bapak Camat Pujon dan Bapak Kades maka diusulkan oleh masyarakat melewati Bapak Kapolsek Pujon kepada Kelompok Reses yang dikoordinir Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah **Wiyatno,sp**,dan ketua kelompok **Bapak Ir.Muhajirin MP** menyampaikan kepada Bapak Kapolda Kalimantan Tengah agar bisa turun ke lapangan untuk memberi bimbingan kepada mereka khususnya dari **BNN** Provinsi Kalimantan Tengah.

Kecamatan sungei hanyu

Kecamatan Sungei Hanyu terdiri dari 14 Desa dengan jumlah Penduduk 10.443 jiwa terdiri dari 685 kk.

a. Bidang Kesehatan

Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kecamatan Sungei hanyu yang keberadaanya berdekatan dengan Kabupaten Gunung Mas kekurangan Tenaga Dokter Umum,Dokter Gigi, dan Tenaga Rekam Medik yang berstatus ASN.

Begitu juga sarana Prasarana kesehatan yang sangat diperlukan disetiap Ruangan masih banyak kekurangan yang perlu segera mendapat perhatian antara lain :

Ruangan Laboratorium kekurangan peralatan

Hematologi analyzer (untuk pemeriksaan darah)

Spektrofotometer (untuk pemeriksaan kimia darah)

AC (untuk Ruangan pemeriksaan memerlukan AC)

Kulkas (untuk penyimpanan reagen)

Ruangan Kesehatan Gigi kekurangan peralatan

Alat sealling (alat membersihkan kerang Gigi)

Alat sinar/ penambahan gigi seri permanen

Tang gigi sulung 2 (set)

Dan tidak kalah penting pemerintah harus menambah dana operasional dan administrasi agar Peninjauan Langsung ke Lapangan yang menjadi objek /sasaran berjalan lancar.

b. Bidang Pendidikan

Desa Sungei hanyu ada dua (2) buah SMK ,Tk dan SD serta SMP Meskipun Pelayanan di bidang pendidikan lancar,namun Kecamatan Kapuas hulu ini idealnya terdapat UPTD mengingat jarak tempuh sangatlah jauh dari Kabupaten Kapuas dengan jumlah murid sebanyak 198 orang dengan jumlah guru berstatus PNS sebanyak 16 orang dan 1 orang guru honorer. cukup terlaksana dengan baik namun kurangnya sarana / prasarana penunjang masih menjadi kendala dalam proses belajar / mengajar, untuk itu diusulkan :

- Penambahan Ruang kelas Baru (RKB) mengingat Penambahan Ruang kelas Baru : sangatlah mendesak karena setiap tahun ajaran Baru murid bertambah.
- Pengadaan Computer untuk pelaksanaan UNBK,dan sinyal belum lancar.
- Penambahan guru fisika, mengingat guru fisika yang ada masih berstatus guru honorer
- Pemagaran keliling sekolah
- Pengadaan peralatan musik tradisional(sanggar).
- Pengadaan Rumah Dinas
- Pemasangan paving pada halaman sekolah
- Pembangunan tempat parkir sekolah.

C. Bidang Ekonomi Kesejraan.

Bapak Camat Sungei Hanyu **Ir.HAGUS IRIANTO** dan Bapak Kades Sungei hanyu menjelaskan Bantuan Langsung Tunai itu seharusnya melewati Kecamatan, tidak langsung diambil perseorangan ke bank mengingat jarak tempuhnya sangatlah jauh,kalau dihitung besar biaya dari pada uang yang diambil tidak sesuai harapan masyarakat,Kecamatan Sungei hanyu sangat beruntung karena mendapat bantuan beras kurang lebih 1 ton dari Perusahaan sawit yang ada diwilayahnya Seperti perusahaan (DWK) dan banyak perusahaan yang lain juga turut meringankan beban masyarakat.

D. Bidang Energi

Tidak adanya Penerangan Listrik dan sinyal Telpon/internet belum lancar di **Desa Pasak Talawang** dan **Desa Mandau Talawang**, mengingat Desa ini paling ujung tidak bisa dijangkau melalui darat melainkan hanya lewat sungai saja. membuat masyarakat seakan menjadi masyarakat tertinggal dan terasing, karena tidak pernah mendapat informasi dari dunia luar yang merupakan jendela pembangunan, untuk itu diharapkan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi dapat mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan pengadaan Pusat listrik Tenaga Surya (PLTS) sehingga masyarakat yang berada di sepanjang sungai tidak menjadi masyarakat yang terasing dan anak-anak usia sekolah dapat belajar dengan baik termasuk salah satunya untuk mensukseskan Program Keluarga Berencana(KB).

Kesimpulan dan saran.

Setelah Kelompok Reses Dapil V melakukan pantauan dan pengecekan untuk menjadi perhatian kita bersama antara lain:

Harapan kami dari Kelompok Reses Dapil V ,bagian Infrastruktur jalan maupun prasarana yang lain bisa segera dilanjutkan,sebab sekarang semua proyek tidak berjalan.

VIII. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan Reses Kelompok Reses DAPIL KALTENG V Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada masa Reses I masa persidangan I tahun Sidang 2020 ke **Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas** dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang dengan sabar dan tekun mengikuti laporan ini sebagai masukan, bahan evaluasi kita bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di Kalimantan Tengah dimasa mendatang. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu alaikum warahmatullahi Wabarakatun .

Palangka Raya, Juni 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KELOMPOK RESES DAPIL KALTENG V

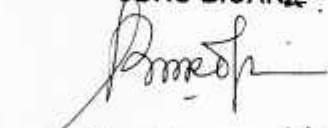
KETUA


Ir. H. MUHAJIRIN.MP.

SEKRETARIS


TOMY IRAWAN DIRAN, SE

JURU BICARA


A. Maruadi, SH., S.Sos.

RAPAT PARIPURNA KE – 3
MASA PERSIDANGAN II (KEDUA) TAHUN SIDANG 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
=====

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Juli 2020
Pukul : 09.23 WIB
Sifat Sidang : Terbuka untuk Umum
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. S. Parman No. 02 Palangka Raya.

A c a r a : 1. Pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Rapat.
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalimantan tengah, atas Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan tengah, Tahun Anggaran 2019.
3. P e n u t u p .

PimpinanRapat : Wiyatno, SP, KetuaDewanPerwakilan Rakyat Daerah ProvinsiKalimantan Tengah.

Sekretaris : Tantan, SH, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Jumlah Anggota : 45 Orang.

1. FraksiPDI-Perjuangan.	12	Orang
2. FraksiPartai Golongan Karya.	7	Orang
3. FraksiPartaiDemokrat.	6	Orang
4. FraksiPartaiNasdem.	5	Orang
5. FraksiPartaiGerindra.	5	Orang
6. FraksiPKB.	4	Orang
7. FraksiGabungan (FGP4H).	6	Orang

Hadir

: 30 Orang.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Wiyatno, SP | Fraksi PDI-Perjuangan |
| 2. Drs. Yohannes Freddy Ering, M.Si | Fraksi PDI-Perjuangan |
| 3. H. Jubair Arifin | Fraksi PDI-Perjuangan |
| 4. Ir. Yulilis | Fraksi PDI-Perjuangan |
| 5. Drs. Duwel Rawing | Fraksi PDI-Perjuangan |
| 6. Ina Prayawati, SE | Fraksi PDI-Perjuangan |
| 7. Ir. Lohing Simon | Fraksi PDI-Perjuangan |
| 8. Irawati, S.Pd | Fraksi PDI-Perjuangan |
| 9. Ferry Khaidir | Fraksi PDI-Perjuangan |
| 10. H. Maruadi, SH, S.Sos | Fraksi Partai Golkar. |
| 11. Sri Neni Trianawati, SE | Fraksi Partai Golkar. |
| 12. Sinar Kumala | Fraksi Partai Demokrat. |
| 13. H. Jimmy Carter | Fraksi Partai Demokrat. |
| 14. H. Muhammad Sriosako, S.Sos., MH | Fraksi Partai Demokrat. |
| 15. Ir. H. Muhajirin, MP | Fraksi Partai Demokrat. |
| 16. Siswandi | Fraksi Partai Nasdem. |
| 17. Bryan Iskandar, SE | Fraksi Partai Nasdem. |
| 18. Henry, SE, MH | Fraksi Gerindra. |
| 19. H. Achmad Rasyid | Fraksi Gerindra. |
| 20. Jainudin Karim, SE | Fraksi Gerindra. |
| 21. Dra. Kuwu Senilawati | Fraksi Gerindra. |
| 22. Andayani, SE | Fraksi PKB. |
| 23. H. Purman Jaya, S.Sos | Fraksi PKB. |
| 24. Fajar Hariady | Fraksi PKB. |
| 25. Hj. Rusita Irma, S.Pi | Fraksi PKB. |
| 26. Evi Kahayanti, S.Sos | Fraksi PKB. |
| 27. Tomy Irawan Diran, SE | Fraksi Gabungan (FGP4H). |
| 28. Natalia, ST | Fraksi Gabungan (FGP4H). |
| 29. Sirajul Rahman, S.Hut., M.I.Kom | Fraksi Gabungan (FGP4H). |
| 30. Sengkon, SE | Fraksi Gabungan (FGP4H). |

Tidak Hadir

: 15 Orang.

- | | | |
|--|--------------------------|---------|
| | | Ket : |
| 1. Ir. Artaban, MH | Fraksi PDI Perjuangan | I z i n |
| 2. Andina Thresia Narang, B. Comm | Fraksi PDI Perjuangan | I z i n |
| 3. Hj. Maryani Sabran | Fraksi PDI-Perjuangan | I z i n |
| 4. Ir. H. Abdul Razak | Fraksi Partai Golkar. | I z i n |
| 5. Dra. Siti Nafsiah, M.Si | Fraksi Partai Golkar. | I z i n |
| 6. H. Sudarsono, SH | Fraksi Partai Golkar. | I z i n |
| 7. Sarwani | Fraksi Partai Golkar. | Alm. |
| 8. Heri Santoso, ST | Fraksi Partai Demokrat. | I z i n |
| 9. Yeni Maria Marselina Katha | Fraksi Partai Demokrat. | I z i n |
| 10. Faridawaty Darland Atjeh, SE, MM | Fraksi Partai Nasdem. | I z i n |
| 11. dr. Niksen S. Bahat | Fraksi Partai Nasdem. | I z i n |
| 12. Toga Hamonangan Nadeak, SH., MH | Fraksi Partai Nasdem. | I z i n |
| 13. Drs. H. Sugiyarto, MAP | Fraksi Gerindra. | I z i n |
| 14. Rizki Amalia Darwan Ali, BA(Hons), MSc | Fraksi Gabungan (FGP4H). | I z i n |
| 15. H. Achmad Amur, SH, MH | Fraksi Gabungan (FGP4H). | I z i n |

Pimpinan
Wiyatno, SP

: **Assalamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera dan Selamat Pagi.**

Rapat Paripurna ke – 3 Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, Anggota Dewan yang hadir berjumlah 30 orang dari 44 Anggota Dewan, maka **korum tercapai.**

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Paripurna ke – 3 Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pada pagihari ini, Kamis 2 Juli 2020, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

----- **Ketukan Palu Satu Kali** -----

Marilah kita menyanyikan Lagu Kebangsaan **“Indonesia Raya”**

Pimpinan
Wiyatno, SP

: Hadirin dimohon berdiri.

----- **Menyanyikan Lagu Indonesia Raya** -----

Pimpinan
Wiyatno, SP

: Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Yang terhormat :

- Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah ;
- Saudara Wakil-Wakil Ketua dan semua Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Saudara Kapolda Kalimantan Tengah IRJEN Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum, M.Si, MM. ;
- Saudara Danrem 102 Panju Panjung Kalimantan Tengah, BRIGJEN TNI Purwo Sudaryanto ;
- Asisten Sekretaris Daerah / Staf Ahli Gubernur dan semua Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta undangan sekalian yang saya muliakan.

Pertama – tama marilah kita selalumpersembahkan pujidansyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaitasekalian, sehinggakita dapat hadirmengikuti Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, pada pagi hari ini dalam keadaan sehat wal’afiat.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang sayahormati,

Adapun Agenda Rapat Paripurna Dewan pada pagihari ini adalah : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, atas Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah,

Tahun Anggaran 2019.

Perlu kita ketahui bersama bahwa Pidato Pengantar Terhadap Raperdatent angPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan tengah, Tahun Anggaran 2019, telah disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, pada Rapat Paripurna ke – 2 Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, tanggal 1 Juli 2020.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Untuk mengawali Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung Dewan, kepada Anggota Dewan yang terhormat, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami persilakan.

Jubir Fraksi PDI-P
Ferry Khaidir : Teks Terlampir.

Pimpinan
Wiyatno, SP : Terima kasih

Berikutnya kepada Anggota Dewan yang terhormat, dari Fraksi Partai Golongan Karya, untuk menyampaikan Pemandangan Umum, kami persilakan.

Jubir Fraksi Partai
Golkar
H. Maruadi, SH, S.Sos : Teks Terlampir.

Pimpinan
Wiyatno, SP : Terima kasih

Selanjutnya kepada Anggota Dewan yang terhormat, dari Fraksi Partai Demokrat, untuk menyampaikan pemandangan umum, kami persilakan.

Jubir Fraksi Partai
Demokrat
Siswandi : Teks Terlampir.

Pimpinan
Wiyatno, SP : Terima kasih

Kemudian kepada Anggota Dewan yang terhormat, dari Fraksi Partai Nasdem, untuk menyampaikan Pemandangan Umum, kami persilakan.

Jubir Fraksi Partai
Nasdem
Bryan Iskandar, SE : Teks Terlampir.

Pimpinan
Wiyatno, SP : Terima kasih

Berikutnya kepada Anggota Dewan yang terhormat,
dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya,
untuk menyampaikan Pemandangan Umum, kami persilakan.

Jubir Fraksi Partai
Gerindra
Jainudin Karim, SE : Teks Terlampir.

Pimpinan
Wiyatno, SP : Terima kasih

Selanjutnya, kepada Anggota Dewan yang terhormat,
dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,
untuk menyampaikan Pemandangan Umum, kami persilakan.

Jubir Fraksi PKB
H. Purman Jaya, S.Sos : Teks Terlampir.

Pimpinan
Wiyatno, SP : Terima kasih

Yang terakhir, kepada Anggota Dewan yang terhormat,
dari Fraksi Gabungan PAN, PPP, PKS, Perindo dan Hanura (F-
GP4H), untuk menyampaikan Pemandangan Umum, kami persilakan.

Jubir Fraksi GP4H
Natalia, ST : Teks Terlampir.

Pimpinan
Wiyatno, SP : Terima kasih

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang sayahormati,

Demikian telah kita dengarkan bersama,
Pemandangan Umum dari masing – masing Fraksi Pendukung Dewan,
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah,
Tahun Anggaran 2019.

Berkenaan dengan pertanyaan dan saran, sebagaimana yang
telah disampaikan masing-masing Fraksi Pendukung Dewan tadi,
untuk kita mengharapkan jawaban,
tanggapan dan penjelasan dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,
dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah, pada Rapat Paripurna selanjutnya.

HadirinRapatParipurnaDewan yang sayahormati,

Dengandemikianberakhirilah agenda RapatParipurnake – 3, MasaPersidangan II (kedua) TahunSidang 2020, PimpinandanseluruhAnggotaDewan, mengucapkanterimakasih, kepadaSaudaraWakilGubernur, Forum KoordinasiPimpinan Daerah danhadirinsekalian, ataskehadiransertaperhatiannya, mengikutirapatParipurnaDewandariawalhinggaselesai, denganmengucapkanSyukur Alhamdulillah, RapatParipurnadinyatakansesaidanditutup.

----- **Ketuk Palu Tiga Kali** -----

Pimpinan : Terima kasih
Wiyatno, SP

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rapat Paripurna berakhir dan
Ditutup Pukul : 11.10 WIB

Palangka Raya, 2 Juli 2020

MENGETAHUI :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

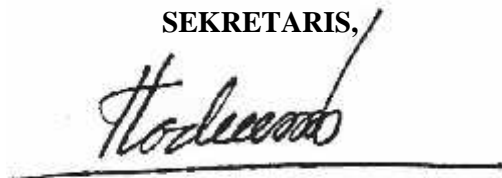
KETUA,



WIYATNO, SP

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SEKRETARIS,



**TANTAN, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640421 199203 1 012**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan S. Parman No. 2 Telpon (0536) 3236320, Fax. 3236329 Palangka Raya 73112

Palangka Raya, 1 Juli 2020

Nomor : 005/953/DPRD/2020
Lampiran : -
Perihal : **RAPAT PARIPURNA**

K e p a d a

Yth.

di -

PALANGKA RAYA

Bersama ini Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr(i) pada **Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020**, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : KAMIS
Tanggal : 2 Juli 2020
Pukul : 09.00 WIB – selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
A c a r a : Pemandangan Umum Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalteng atas Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2019.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

K E T U A,

WIYATNO, SP

Catatan :

1. Pakaian
 - Sipil : Batik Khas Kalteng dan Lawung/Sumping.
 - TNI/POLRI : Menyesuaikan.
 - Ibu-ibu : Menyesuaikan.
2. Undangan Hadir 15 (Lima Belas) Menit sebelum Acara dimulai.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan S. Parman No. 2 Telp. 0536 – 3236320 Fax 3236329 Palangka Raya 73112

A c a r a : RapatParipurnaKe – 3 Masa Persidangan II (Kedua) Tahun Sidang 2020,DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
=====

- H a r i : KAMIS
- T a n g g a l : 2 JULI 2020
- P u k u l : 09.00 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya.

Susunan Acara :

1. Pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Rapat.
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalimantan tengah, atas Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan tengah, Tahun Anggaran 2019.
3. P e n u t u p.

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

T A N T A N, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640421 199203 1 012



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
TERHADAP
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA KE - 3
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, 2 Juli 2020.

***Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi.***

MERDEKA !!!

Yang terhormat,

- Saudara Gubernur Kalimantan Tengah

Yang Saya Hormati,

- Saudara Ketua, Wakil – Wakil Ketua dan Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;***
- Saudara-saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;***
- Saudara Sekretaris Daerah, para Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah serta Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;***
- Para Rektor Universitas Negeri dan Swasta se Kota Palangka Raya;***

- Para Sesepeuh Daerah, Pimpinan LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Insan pers, para Undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalam suasana yang berbahagia ini, perkenankan saya mengajak kita sekalian, untuk bersama-sama mempersembahkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena oleh rakhmat dan Karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama hadir diruangan ini, dalam rangka mengikuti Rapat Paripurna ke - 3 , Masa Persidangan II, Tahun Sidang 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Acara :

Penyampaian Pemandangan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

Dalam kesempatan ini, perkenankan saya atas nama seluruh Anggota Fraksi PDI Perjuangan mengucapkan "SELAMAT HARI ULANG TAHUN POLRI KE 74 I JULI 2020, POLRI SEBAGAI PENGAYOM DAN PELINDUNG RAKYAT SALAM TRI BRATA".

Kami menyampaikan ucapan terimakasih pula atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan

terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

Bapak / Ibu dan Hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 ini, berikut proses dan mekanisme pembahasannya adalah sebagaimana amanah yang telah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pada pasal 71 ayat (2) yang mengatakan bahwa : "***...Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.***

Berkenaan dengan ketentuan dimaksud, telah diatur pula pada pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan Keuangan Daerah, di katakan bahwa kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diadakan pemeriksaan oleh BPK- RI.

Oleh sebab itu Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Povinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Rapat Paripurna ke - 2 Masa Persidangan – II tanggal 1 Juli 2020, adalah merupakan salah satu upaya untuk menegakkan jalannya ketentuan dan peraturan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Saudara Gubernur serta hadirin sekalian yang saya hormati,

Fungsi DPRD, sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pasal 96 ayat (1), dikatakan bahwa "***DPRD Provinsi mempunyai fungsi pembentukan Perda provinsi, anggaran, dan pengawasan.***"

Dalam rangka melaksanakan fungsi DPRD dimaksud, perkenankan kami Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan Pemandangan Umum kami terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019. Namun sebelum kami menyampaikan substansi dari materi Pemandangan Umum dimaksud, perlu terlebih dahulu kami kemukakan bahwa didalam melakukan penilaian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan APBD yang telah dilaksanakan oleh Saudara Gubernur beserta jajarannya selama Tahun Anggaran 2019, sebagaimana yang tergambar pada materi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini. Kami Fraksi PDI Perjuangan tetap berpegang teguh pada prinsip objektivitas dan rasionalitas.

Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, akan lebih difokuskan pada hal-hal yang menurut hemat kami cukup strategis dan aktual untuk di ungkapkan khususnya berkenaan dengan realisasi pencapaian target penerimaan dan penggunaan anggaran dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun Anggaran 2019 yang lalu.

Saudara Gubernur, Rapat Paripuna Dewan dan hadirin sekalian yang terhormat.

Sebagaimana telah kita pahami bersama, bahwa Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, adalah merupakan gambaran realisasi dari semua penggunaan anggaran yang digunakan untuk mendukung dan membiayai berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

maupun pembangunan, yang penyajiannya adalah dalam bentuk; Laporan Realisasi APBD, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Mengingat bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dimaksud, adalah merupakan Laporan yang sudah diadakan pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, maka tentulah secara substansi keberadaan Laporan Pelaksanaan APBD tersebut, telah dapat dinilai sebagai laporan yang dapat menggambarkan keberadaan penggunaan sekaligus pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2019. Oleh sebab itu kami Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik akan kondisi dan mekanisme yang telah dilaksanakan selama ini.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati

Berikut perkenankan kami menyampaikan beberapa hal pokok yang berkenaan dengan substansi materi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Kami Fraksi PDI Perjuangan, sangat memberikan apresiasi terhadap realisasi pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun

Anggaran 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang telah mampu mencapai angka Rp. 4. 990 trilyun lebih atau 100, 61 %, jumlah pendapatan yang ditargetkan setelah adanya APBD Perubahan adalah sebesar Rp. 4. 959 trilyun lebih .

Demikian pula dengan realisasi lain - lain pendapatan yang dengan tingkat capaian sebesar Rp. 22. 758 milyar lebih atau 254, 23 % dari target Rp. 8.951 milyar lebih. Dengan demikian pencapaian target item Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang telah mampu mencapai tingkat realisasi diatas 254, 23% sungguh membanggakan kita semua.

Untuk itu kami meminta agar Pemerintah Daerah dapat terus berupaya untuk selalu mencari terobosan dalam rangka pembentukan sumber-sumber penerimaan daerah selain pajak dan retribusi, sehingga kedepan kemampuan untuk terus meningkatkan sumber dan jumlah Penerimaan Asli Daerah dapat terus diupayakan, sehingga ratio Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah akan semakin besar terhadap struktur anggaran kita secara keseluruhan, dengan demikian upaya kita untuk mencapai kemandirian anggaran, akan dapat kita upayakan secara bertahap dan berkelanjutan.

2. Belanja Daerah.

Pada sisi belanja, kami dari Fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa jumlah realisasi pada masing-masing pos

Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2019, belum semuanya berada dibawah pagu anggaran yang tersedia. Dengan demikian ini mengindikasikan telah terjadi penghematan atau efisiensi penggunaan anggaran. Namun demikian kami mengharapkan bahwa dengan adanya sisa anggaran lebih yang tidak terserap tersebut, bukan berarti bahwa ada program dan kegiatan yang tidak mampu dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. Sehingga dapat mengganggu pencapaian target kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Saudara Gubernur yang kami hormati,

Dalam pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2019, tentulah terdapat berbagai hal yang dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi kelemahan dari sistem proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan oleh semua jajaran Pemerintah Daerah, dalam menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu keberadaan Perwakilan BPK-RI sebagai institusi pengawasan eksternal, telah cukup banyak memberikan evaluasi, koreksi atau bahkan sanksi terhadap proses penggunaan anggaran guna semakin meminimalisir kelemahan dari manajemen pengelolaan anggaran, guna mencapai suatu tingkat pengelolaan anggaran yang sehat dan akuntabel. Untuk itu kami Fraksi PDI Perjuangan sangat mengharapkan

agar semua keberhasilan yang dicapai dan kelemahan yang telah di lakukan dan dialami dalam proses pengelolaan anggaran pada Tahun Anggaran 2019 yang lalu, benar- benar dapat dijadikan sebagai sebuah pengalaman berharga, guna dapat lebih meningkatkan kualitas manajemen dan sistem pengelolaan anggaran yang semakin profesional.

Dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pelaksanaan Anggaran Tahun 2019. Berbagai koreksi dan temuan yang telah di sampaikan oleh Perwakilan BPK-RI Provinsi Kalimantan Tengah sebagai mitra pengawasan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada masing-masing pengelola keuangan daerah, kami harapkan dapat segera untuk di tindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku, dan sekaligus dapat pula dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dan koreksi agar semua kelemahan dan kekurangan yang telah terjadi pada Tahun Anggaran 2019 yang lalu, tidak akan terulang kembali menjadi temuan yang sama pada tahun-tahun yang akan datang. **Dengan demikian upaya kita untuk secara bertahap namun pasti untuk meraih suatu opini pemeriksaan yang menjadi idaman kita semua, yaitu suatu kondisi penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan yang sehat dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahu Anggaran 2019 adalah yang ke**

enam (enam) kalinya, pada Tahun – Tahun Anggaran yang akan datang tetap dapat dipertahankan.

Guna mengawal semua proses pelaksanaan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran, kami meminta kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai institusi pengawasan internal Pemerintah Daerah, untuk dapat terus meningkatkan kinerja pengawasan sehingga fungsi pemeriksaan dan pembinaan dapat dilakukan dengan baik dan bertanggungjawab.

Sebagai salah satu upaya kita untuk lebih meningkatkan profesionalisme pengelola anggaran, kami Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas staf pengelola anggaran yang profesional, melalui upaya pembinaan dan pemberian kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, karena bagaimanapun juga patut kita akui bersama, bahwa hingga saat ini, kita baru memiliki tenaga-tenaga pengelola keuangan yang profesional dalam jumlah yang sangat terbatas.

Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati,

Masyarakat kita sangat mengharapkan adanya transparansi dari berbagai temuan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut dari berbagai temuan yang telah dilakukan. Hal

tersebut perlu dilakukan agar Akuntabilitas publik dapat semakin ditegakkan. Agar masyarakat lebih dapat menggunakan fungsi social control, maka kepada mereka juga harus diberikan akses dan kesempatan dalam hal memperoleh informasi tentang berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini perlu dilakukan sebagai amanah dari Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 pasal 72 : Kepala Daerah menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Saudara Gubernur yang kami hormati,

Setelah kami menyimak penjelasan tentang proses penyusunan dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimaksud, maka pada prinsipnya kami dapat memahami substansi akan pentingnya pengajuan Raperda sebagai upaya untuk lebih memberikan pengaturan dan kepastian hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dari pelaksanaan di lapangan oleh semua pemangku kepentingan. Sebelum mengakhiri menyampaikan pandangan umum ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut :

1. Meskipun lebih baik dari realisasi PAD Tahun Anggaran 2018, untuk SOPD yang bertugas menghimpun PAD agar bekerja lebih terukur dan sistimatis demi meng-optimalkan potensi pendapatan daerah ke depan. Sehingga Pendapatan Daerah kedepannya lebih dapat ditingkatkan lagi.
2. Gubernur Kalimantan Tengah untuk menganalisa kembali secara cermat di dalam temuan LHP, atas Sistem Pengendalian Intern di dalam LHP masalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan hal-hal yang berkaitan dengan tertib administrasi hendaknya diperbaiki, sedangkan hal yang berpotensi merugikan Pemerintah Daerah hendaknya diambil kebijakan yang tegas.
3. Realisasi belanja bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah yang jauh dari target, dimana anggaran setelah perubahan Rp. 885 milyar lebih; sementara realisasi baru Rp. 714 milyar lebih. Hal itu tentu sangat mengganggu perencanaan dan target pendapatan Pemerintah Kabupaten / Kota. Mohon dijelaskan.
4. Berkaitan dengan piutang yang tidak tertagih Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ada dalam neraca. Mohon penjelasan.
5. Belum ada kejelasan tindaklanjut yang konkrit dari pemerintah provinsi untuk menarik kembali dana kas

provinsi tahun 2018 yang berasal dari sumbangan pihak ketiga (SPK) sebesar Rp. 15,9 Milyar lebih dan tertahan sampai saat ini di rekening bareskrim Mabes Polri. Hal ini juga telah dipertanyakan DPRD Provinsi Kalteng pada pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018 yang lalu. Mohon penjelasan ?

6. Pemerintah provinsi belum sepenuhnya berkomitmen dalam mendorong peningkatan pembangunan di Kabupaten / Kota melalui penyaluran dana bagi hasil. Hal ini terlihat adanya peningkatan tunggakan / utang pemerintah provinsi dalam penyaluran dana transfer bagi hasil yang menjadi hak keuangan kabupaten / kota jika dibandingkan tahun anggaran 2018, tunggakan transfer bagi hasil pada tahun 2019 sebesar Rp. 233,15 Milyar lebih, lebih tinggi dari tahun 2018 yaitu Rp. 211.74 Milyar, hal ini sedikit banyak telah mengganggu manajemen kas dan pendanaan program pembangunan di kabupaten / kota.
7. Pemerintah provinsi belum sungguh-sungguh meningkatkan performa dan memenuhi tata kelola maupun profesionalitas PT. Banama Tingang Makmur; kinerja PT. Banama Tingang Makmur masih memprihatinkan karena tidak ada laba tahun 2019, BUMD ini tidak mampu memberikan bagian laba yang rasional untuk peningkatan PAD dan berbanding terbalik jika dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal pemerintah

- provinsi Kalimantan Tengah yang telah diinvestasikan kepada BUMD tersebut.
8. Pemerintah provinsi belum mampu berupaya secara maksimal untuk merevitalisasi kinerja BUMD sesuai target dalam RPJMD. Hal tersebut terlihat dari capaian target / realisasi pendapatan sebesar Rp. 78,92 Milyar. Hal itu yang masih jauh dari capaian / target yang diinginkan pemerintah provinsi pada tahun 2019 sebesar Rp. 275 Milyar lebih sebagaimana Perda No. 1 Tahun 2017 Tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, mohon penjelasan ?
 9. Dampak pemerintah provinsi yang tidak membuat pos pembentukan dana cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dalam APBD telah menyedot anggaran belanja langsung dalam APBD Tahun 2019, yaitu dengan melakukan pemotongan anggaran belanja diberbagai SOPD. Hal tersebut berakibat tidak tercapainya secara maksimal berbagai target capaian – capaian tahun 2019 dalam RPJMD, mohon penjelasan ?
 10. Sejauh mana komitmen Saudara Gubernur tentang Rencana Revisi Rencana Tata Ruang Provinsi, sebagaimana janji kampanye dan Visi Misi Pemerintah Kalteng BERKAH. Mohon dijelaskan.
 11. Pelaksanaan PUTUSAN Pengadilan atas nama MARIA DOYA ADEN, A. Par. M.Si dkk, yang telah memiliki

kekuatan hukum (inkrah) terhadap Pejabat ASN yang dinonjobkan : Dasar Keputusan PTUN Palangka Raya Nomor : 09/G/2017/PTUN. PLK tanggal 18 Agustus 2017 tentang Putusan Pengadilan PTUN Palangka Raya sampai dengan PUTUSAN Peninjauan Kembali (PK) Nomor 8 PK/TUN/2019 tanggal 31 Mei 2019, dari Putusan tersebut seluruhnya dimenangkan oleh Penggugat. Yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti atau dieksekusi oleh Tergugat (Gubernur Kalimantan Tengah). Mohon dijelaskan.

Saudara Gubernur, Pimpinan Rapat Paripuna serta hadirin sekalian yang terhormat.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut diatas, maka kami Fraksi PDI Perjuangan, dengan ini menyatakan bahwa kami dapat menerima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 dan Raperda dimaksud, untuk di proses dan dibahas dalam tahapan lebih lanjut, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku serta jadwal yang akan ditentukan. Kami berharap agar pembahasan yang lebih intensif dan mengarah pada hal-hal yang bersifat teknis akan dapat kita lakukan pada Rapat Kerja Komisi - Komisi Dewan, yang akan kita lakukan pada waktunya nanti.

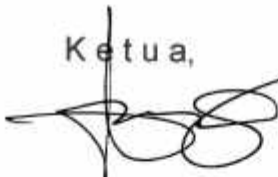
Demikianlah Pemandangan Umum kami sampaikan dalam forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini.

Sekian dan Terima Kasih
Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarokatuh.

MERDEKA !!!

**FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

Ketua,


Y. FREDDY ERING.



Juru Bicara,


FERRY KHAIDIR.

Sekretaris

ARTABAN.



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)
PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA KE-2
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020
TANGGAL 2 JULI 2020

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)
PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019
DALAM RAPAT PARIPURNA KE-3
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020
TANGGAL 2 JULI 2020

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yth. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota DPRD
Provinsi Kalimantan Tengah;

Yth. Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;

Yth. Saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah;

Yth. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

Yth. Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;

Yth. Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Di Kota
Palangka Raya;

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Yth. Para Asisten Setda Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
Ahli Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;

Yth. Para Kepala Dinas/Badan/Unit SOPD Provinsi Kalimantan Tengah;

Yth. Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Prov. Kalteng;

Yth. Bapak/Ibu Undangan serta hadirin sekalian yang kami hormati.

Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan berbagai nikmat-Nya bagi kita sekalian.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat yang berkenan memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, untuk menyampaikan Pemandangan Umum ini.

Kami menyampaikan penghargaan kepada saudara Gubernur Kalimantan Tengah, yang pada tanggal 1 Juli 2020 kemarin, telah menyampaikan pidato pengantar terhadap LPJ Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2019.

Pimpinan Rapat Paripurna, Saudara Gubernur/Wakil Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati.

Setelah menyimak dan mempelajari Pidato Pengantar terhadap LPJ Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya, Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berpendapat, bahwa LPJ Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019,

TELAH MEMENUHI SYARAT, SEHINGGA BISA DITERIMA,

untuk dibahas lebih lanjut, sesuai dengan mekanisme di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun Fraksi Partai Golongan Karya perlu mengemukakan beberapa catatan penting sebagai berikut.

1. LHP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan adanya beberapa temuan penting.

Mohon penjelasan untuk pertanyaan berikut.

- 1.1. Bagaimana tindak lanjut Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap beberapa temuan BPK tersebut?
- 1.2. Langkah apa saja yang diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar temuan yang sama tidak terulang di kemudian hari?

2. Dengan mendapatkan opini WTP dari BPK, kami melihat bahwa dari sudut teknis-akuntansi, terbukti bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan APBD dengan baik.

Namun kami **belum** melihat adanya keterkaitan antara pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021: Kalimantan Tengah **Maju, Mandiri & Adil** untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH. Contoh:


- 2.1. Dari sudut **sub-visi mandiri**, khususnya **kemandirian ekonomi**, sampai kini Provinsi Kalimantan Tengah masih sangat tergantung kepada pasokan berbagai macam kebutuhan **bahan pokok** dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan provinsi lainnya.

Mohon penjelasan.

2.2. Dari **sub-visi keadilan**, khususnya pada sektor pendidikan, ternyata anggaran pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, secara signifikan lebih banyak dialokasikan kepada Belanja Tidak Langsung.


Padahal untuk meningkatkan mutu pendidikan, seharusnya proporsi alokasi anggaran Belanja Langsung harus jauh lebih tinggi dari alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung.

Mohon penjelasan.

 Dalam APBD murni 2019, sempat tercatat dana sumbangan pihak ketiga, sebesar **16 milyar lebih**. Namun dana sebesar itu sampai saat ini berada di Bareskrim, dan **tidak jelas status dana dan tindak lanjut penyelesaiannya**.

Mohon penjelasan.

4. Mohon penjelasan tentang langkah optimalisasi pendapatan BUMD agar mencapai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

 Kami masih ingat, bahwa Saudara Gubernur mempunyai janji kampanye, untuk merevisi Tata Ruang Provinsi. Hal tersebut tentu sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan infrastruktur dan laju investasi, serta sesuai dengan Visi Provinsi Kalimantan Tengah, untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat, Menuju Kalimantan Tengah BERKAH. Namun sayang, sampai kini janji tersebut belum dilaksanakan.

Mohon penjelasan mengapa janji kampanye tersebut sampai kini belum dipenuhi.

6. Mohon penjelasan, pemanfaatan SILPA Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan apa saja?

Pimpinan Rapat Paripurna, Saudara Gubernur/Wakil Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati.

Demikian beberapa hal yang menjadi catatan-catatan penting dan pertanyaan dari Fraksi Partai Golongan Karya.

Kami mohon dengan sangat agar pada saatnya, Saudara Gubernur memberikan jawaban sebagaimana mestinya, terhadap semua catatan dan pertanyaan kami dari Fraksi Partai Golongan Karya.

Sekian dan terimakasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palangka Raya, 2 Juli 2020

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ketua



Ir. H. ABDUL RAZAK

Sekretaris

H. MARUADI, SH., S.Sos.

Juru Bicara

H. MARUADI, SH., S.Sos.



PEMANDANGAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019.



Disampaikan pada Rapat Paripurna ke - 3
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020.



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TENTANG :

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Disampaikan Pada RAPAT PARIPURNA KE - 3 MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020 DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, Rabu tanggal 2 Juli 2020.

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.

*Tabe Selamat Lingu Nalatai, Salam Sujud Karendem Malempang, Adil
Ka' Talino, Bacuramin Ka'Saruga, Basengat Ka' Jubata.*

Salam Sejahtera dan Selamat Pagi untuk kita sekalian.

Yang Terhormat :

WAKIL

- 1. Saudara Gubernur Kalimantan Tengah.
- 2. Saudara-saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, atau yang mewakili;
- 3. Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, atau yang mewakili;
- 4. Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, atau yang mewakili;
- 5. Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
- 6. Saudari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, atau yang mewakili;
- 7. Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

- Saudara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, atau yang mewakili;
- Saudara Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, atau yang mewakili;
- Saudara Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Palangka Raya, atau yang mewakili;
- Saudara Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili;
- Saudara Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Palangka Raya atau yang mewakili;
- Para Asisten Sekretaris Daerah/Kepala Biro /Kepala Badan/ Kepala Dinas / Inspektorat dan Kepala Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Saudara-saudara Staf Ahli Gubernur Dilingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili;
- Saudara-saudara Tim Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi;
- Para Wartawan media cetak dan elektronik , serta para Undangan sekalian yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk mempersembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna ke - 3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Acara Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah

yaitu Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

Semoga acara ini berjalan lancar dan mendapat berkah dari Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa sehingga mencapai hasil sebagaimana yang diprogramkan, guna melanjutkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah yang kita cintai sebagai upaya mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah yang lebih maju, bermartabat, dengan rakyatnya yang semakin sejahtera lahir dan bathin.

Saudara Gubernur, Pimpinan Rapat Paripurna dan hadirin yang terhormat,

Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada fraksi ~~kami~~^{Demokrat} untuk menyampaikan PEMANDANGAN UMUM ini.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 dalam Rapat Paripurna ke - 2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saudara Gubernur selaku Pimpinan Daerah telah menyampaikan Pidato Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah ~~tersebut~~ ^{tentang LPJ APBD TAHUN 2019.}

Setelah mendengarkan Pidato dan Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan langsung oleh Saudara Gubernur H. Sugianto Sabran pada tanggal 1 juli tahun 2020 beserta Lampiran dokumen yang dikeluarkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berupa *IHPS II (Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019)* dan *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum Dalam Mewujudkan Terselenggaranya wajib Belajar 12 Tahun, Tahun ajaran 2016 -2019 Pada Provinsi Kalimantan Tengah* Tanggal 13 Desember 2019, kami fraksi Partai Demokrat menanggapi sebagai berikut :

Pada laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan Saudara Gubernur H. Sugianto Sabran pada tanggal 1 juli tahun 2020, ada beberapa hal yang belum tertuang didalam laporan Pertanggungjawaban dan masih menyisakan pertanyaan yang sampai dengan hari ini, belum kami temukan jawaban serta penjelasan secara administratif dan konkrit yang kami anggap penting untuk bisa kita ketahui bersama agar tidak menimbulkan kesalah fahaman dan terjalin nya komunikasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun hal-hal tersebut yang kami maksud adalah :

1. Didalam laporan Pertanggungjawaban yg disampaikan Saudara Gubernur H. Sugianto Sabran pada tanggal 1 juli tahun 2020, kami belum mendapat penjelasan mengenai penggunaan Dana sebesar **Rp 16.124.183.587,70,-** (Enam belas milyar seratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma tujuh puluh rupiah) yang berasal dari bantuan (sumbangan) Pihak Ketiga yang sempat tertuang di dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Murni tahun anggaran 2019.
2. Tidak adanya penjelasan mengenai proses pengusutan dan status terakhir Dana **Rp 16.124.183.587,70,-** (Enam belas milyar seratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma tujuh puluh rupiah) lebih tersebut diatas yang pernah ditarik dari kas daerah pada tanggal 9 November 2018 untuk dititipkan di Direktorat Tipikor Bareskrim Polri sebagai barang titipan sumbangan pihak ke tiga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Tidak tertuangnya penjelasan yang berkaitan piutang tidak tertagih Pemerintah Provinsi Kalimantan ~~Tengah~~ ^{Tengah} yang ada dalam neraca.
4. Sebagai salah satu Visi Misi Pemerintah Daerah yaitu "Kalteng Berkah" , kami ingin menanyakan komitmen saudara Gubernur H. Sugianto Sabran di bidang Infrastruktur khususnya perencanaan Revisi Rencana Tata Ruang yang berpengaruh besar terhadap perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan bagaimana kaitan nya dengan

- kelancaran Investasi yang tentunya sudah menjadi Program Kampanye Saudara Gubernur H. Sugianto Sabran sebelumnya.
5. Tidak adanya penjelasan mengenai Realisasi belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/ kota se Kalimantan Tengah tahun 2019 yang jauh dari target, dimana anggaran setelah perubahan sebesar **Rp 885.356.000.000,-** (Delapan ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) sementara realisasi yang dicapai kurang dari angka tersebut, yaitu senilai **Rp 714.590.000.000,-** (Tujuh ratus empat belas milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dalam hal ini tentu saja mengganggu perencanaan dan target pendapatan pemerintah kabupaten/ kota se Kalimantan Tengah yang sudah disusun.

 6. Sebagai Mitra dari Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan pada paripurna yang akan datang dalam hal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban oleh Gubernur sebaiknya tidak di wakikan oleh pihak lain atau pengganti yang ditunjuk oleh gubernur, karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban oleh Gubernur hanya bisa di sampaikan oleh gubernur dan tidak bisa digantikan terkecuali gubernur yang dimaksud berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Hal tersebut tertuang dalam BAB XIV (Empat belas) bagian 3 pasal 217.

7. Kami juga mempertanyakan Pekerjaan fisik, baik multi ^{years} ~~yes~~ tahap pertama maupun pekerjaan regul~~ar~~, apakah sudah selesai 100 % secara administrasi maupun fisik. Mengingat terdapatnya catatan dari BPK dimana pekerjaan melebihi masa kontrak dan ketidak sesuaian spek.
8. Dalam pertemuan Gubernur dengan Pimpinan Perguruan Tinggi se Kalimantan Tengah pada waktu yang lalu, ada pernyataan saudara Gubernur yang menyatakan bahwa Pokok pikiran Aspirasi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di pangkas atau dihapus 100 %. Namun dalam kenyataannya bahwa ada anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang tetap melaksanakan program kegiatan atas aspirasi anggota DPRD tersebut, Perlu kami tegaskan bahwa Pokok Pikiran Aspirasi anggota DPRD adalah amanah undang-undang yang menampung aspirasi dari masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD dan bukan merupakan proyek dari anggota DPRD.

Poin-poin tersebut diatas kami sampaikan dimaksudkan sebagai bentuk upaya kami agar Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjalin kerjasama yang baik, bersinergi dan saling mendukung dalam proses peningkatan pembangunan di segala bidang di provinsi Kalimantan Tengah yang kita cintai ini.

Penjelasan-penjelasan yang kami butuhkan kiranya dapat segera ditambahkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban oleh

Gubernur yang akan sangat membantu kami dalam menyusun program dan pelaksanaan program penyelenggaraan Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan .

Tidak lupa kami ucapkan selamat atas Hasil penilaian yang diberikan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendapat Opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" selama 6 Tahun berturut-turut sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 , yang tentunya penilaian tersebut juga menjadi tolak ukur kita untuk bisa lebih baik lagi pada tahun-tahun yang akan datang.

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Berkenaan dengan naskah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimaksud sebagaimana telah kami uraikan diatas, Fraksi Partai Demokrat menyatakan

DAPAT MENERIMA DENGAN CATATAN , adanya klarifikasi dan penjelasan atas pertanyaan kami tersebut .

Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Demikian tanggapan dan pertanyaan kami, yang disampaikan untuk mendapatkan hal yang paling baik bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat; atas jawaban Saudara Gubernur kami mengucapkan terima kasih. Kami yakin kesejahteraan dan kemajuan dan peningkatan martabat masyarakat akan terwujud karena "Bersama, Kita Bisa".



Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.

Palangka Raya, 2 Juli 2020

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ketua

Sekretaris


H.M. SRIOSAKO, S.Sos, MH


Ir. H. MUHAJIRIN, M.P



Juru Bicara


SISWANDI



FRAKSI NasDem
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. S. Parman No. 2 Kode Pos 73112 Tlp. (0536) 3236320
Fax. (0536) 3236239 Palangka Raya - Kalimantan Tengah

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI NasDem DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera dan Selamat Pagi.

Om Swastiastu.

Taba Selamat Lingu Nalatai, Salam Sahujud Karendem Malempang.

Adil Katalino, Bacuramin Kasuraga, Basengat Kajubata.

- YTH. SAUDARA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH ;**
- YTH. SAUDARA UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FKPD)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;**
- YTH. SAUDARA KETUA DAN WAKIL KETUA SERTA SELURUH ANGGOTA DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;**
- YTH. SAUDARA TIM AHLI/KELOMPOK PAKAR DAN TENAGA AHLI FRAKSI
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;**
- YTH. SAUDARA SEKRETARIS DAERAH/PARA ASISTEN/STAF AHLI/KEPALA
BIRO SEKRETARTIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;**

- YTH. SAUDARA PARA KETUA/KEPALA INSTANSI VERTIKAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
- YTH. SAUDARA PARA PIMPINAN/KEPALA/DIREKTUR PERBANKAN/BUMD/PERUSDA DI PALANGKARAYA;
- YTH. SAUDARA PARA REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI NEGERI/SWASTA DI PALANGKA RAYA;
- YTH. SAUDARA PARA TOKOH MASYARAKAT/TOKOH PEMUDA DAN WARTAWAN/MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI;

SALAM RESTORASI...!

Pertama-tama sebelum kami menyampaikan Pemandangan Umum ini, ijinilah kami mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua berupa kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsi kita masing-masing.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna Dewan hari ini yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

Sdr. Gubernur, Pimpinan Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Fraksi Partai NasDem menyampaikan terima kasih atas disampaikannya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

Anggaran 2019, yang disampaikan oleh Saudara Gubernur Kalimantan Tengah dalam Pidato Pengantar pada Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020. Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan selamat dan sukses atas kerja dan kinerja Gubernur beserta segenap Organisasi Perangkat Daerah yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019, semoga prestasi ini berdampak positif dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan.

Sdr. Gubernur, Pimpinan Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Memperhatikan pengantar Gubernur Kalimantan Tengah mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 beserta dokumen lampiran pengantar Gubernur, maka perkenankan kami Fraksi Partai NasDem memberikan tanggapan, permohonan penjelasan dan saran dalam rangka peningkatan kualitas kerja dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah yang akan datang, kami sampaikan dalam pokok-pokok pikiran sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.4,990 Trilyun lebih atau sebesar 100,61% dari target Pendapatan sebesar Rp.4,959 Trilyun lebih, Fraksi Partai NasDem mengapresiasi atas tercapainya target pendapatan daerah tahun anggaran 2019. Namun Untuk kedepan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah jangan hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, tapi juga harus meningkatkan Pendapatan dari keuntungan atau kontribusi Badan Usaha

Milik Daerah maupun badan-badan usaha lainnya serta pengelolaan Aset/ kekayaan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu kami mohon penjelasan atas hal-hal tersebut dibawah ini, antara lain :

a. Terkait dana sumbangan pihak ketiga sebesar 16 miliar lebih yang ada di Bareskrim, bagaimana status dan tindak lanjutnya, karena dana tersebut sudah masuk dalam Rencana Penganggaran Tahun 2019. Mohon penjelasan.

b. Berkaitan dengan piutang tidak tertagih Pemprov yang ada dalam neraca APBD 2019, mohon penjelasan.

2. Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.4,731 Trilyun yang teralisasi sebesar Rp.4, 312 Trilyun lebih, harus dilakukan evaluasi seberapa efektif anggaran belanja tersebut dapat melaksanakan prioritas pembangunan pada tahun 2019 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, percepatan pengurangan angka kemiskinan dengan kemandirian pangan dan energi. Program dan kegiatan serta alokasi belanja yang direalisasikan belum mampu mencapai tujuan utama RKPD yakni peningkatan kesejahteraan rakyat secara efektif.

3. Anggaran Transfer Daerah

Anggaran transfer daerah sebesar Rp.922,606 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp.751,187 Miliar lebih atau 81.42% tentu akan sangat mempengaruhi perencanaan di daerah, mohon penjelasan kepada Saudara Gubernur kenapa sampai tidak bisa terealisasi 100% Anggaran Transfer Daerah.

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.611,326 Milyar yang dapat dimaknai dengan 2 (dua) sisi yang berbeda, bisa

bermakna positif (efisiensi anggaran) atau negatif (salah perhitungan, salah manajemen, salah program, menaikkan perhitungan anggaran), apabila diklasifikasikan dalam aspek efisiensi, maka ada 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:

a. Efisiensi dengan wajar, memiliki makna program terlaksana dan terjadi penghematan anggaran karena faktor eksternal (misal turunnya harga atau peraturan);

b. Efisiensi dengan tidak wajar, memiliki makna program terlaksana dan terjadi penghematan anggaran karena faktor internal (misal dalam penyusunan anggaran sudah dinaikan sekian persen dari harga/nilai dasar/baku);

c. Tidak efisien, memiliki makna program bisa terlaksana atau tidak terlaksana dan tidak terjadi penghematan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada saudara Gubernur agar dapat memberikan penjelasan makna Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 611,326 Milyar tersebut, dan mohon selanjutnya dilakukan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan yang menghasilkan sisa anggaran, serta apakah masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan berdasarkan pada rencana strategis dan rencana operasional serta strategi dan target pencapaian yang sinergi dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Rencana Strategi dan rencana operasional institusi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan visi kepemimpinan Gubernur? Fraksi Partai NasDem berharap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun anggaran 2019 bermakna positif.

Terakhir kami mohon penjelasan sejauh mana komitmen saudara Gubernur tentang rencana Revisi Rencana Tata Ruang Provinsi mengingat kepentingan

perencanaan pembangunan infra struktur maupun kelancaran investasi, ini sesuai janji kampanye dan sekaligus menjadi visi misi Pemerintah, Kalteng Berkah

Sdr. Gubernur, Pimpinan Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Secara yuridis normatif, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun secara substantif masih diperlukan penjelasan saudara Gubernur. Fraksi Partai NasDem dapat menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 Namun Fraksi Partai NasDem juga meminta saudara Gubernur dapat menindaklanjuti dan memberikan penjelasan yang lebih transparan, objektif dan akuntabel terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan dalam Pandangan Umum ini.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai NasDem DPRD Prov. Kalimantan Tengah yang dapat kami sampaikan dalam forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini, atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 02 Juli 2020

FRAKSI PARTAI NasDem

DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ketua,

Sekretaris,

BRYAN ISKANDAR, SE.

dr. NIKSEN S. BAHAT

Secara yuridis normatif, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun secara substantif masih diperlukan penjelasan saudara Gubernur. Fraksi Partai NasDem dapat menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 Namun Fraksi Partai NasDem juga meminta saudara Gubernur dapat menindaklanjuti dan memberikan penjelasan yang lebih transparan, objektif dan akuntabel terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan dalam Pandangan Umum ini.


Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai NasDem DPRD Prov. Kalimantan Tengah yang dapat kami sampaikan dalam forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini, atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Palangka Raya, 02 Juli 2020

FRAKSI PARTAI NasDem

DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ketua,

BRYAN ISKANDAR, SE.


Juru bicara,

BRYAN ISKANDAR, SE

Sekretaris,

dr. NIKSEN S. BAHAT



FRAKSI GERINDRA

DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TERHADAP RAPERDA TENTANG :**

**1. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi, Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang kami Hormati :

- Sdr. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah,
- Sdr. Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah,
- Sdr. Ketua, Wakil-wakil Ketua serta Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,
- Forum Koordinasi Kalimantan Tengah.
- ✕ - Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Tengah,
- ✕ - Kepala Perwakilan BPK RI di Palangka Raya,
- ✕ - Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah,
- ✕ - Sdr. Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Palangka Raya,

- ✓- Para Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Provinsi, Kepala
- ✓ Badan Dinas/ Dinas / Biro / Kalimantan Tengah dan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah.
- ✓- Tenaga Ahli & Tenaga Pakar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,
- ✓- Pimpinan Partai Politik, Organisasi Massa, Organisasi Pemuda, Organisasi serta lembaga swadaya Masyarakat di Kalimantan Tengah,
- ✓- Rekan-rekan media massa, baik media cetak maupun media elektronik,
- ✓- Para Undangan, serta hadirin sekalian yang berbahagia,

SALAM INDONESIA RAYA !!!

Mengawali Pemandangan Umum Fraksi ini izinkan kami menyampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, Karena hanya atas izin dan perkenaan-Nya jualah kita dapat berkumpul diruang rapat paripurna untuk mendengarkan pendapat umum Anggota Dewan Melalui Fraksi-fraksi Pendukung Dewan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Bersama ini pula kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna Dewan atas kesempatan yang diberikan dalam rangka menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, Insya Allah waktu dan kesempatan yang berharga ini akan kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana tugas dan tanggung jawab kami.

HADIRIN, RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG BERBAHAGIA

Percepatan infrastruktur daerah sangat penting untuk membangun ekonomi daerah terpencil karena dampak yang ditimbulkan memberi efek ganda dalam kehidupan masyarakat antara lain menurunnya inflasi, terbukanya akses jalur perdagangan dimana akan membuka berbagai peluang usaha bagi masyarakat yang jeli terhadap perubahan. Seiring dengan percepatan infrastruktur tentunya perlu didukung dengan komitmen semua pihak tanpa ada unsur kepentingan pribadi atau golongan didalamnya. Dan perkembangan Infrastruktur itu sendiri berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah

Fraksi partai Gerindra berpendapat :

- 1. Apresiasi terhadap hasil WTP agar kedepan dipertahankan dan bahkan di tingkatkan untuk bisa menghilangkan beberapa catatan catatan yang masih muncul**
- 2. Hasil temuan agar dapat diselesaikan diwaktu 2 bulan agar tidak berdampak hukum dan ini juga harus menjadi perhatian SOPD jangan sampai terjadi temuan yang sama dan berulang pada setiap tahun/perlu dihindari**
- 3. Agar kepercayaan Pemerintah Pusat untuk Menjadikan Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas sebagai sumber pangan Nasional bisa dikelola sebaik-baiknya secara profesional**

dengan sebijak mungkin memperhatikan kesejahteraan Masyarakat setempat tanpa harus mengorbankan kepentingan Nasional artinya Profesionalisme masyarakat petani yang harus menjadi pertimbangan utama untuk suksesnya berbagai macam jenis tanaman yang akan dikembangkan.

4. Segera dilakukan rencana penggunaan SILPA sesuai hasil Audit BPK dalam anggaran perubahan tahun 2020 mengacu pada peraturan per UU yang berlaku

Beberapa pertanyaan tentang LPJ :

1. Masalah dana sebesar 16 Milyar sumbangan pihak ke III (tiga) yang ada di Bareskrim, bagaimana status dan tindak lanjutnya, karena sudah sempat masuk dalam APBD murni 2019.
2. Berkaitan piutang tidak ditagih Pemprov yang ada dalam Neraca
3. Sejauh mana komitmen saudara Gubernur tentang rencana Revisi, Rencana Tata Ruang Provinsi mengingat kepentingan perencanaan pembangunan infrastruktur maupun kelancaran investasi ini sesuai janji kampanye dan sekaligus menjadi visi misi Pemerintah Kalteng Berkah.

- 4 Realisasi belanja bagi hasil kepada pemerintah Kabupaten/Kota se Kalteng tahun 2019 yang jauh dari target dimana anggaran setelah perubahan Rp885 m lebih sementara realisasi Rp714 m, hal itu tentu mengganggu perencanaan dan target pendapatan pemerintah kabupaten/kota. , MOHON PENJELASAN ?

HADIRIN, RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG BERBAHAGIA

Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih atas segala kesabaran dan perhatiannya, apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penyampaian pendapat umum Fraksi ini, kami mohon maaf.
Dan Fraksi Gerindra Mengucapkan Atas Ujrah Tahun 2019.
Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita sekalian.

Sekian dan terima kasih

Wabillahi taufiq Wal Hidayah

Wassalam'alaikum Wr Wb

SALAM INDONESIA RAYA !!!

Palangka Raya, 02 juli 2020

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA,



H.ACHMAD RASYID

FRAKSI GERINDRA



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIS,



JAINUDIN KARIM.SE

JURU BICARA,



JAINUDIN KARIM.SE



**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jln. S. Parman No. 2 Palangka Raya, Kalimantan Tengah

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TERHADAP

**PIDATO PENGANTAR GUBERNUR TENTANG PERATURAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) PELAKSANAAN APBD PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019**

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Terhormat :

1. Saudara Gubernur / Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
2. Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Saudara-saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. x Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah.
5. x Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

6. x Saudara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah.
7. x Saudara Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
8. x Saudara Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Saudara Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah.
10. Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Kepala Dinas/ Badan/ Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
12. x Saudara Rektor/ Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta sekota Palangka Raya.
13. Saudara Kabinda Kalimantan Tengah.
14. Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
15. x Tokoh Masyarakat, Tokoh Daerah, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita dan Rekan Wartawan.
16. Para Undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, izinkan kami untuk mengajak kita semua mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Taufik dan Hidayah-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini, dan bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dalam rangka terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Tengah yang kita cintai ini.

Sebelum kami menyampaikan pemandangan umum ini izinkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan

Tengah Tahun Anggaran 2019 dan kami berharap mempertahankan predikat tersebut.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang Paripurna ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Laporan Peranggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.**

Saudara Gubernur atau yang mewakili, Pimpinan Dewan dan Anggota serta hadirin yang kami hormati.

Terkait dengan realisasi Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan bahwa realisasi Pendapatan terealisasi sebesar 4,990 triliun lebih atau 100,61 % akan tetapi pada segi pendapatan transfer hanya terealisasi sebesar 3,191 triliun lebih atau 97,96% dari target sebesar 3,257 triliun lebih, untuk itu kami meminta penjelasan terhadap tidak tercapainya target tersebut.

Sedangkan untuk Anggaran Belanja Sebesar 4,731 triliun lebih dengan realisasi sebesar 4,312 triliun lebih atau 91,16% sedangkan Belanja Modal terealisasi sebesar 1,293 triliun atau 95,63% dari target 1,352 triliun lebih untuk itu meminta penjelasan terkait hanya terealisasi 95,63%.

Untuk Anggaran Belanja Tidak terduga hanya terealisasi sebesar 4,382 Milyar atau 35,26% dari target sebesar 12,429 milyar kami melihat hal ini sebagai pengalokasian anggaran lebih.

Terhadap Anggaran Transfer sebesar 922,606 milyar lebih yang terealisasi sebesar 751,187 milyar lebih atau 81,42% yang terdiri dari transfer Bagi Hasil Pendapatan direalisasi sebesar 714,59 milyar lebih

atau 80,71% dari target 885,356 milyar lebih dan transfer bantuan keuangan direalisasikan sebesar 36,597 milyar lebih atau 98,25% dari target 37,250 milyar hal tersebut tidak terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini menyebabkan bantuan keuangan tidak dilaksanakan dengan baik sehingga menyebabkan target pencapaian yang kurang maksimal.

Selain hal tersebut diatas untuk mendapatkan penjelasan dari pihak eksekutif kami juga menanyakan terhadap :

1. Sampai saat ini kami belum melihat kepastian untuk penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ?
2. Terkait sumbangan Pihak Ketiga yang sempat masuk dalam APBD Murni TA 2019 kami mohon untuk perjasannya ?
3. Terkait banyak isu permohonan dari masyarakat berupa Ijin Galian C melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalteng yang pelayanan kurang maksimal sehingga perlu dilakukan pembenahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Provinsi Kalimantan Tengah dapat menerima Pidato Pengantar Raperda **Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Laporan Peranggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran** untuk dibahas sesuai mekanisme berdasarkan Tata tertib DPRD Provinsi Kalteng yang berlaku dan jadwal pembahasan yang sudah ditentukan.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) ini kami sampaikan, terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan dan nantinya akan memberikan jawaban dan penjelasan dari apa yang disampaikan.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa demikian kami sampaikan dan terima kasih.

Akhirul kalam,

Wallahul muwafik ilaa aqwamitthoriq,

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Sekian dan terima kasih.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, 2 Juli 2020

Ketua,

Sekretaris,

H. PURMAN JAYA, S.Sos

FAJAR HARIADY

Juru Bicara: ~~FAJAR HARIADI~~ H. PURMAN JAYA



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI GABUNGAN,
PAN, PKS, PPP, PERINDO, HANURA (FGP4H)
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TERHADAP

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi hadirin sekalian

- YTH. SAUDARA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH ;
- ✓ - YTH. SAUDARA WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH ; ✓
- ✓ - YTH. SAUDARA UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ATAU YANG MEWAKILI ;
- YTH. SAUDARA KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH ATAU YANG MEWAKILI ;
- YTH. SAUDARA KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH ATAU YANG MEWAKILI ;
- ✓ - YTH. PARA WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ;

1

- ✓ - YTH.SAUDARI KEPALA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI PALANGKA RAYA ATAU YANG MEWAKILI ;
- YTH.SAUDARA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- YTH.SAUDARA KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ATAU YANG MEWAKILI ;
- YTH.SAUDARA KETUA KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ATAU YANG MEWAKILI ;
- ✓ - YTH.PARA REKTOR PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA DI KOTA PALANGKA RAYA ATAU YANG MEWAKILI ;
- ✗ - YTH.SAUDARA KEPALA BADAN INTELIJEN NASIONAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ATAU YANG MEWAKILI ;
- ✓ - YTH.SAUDARA KEPALA KANTOR PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI PALANGKA RAYA ATAU YANG MEWAKILI ; ✓
- ✓ - YTH.PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH / KEPALA BIRO / KEPALA BADAN / KEPALA DINAS / INSPEKTORAT DAN KEPALA KANTOR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ; ✓
- ✓ - YTH.SAUDARA-SAUDARA STAF AHLI GUBERNUR DILINGKUNGAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ;
- ✓ - YTH.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ATAU YANG MEWAKILI ;
- ✓ - YTH.SAUDARA-SAUDARA TIM AHLI DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI ;
- ✓ - YTH.PARA WARTAWAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA UNDANGAN SEKALIAN YANG SAYA MULIAKAN.

Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Dewan ke- 3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka

2

penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019

Perkenankan Fraksi Gabungan (FGP4H) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, mengucapkan Selamat Ulang Tahun Bayangkara yang Ke-74, semoga semakin Profesional dan Modern. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas kinerja keuangan Tahun 2019 teriring doa dan harapan semoga opini WTP dapat terus di pertahankan dimasa masa selanjutnya. Turut berduka mendalam atas meninggalnya tenaga Medis dalam menjalankan tugas menangani pandemi covid 19 yang saat ini terjadi, semoga mendapat ampunan dari Allah, Tuhan YME dan diterima segala amal ibadahnya serta keluarga yang di tinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran

Saudara Gubernur, Pimpinan Rapat Paripurna Kami Hormati dan hadirin yang berbahagia

Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, merupakan kewajiban Saudara Gubernur Kalimantan Tengah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005, pasal 101 yang menegaskan bahwa *“Kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”*.

Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 ini merupakan Laporan yang mampu menjelaskan

seberapa jauh capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan amanah masyarakat Kalimantan Tengah yang tertuang dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan ayat (3), pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 2005, "*Laporan keuangan yang disampaikan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas Laporan Keuangan kepada Kepala Daerah melalui PPKD.....*"

Penyampaian dokumen-dokumen tersebut merupakan bagian dari Akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran yang dilakukan oleh Saudara Gubernur bersama seluruh Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam Pelaksanaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Sidang paripurna yang kami hormati.

Sebagaimana kita sadari bersama, masyarakat Kalimantan Tengah terus menanti tekad dan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk melakukan pembangunan secara nyata dan merata, dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dan evaluasi program-program dan penganggaran yang dapat memacu laju perekonomian dan percepatan pembangunan di semua sector.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut Pemerintah Daerah harus memiliki paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, berorientasi pada kepentingan publik, agar Pemerintah Daerah

4

mampu melakukan perubahan mendasar secara internal untuk menciptakan sistem dan fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan wilayah terutama dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

Saudara Gubernur, Pimpinan Rapat Paripurna dan hadirin yang kami hormati.

Dalam kesempatan ini, perkenankan Fraksi Gabungan menyampaikan beberapa hal berupa saran, masukan, dan pertanyaan.

1. Kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selama ini mampu menggerakkan perekonomian daerah, dan dapat menampung tenaga kerja yang cukup signifikan jumlahnya, perlu mendapatkan perhatian khusus terutama saat pandemi terjadi di Indonesia bahkan dunia, hal ini bertujuan agar kegiatan usaha yang sedang di geluti tetap berlangsung dengan baik, Hadirnya pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sangat di perlukan sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan berusaha, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan .

Usaha apa yang akan dilakukan oleh Pemprov agar UMKM berdaya?

2. Masalah sumbangan 16 m lebih pihak ketiga yang ada di bareskrim, bagaimana status dan tindak lanjutnya, karena sdh sempat masuk dalam APBD murni 2019, Mohon Penjelasan
3. Berkaitan piutang tidak tertagih Pemprov yang ada dalam neraca, Mohon Penjelasan
4. Sejauh mana komitmen saudara Gubernur tentang rencana Revisi Rencana Tata Ruang Provinsi mengingat kepentingan perencanaan

pembangunan infra struktur maupun kelancaran investasi, ini sesuai janji kampanye dan sekaligus menjadi visi misi Pemerintah, Kalteng Berkah, Mohon penjelasan

5. Realisasi belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/ kota se kalteng tahun 2019 yang jauh dari target, dimana anggaran setelah perubahan Rp 885 m lebih sementara realisasi Rp 714 m lebih. Hal ini tentu mengganggu perencanaan dan target pendapatan pemerintah kabupaten/ kota. Mohon penjelasan
6. Saat ini kita menghadapi wabah covid 19, yang sudah barang tentu berdampak tidak baik di hampir semua sektor. Namun demikian kita harus melakukan terobosan- terobosan walau di saat sulit terutama sektor ekonomi dan pertanian, karena di khawatirkan jika pandemi tidak segera berakhir akan terjadi kerawanan pangan. Fraksi Gabungan menyambut baik adanya wacana food Eted di Kalteng. Dengan tetap pemberdayakan masyarakat disekitarnya sangat penting untuk dilibatkan dan ikut andil di dalamnya.
7. Dibidang kesehatan masih diperlukan kerja keras bersama untuk dapat menyediakan sumber daya manusia atau tenaga medis yang unggul, sarana dan prasarana yang memadai serta merata hingga ke pelosok dan terpencil di Provinsi Kalimantan tengah.
8. Pola koordinasi perlu terus dikembangkan ke depan baik koordinasi antar instansi maupun koordinasi dengan Kabupaten/Kota guna memperoleh hasil yang optimal, dalam pengalokasian anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dilapangan atau bersifat top-down, sehingga program yang di rencanakan tidak terkesan tumpang tindih.

Rapat Paripurna Dewan Yang Berbahagia

Berdasarkan penyampaian Pemandangan Umum FRAKSI GABUNGAN, PAN, PKS, PPP, PERINDO, HANURA (FGP4H) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019

----- **dapat kami terima** -----

untuk kemudian dilakukan pembahasan pada tingkat lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Gabungan PAN, PKS, PPP, PERINDO, HANURA (FGP4H).

Kepada hadirin sekalian kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas segala perhatiannya

Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita sekalian dalam mengemban amanah, dan apa yang kita kerjakan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.

Sekian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warrahtullahi wabarokatuh.

Palangka Raya, 2 Juli 2020

**FRAKSI GABUNGAN
PAN, PKS, PPP, PERINDO, HANURA (FGP4H)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Ketua,



Tomy Irawan Diran, SE



Sekretaris,



Sirajul Rahman, S.Hut, M.I.Kom

Juru Bicara



Natalia, ST

RAPAT PARIPURNA KE – 4
MASA PERSIDANGAN II (KEDUA) TAHUN SIDANG 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
=====

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Juli 2020
Pukul : 09.30 WIB
Sifat Sidang : Terbuka untuk Umum
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. S. Parman No. 02 Palangka Raya.

A c a r a : 1. Pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Rapat.
2. Jawaban Gubernur Kalimantan Tengah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2019.
3. P e n u t u p .

Pimpinan Rapat : Wiyatno, SP, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sekretaris : Tantan, SH, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Jumlah Anggota : 45 Orang.

1. Fraksi PDI-Perjuangan.	12	Orang
2. Fraksi Partai Golongan Karya.	7	Orang
3. Fraksi Partai Demokrat.	6	Orang
4. Fraksi Partai Nasdem.	5	Orang
5. Fraksi Partai Gerindra.	5	Orang
6. Fraksi PKB.	4	Orang
7. Fraksi Gabungan (FGP4H).	6	Orang

Hadir

: 27 Orang.

1. Wiyatno, SP	Fraksi PDI-Perjuangan
2. Drs. Yohannes Freddy Ering, M.Si	Fraksi PDI-Perjuangan
3. Ir. Yulilis	Fraksi PDI-Perjuangan
4. Drs. Duwel Rawing	Fraksi PDI-Perjuangan
5. Ina Prayawati, SE	Fraksi PDI-Perjuangan
6. Irawati, S.Pd	Fraksi PDI-Perjuangan
7. Hj. Maryani Sabran	Fraksi PDI-Perjuangan
8. Ferry Khaidir	Fraksi PDI-Perjuangan
9. Dra. Siti Nafsiah, M.Si	Fraksi Partai Golkar.
10. H. Maruadi, SH, S.Sos	Fraksi Partai Golkar.
11. H. Sudarsono, SH	Fraksi Partai Golkar.
12. H. Jimmy Carter	Fraksi Partai Demokrat.
13. Heri Santoso, ST	Fraksi Partai Demokrat.
14. Ir. H. Muhajirin, MP	Fraksi Partai Demokrat.
15. Siswandi	Fraksi Partai Demokrat.
16. Yeni Maria Marselina Katha	Fraksi Partai Demokrat.
17. Bryan Iskandar, SE	Fraksi Partai Nasdem.
18. Henry, SE, MH	Fraksi Partai Nasdem.
19. H. Achmad Rasyid	Fraksi Gerindra.
20. Dra. Kuwu Senilawati	Fraksi Gerindra.
21. Andayani, SE	Fraksi Gerindra.
22. Drs. H. Sugiyarto, MAP	Fraksi Gerindra.
23. Tomy Irawan Diran, SE	Fraksi Gabungan (FGP4H).
24. Natalia, ST	Fraksi Gabungan (FGP4H).
25. Sirajul Rahman, S.Hut., M.I.Kom	Fraksi Gabungan (FGP4H).
26. Sengkon, SE	Fraksi Gabungan (FGP4H).
27. H. Achmad Amur, SH, MH	Fraksi Gabungan (FGP4H).

Tidak Hadir

: 18 Orang.

		Ket :
1. H. Jubair Arifin	Fraksi PDI-Perjuangan	I z i n
2. Ir. Artaban, MH	Fraksi PDI Perjuangan	I z i n
3. Ir. Lohing Simon	Fraksi PDI-Perjuangan	I z i n
4. Andina Thresia Narang, B. Comm	Fraksi PDI Perjuangan	I z i n
5. Ir. H. Abdul Razak	Fraksi Partai Golkar.	I z i n
6. Sri Neni Trianawati, SE	Fraksi Partai Golkar.	I z i n
7. Sinar Kumala	Fraksi Partai Golkar.	I z i n
8. Sarwani	Fraksi Partai Golkar.	Alm.
9. H. Muhammad Sriosako, S.Sos., MH	Fraksi Partai Demokrat.	I z i n
10. Faridawaty Darland Atjeh, SE, MM	Fraksi Partai Nasdem.	I z i n
11. dr. Niksen S. Bahat	Fraksi Partai Nasdem.	I z i n
12. Toga Hamonangan Nadeak, SH., MH	Fraksi Partai Nasdem.	I z i n
13. Jainudin Karim, SE	Fraksi Gerindra.	I z i n
14. H. Purman Jaya, S.Sos	Fraksi PKB.	I z i n
15. Fajar Hariady	Fraksi PKB.	I z i n
16. Hj. Rusita Irma, S.Pi	Fraksi PKB.	I z i n
17. Evi Kahayanti, S.Sos	Fraksi PKB.	I z i n
18. Rizki Amalia Darwan Ali, BA(Hons), MSc	Fraksi Gabungan (FGP4H).	I z i n

Pimpinan
Wiyatno, SP

: **Assalamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera dan Selamat Pagi.**

Rapat Paripurna ke – 4 Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, Anggota Dewan yang hadir berjumlah 27 orang dari 44 Anggota Dewan, maka **korum tercapai.**

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Paripurna ke – 4 Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pada pagihari ini, Senin 6 Juli 2020, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

----- **Ketukan Palu Satu Kali** -----

Marilah kita menyanyikan Lagu Kebangsaan **“Indonesia Raya”**

Pimpinan
Wiyatno, SP

: Hadirin dimohon berdiri.

----- **Menyanyikan Lagu Indonesia Raya** -----

Pimpinan
Wiyatno, SP

: Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Yang terhormat :

- Saudara Wakil-Wakil Ketua dan semua Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Mewakili Kapolda Kalimantan Tengah ;
- Mewakili Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Asisten Sekretaris Daerah / Staf Ahli Gubernur dan semua Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta undangan sekalian yang saya hormati.

Pertama – tama marilah kita selalum persembahkan pujian syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, pada pagi hari ini dalam keadaan sehat wal’afiat.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Adapun Agenda Rapat Paripurna Dewan pada pagihari ini adalah, Jawaban Gubernur Kalimantan Tengah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2019.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, telah disampaikan pada Rapat Paripurna ke – 3, Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang sayahormati,

Selanjutnya untuk menyampaikan jawaban, tanggapan dan penjelasan, atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019, kepada Saudara Gubernur Kalimantan Tengah, dengan hormat kami persilakan.

Sekda Prov. Kalteng : Teks terlampir.
Fahrizal Fitri, S.Hut, MP

Pimpinan : Terima kasih, kepada Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang
Wiyatno, SP diwakili oleh Saudara Sekretaris Daerah..

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang sayahormati,

Demikian telah kita dengarkan bersama, jawaban, tanggapan dan penjelasan dari Saudara Gubernur Kalimantan Tengah, atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung Dewan, apabila masih terdapat hal-hal yang memerlukan keterangan atau penjelasan lebih lanjut, secara terperinci atau secara teknis, dapat dibahas dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang sayahormati,

Dengan demikian berakhir lah agenda Rapat Paripurna ke – 4, Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan, mengucapkan terima kasih, kepada Saudara Gubernur yang diwakili oleh Saudara Sekda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan hadirin sekalian, atas kehadirannya, mengikuti Rapat Paripurna Dewan dari awal hingga selesai, dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah, Rapat Paripurna dinyatakan selesai dan ditutup.

----- Ketuk Palu Tiga Kali -----

Pimpinan : Terima kasih
Wiyatno, SP

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rapat Paripurna berakhir dan
Ditutup Pukul : 09.50 WIB

Palangka Raya, 6 Juli 2020

MENGETAHUI :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

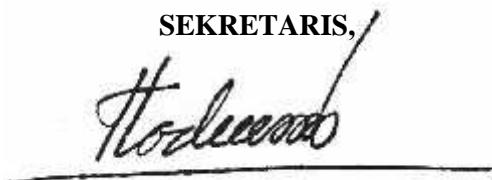
KETUA,



WIYATNO, SP

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SEKRETARIS,



**TANTAN, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640421 199203 1 012**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan S. Parman No. 2 Telpon (0536) 3236320, Fax. 3236329 Palangka Raya 73112

Palangka Raya, 3 Juli 2020

Nomor : 005/967/DPRD/2020
Lampiran : -
Perihal : **RAPAT PARIPURNA**

K e p a d a

Yth.

di -

PALANGKA RAYA

Bersama ini Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr(i) pada **Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020**, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : SENIN
Tanggal : 6 Juli 2020
Pukul : 09.00 WIB – selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
A c a r a : Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2019.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

K E T U A,

WIYATNO, SP

Catatan :

1. Pakaian
 - Sipil : Pakaian Sipil Resmi (PSR).
 - TNI/POLRI : Menyesuaikan.
 - Ibu-ibu : Menyesuaikan.
2. Undangan Hadir 15 (Lima Belas) Menit sebelum Acara dimulai.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan S. Parman No. 2 Telp. 0536 – 3236320 Fax 3236329 Palangka Raya 73112

A c a r a : RapatParipurnaKe – 4 Masa Persidangan II (Kedua) Tahun Sidang 2020,DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
=====

- H a r i : SENIN
- T a n g g a l : 6 JULI 2020
- P u k u l : 09.00 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya.

Susunan Acara :

1. Pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Rapat.
2. Jawaban Gubernur Kalimantan Tengah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan tengah, Tahun Anggaran 2019.
3. P e n u t u p.

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

T A N T A N, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640421 199203 1 012



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PIDATO

**JAWABAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PENDUKUNG DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)
PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019**

Palangka Raya, 6 Juli 2020

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh;
Tabe Selamat Lingu Nalatai Salam Sujud Karendeng
Malempang;
Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kaju Bata;

1

Saloom, Om Swastiastu Namu Budaya, Salam Kebajikan;

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita Sekalian;

Yang terhormat :

- Saudara Ketua, ~~Wakil-wakil Ketua~~ dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- ~~X~~ ~~Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;~~
- Saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; *MEWAKILI KABIUDA*
- ~~X~~ Saudara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah;
- ~~X~~ Saudara Kepala Perwakilan BPK-RI Kalimantan Tengah;
- ~~X~~ Saudara Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah;
- ~~X~~ Saudara Sekretaris Daerah,
- ✓ Asisten Sekda Provinsi Kalimantan Tengah;
- ✓ Para Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah;

- Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kepala Badan/Dinas/Unit Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Para Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Para Undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan para Anggota Dewan dan Hadirin sekalian yang saya hormati.

Setelah memperhatikan secara seksama Pemandangan Umum para Anggota Dewan yang terhormat, melalui juru bicara dari masing-masing Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan tanggapan, penjelasan dan sekaligus jawaban, dalam bentuk rangkuman jawaban terhadap beberapa pertanyaan dan penjelasan yang telah disampaikan dalam pandangan umum fraksi.

Menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh anggota dewan dari Fraksi PDIP sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi Partai GOLKAR terkait langkah apa saja yang diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar temuan tidak terulang dikemudian hari dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Bahwa kami selalu berupaya meningkatkan kinerja Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) secara

terus menerus secara berkelanjutan. Hal ini kami lakukan karena perlunya pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Perangkat Daerah. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, revidu, dan evaluasi dari sejak perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu juga kami telah membuka klinik APBD yang tujuannya sebagai wadah konsultasi para pihak terutama Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan terhadap setiap kegiatan yang telah direncanakan.

Kemudian terkait dengan optimalisasi potensi pendapatan daerah ke depan, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan oleh Anggota Dewan yang terhormat.

Dapat kami yakinkan bahwa kami akan pertahankan dan lebih mengoptimalkan potensi pendapatan, terutama

untuk total pendapatan daerah secara seluruhan melalui terobosan dalam rangka pembentukan sumber-sumber penerimaan daerah selain pajak dan retribusi sebagaimana saran dari Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya sehubungan pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkaitan dengan piutang yang tidak tertagih di neraca dapat kami jelaskan bahwa Terkait Piutang Pemerintah Daerah Dalam Laporan Keuangan terjadi akibat adanya tunggakan pendapatan sampai saat ini belum terbayarkan.

Penjelasan ini sekaligus menjawab, menanggapi atas pertanyaan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NASDEM, Fraksi Partai GERINDRA, dan Fraksi Gabungan (FGP4H).

Selanjutnya untuk menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi Partai GOLKAR, Fraksi

Partai DEMOKRAT, Fraksi Partai NASDEM, Fraksi Partai GERINDRA, Fraksi PKB dan Fraksi Gabungan (FGP4H) mengenai kejelasan tindak lanjut Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menarik kembali dana kas yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) yang masih tersimpan di Rekening bareskrim Mabes Polri dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dana yang ditransfer ke Bareskrim Mabes Polri berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menarik kembali uang tersebut antara lain Gubernur Kalimantan Tengah telah menyurati Kepala Kepolisian Republik Indonesia serta Menteri Dalam Negeri untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk saat ini masih belum ada perkembangan lebih lanjut dari pihak bareskrim maupun kementerian terkait akan permasalahan ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus aktif berkoordinasi dan memonitor untuk menyelesaikan masalah tersebut.

7

Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan para Anggota Dewan dan Hadirin sekalian yang saya hormati.

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi Partai DEMOKRAT, Fraksi Partai NASDEM, Fraksi Partai GERINDRA, Fraksi PKB dan Fraksi Gabungan (FGP4H) terkait dengan tunggakan atau utang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyaluran dana transfer bagi hasil yang menjadi hak keuangan Kabupaten/Kota dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mencapai apa yang telah ditargetkan, namun ada berbagai kendala yang terjadi yaitu data pajak daerah yang kami terima terlambat. Sedangkan data dimaksud sebagai dasar Pemerintah Provinsi untuk mentransfer ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada Dasarnya apabila data telah lengkap dan sinkron maka

8

dapat dipastikan DBH langsung dapat dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya perkenankan kami menjawab, menjelaskan, atas pertanyaan dari Fraksi PDIP terkait dengan PT. Banama Tingang Makmur yang dianggap masih belum memberikan bagian laba yang rasional untuk peningkatan PAD serta langkah upaya secara maksimal untuk merevitalisasi kinerja BUMD sesuai target dalam RPJMD.

Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja PT. Banama Tingang Makmur, Pemerintah Daerah selalu memberikan dukungan agar pengelolaan usaha yang dilakukan oleh PT. Banama Tingang Makmur dapat lebih optimal. Sehingga diharapkan PT. Banama Tingang Makmur memberi kontribusi terhadap penerimaan daerah. Kami sepakat dengan saran yang disampaikan Fraksi PDIP bahwa kedepan Pemerintah Provinsi lebih memaksimalkan

BUMD di Kalimantan Tengah, agar target yang telah dicanangkan dalam RPJMD dapat tercapai.

Selanjutnya, Kami sampaikan terima kasih atas masukan dari Fraksi PDIP terkait pos pembentukan dana cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam APBD Tahun 2019. Walaupun ada pergeseran anggaran yang terjadi, kami telah menganalisa secara keseluruhan sehingga capaian kinerja RPJMD tidak terganggu secara signifikan.

Berikutnya untuk menjawab pertanyaan dari Fraksi PDIP terkait dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal Revisi Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah untuk kepentingan perencanaan Pembangunan infrastruktur untuk kelancaran investasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk melaksanakan proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah. Tentunya proses

10

dan tahapan revisi ini RTRW ini wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2019 dan 2020 ini sedang dilaksanakan proses Peninjauan Kembali Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035. RTRW Provinsi Kalimantan Tengah tetap menjadi pedoman dalam pembangunan infrastruktur dan penerbitan perijinan dengan tetap memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota.

Penjelasan ini sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi Partai DEMOKRAT, Fraksi Partai GERINDRA, Fraksi PKB dan Fraksi Gabungan (FGP4H).

Selanjutnya pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait Putusan pengadilan PTUN Palangka Raya terhadap Pejabat ASN yang dinonjobkan dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa Pegawai atas nama Maria Doya Aden, tidak pernah mengajukan gugatan ke PTUN. Pegawai yang bersangkutan tidak pernah

dinonjobkan, dan sampai saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Sejarah Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan dan Hadirin sekalian yang saya hormati,

Selanjutnya untuk menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai GOLKAR terkait Kemandirian ekonomi, sampai saat ini Kalteng sangat tergantung dengan pasukan kebutuhan bahan pokok dari Kalimantan Selatan dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Bahwa sampai saat ini memang sebagian besar bahan pokok untuk Kalteng masih dipasok melalui fasilitas pelabuhan di area Kalimantan Selatan. Sehingga sedikit banyak ada peran besar Kalimantan Selatan dalam pendistribusian melalui fasilitas angkutan darat. Untuk jangka panjangnya diusahakan adanya pemotongan mata

12

rantai distribusi dalam penyaluran barang kebutuhan pokok baik dengan peningkatan infrastruktur maupun fasilitas lain dalam rangka kemandirian ekonomi Kalteng.

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai DEMOKRAT terkait pekerjaan fisik, baik multi years tahap pertama maupun pekerjaan reguler apakah sudah selesai 100% dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pekerjaan Fisik Tahun Anggaran 2019 dan Pekerjaan Multi Years Tahun 2018-2020, secara fisik dan secara administrasi telah dilaksanakan 100%, namun secara penganggaran, pembayaran pekerjaan Multi Years berakhir pada Tahun 2020.

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai GOLKAR sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi Partai NASDEM terkait penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

SiLPA Tahun 2019 salah satunya merupakan optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang sudah tercapai output kegiatannya, dan perlu kami jelaskan juga bahwa dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan, telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan baik perencanaan lima tahunan maupun Perencanaan Tahunan. SiLPA Tahun Anggaran 2019 dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang direkomendasikan oleh BPK RI untuk dianggarkan kembali Tahun Anggaran 2020.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan dan Hadirin sekalian yang saya hormati,

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari Fraksi PKB sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi Partai NASDEM terkait permohonan dari masyarakat berupa ijin galian C yang pelayanan kurang maksimal sehingga perlu dilakukan pembenahan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan pelayanan berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya syarat dan ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan sering menjadi faktor pemicu kesalahpahaman akan proses perizinan baik secara waktu maupun kewenangan. Inilah yang menyebabkan adanya isu bahwa pelayanan perizinan menjadi kurang maksimal.

Selanjutnya perkenankan kami menjawab pertanyaan dari Fraksi Gabungan (FGP4H) terkait peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan berusaha yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan Pelaku UMKM.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mendorong penguatan permodalan Pelaku UMKM melalui BUMN/Perbankan dan meningkatkan ketrampilan pelaku usaha melalui pelatihan-pelatihan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terus berusaha mewujudkan upaya UMKM untuk naik kelas dengan dengan cara memperoleh ijin usaha, Hak Merek, Sertifikat Halal, dan bekerja sama dengan pihak terkait. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mendorong semua Pelaku Usaha agar memasarkan dan mempromosikan produknya dengan memanfaatkan media online untuk meningkatkan pemasaran. Dalam situasi Pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Provinsi tetap mendorong dan memberdayakan UMKM agar mampu menjalankan usaha dengan meningkatkan nilai tambah produk yang lebih inovatif.

Berikutnya pertanyaan terkait penyediaan sumber daya manusia atau tenaga medis yang unggul, saran dan prasarana yang memadai serta merata ke pelosok dan terpencil di Provinsi Kalimantan Tengah dapat kami dijelaskan sebagai berikut.

Pemenuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan di wilayah Kalimantan Tengah berdasarkan rencana kebutuhan tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat dan Program Pemantapan Mutu Profesi Dokter milik Kementerian Kesehatan. Selain itu Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi dalam program dan kegiatan Tahun 2019 menugaskan dokter PTT dan bidan PTT bagi Daerah terpencil dan sangat terpencil untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah.

**Pimpinan Dewan, para Anggota Dewan serta
Hadirin sekalian yang saya hormati,**

17

Kami mengucapkan terima kasih atas saran masukan untuk Pemerintah Provinsi terus mengembangkan pola koordinasi antar instansi maupun dengan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Kami akan terus mengembangkan pola koordinasi terhadap semua pihak untuk memperoleh hasil yang optimal terutama dalam pelaksanaan pembangunan di Bumi Tambun Bungai Bumi Pancasila yang kita cintai bersama ini.

Hadirin undangan yang berbahagia, demikian jawaban dan tanggapan kami terhadap pemandangan umum Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah atas Pidato Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019. Untuk hal-hal yang lebih detail maupun mendalam akan kita bahas dalam proses tahapan Pembahasan pada waktu yang telah kita sepakati.

Akhirnya saya ucapkan selamat bertugas, diiringi harapan semoga apa yang kita rencanakan ada kerjakan bersama ini akan bermanfaat bagi masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH, dan mendapat ridho dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sekian dan Terima Kasih.

Wabillahitaufiqwalhidayah.

Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi

Wabarakatuh;

Palangka Raya, 6 Juli 2020
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

19

RAPAT PARIPURNA KE – 5
MASA PERSIDANGAN II (KEDUA) TAHUN SIDANG 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
=====

Hari : Selasa
Tanggal : 7 Juli 2020
Pukul : 09.30 WIB
Sifat Sidang : Terbuka untuk Umum
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. S. Parman No. 02 Palangka Raya.

A c a r a : 1. Pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Rapat.
2. Laporan Hasil Rapat Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rangka membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.
4. Pendapat Akhir/Pidato Gubernur Kalimantan Tengah atas Penandatanganan Persetujuan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.
5. P e n u t u p .

PimpinanRapat : Wiyatno, SP, KetuaDewanPerwakilan Rakyat Daerah ProvinsiKalimantan Tengah.

Sekretaris : Tantan, SH, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Jumlah Anggota : 45 Orang.

1. FraksiPDI-Perjuangan.	12	Orang
2. FraksiPartai Golongan Karya.	7	Orang
3. FraksiPartaiDemokrat.	6	Orang
4. FraksiPartaiNasdem.	5	Orang
5. FraksiPartaiGerindra.	5	Orang
6. FraksiPKB.	4	Orang
7. FraksiGabungan (FGP4H).	6	Orang

Hadir : 28 Orang.

1. Wiyatno, SP	Fraksi PDI-Perjuangan
2. Ir. Artaban, MH	Fraksi PDI-Perjuangan
3. Drs. Duwel Rawing	Fraksi PDI-Perjuangan
4. Ina Prayawati, SE	Fraksi PDI-Perjuangan
5. Ir. Lohing Simon	Fraksi PDI-Perjuangan
6. Irawati, S.Pd	Fraksi PDI-Perjuangan
7. Hj. Maryani Sabran	Fraksi PDI-Perjuangan
8. Ferry Khaidir	Fraksi PDI-Perjuangan
9. H. Maruadi, SH, S.Sos	FraksiPartaiGolkar.
10. Sri Neni Trianawati, SE	FraksiPartaiGolkar.
11. H. Sudarsono, SH	FraksiPartaiGolkar.
12. H. Jimmy Carter	FraksiPartaiDemokrat.
13. H. MuhammadSriosako, S.Sos., MH	FraksiPartaiDemokrat.
14. Heri Santoso, ST	FraksiPartaiDemokrat.
15. Ir. H. Muhajirin, MP	FraksiPartaiDemokrat.
16. FaridawatyDarlandAtjeh, SE, MM	FraksiPartaiNasdem.
17. Bryan Iskandar, SE	FraksiPartaiNasdem.
18. dr. Niksen S. Bahat	FraksiPartaiNasdem.
19. H. Achmad Rasyid	FraksiGerindra.
20. Jainudin Karim, SE	FraksiGerindra.
21. Dra. Kuwu Senilawati	FraksiGerindra.
22. Andayani, SE	FraksiGerindra.
23. Drs. H. Sugiyarto, MAP	FraksiGerindra.
24. Fajar Hariady	FraksiPKB.
25. Natalia, ST	FraksiGabungan (FGP4H).
26. Sirajul Rahman, S.Hut., M.I.Kom	FraksiGabungan (FGP4H).
27. Sengkon, SE	FraksiGabungan (FGP4H).
28. H. Achmad Amur, SH, MH	FraksiGabungan (FGP4H).

Tidak Hadir : 17 Orang.

		Ket :
1. Drs. Yohannes Freddy Ering, M.Si	Fraksi PDI-Perjuangan	I z i n
2. H. JubairArifin	Fraksi PDI-Perjuangan	I z i n
3. Ir. Yulilis	Fraksi PDI Perjuangan	I z i n
4. AndinaThresiaNarang, B. Comm	Fraksi PDI Perjuangan	I z i n
5. Ir. H. Abdul Razak	FraksiPartaiGolkar.	I z i n
6. Dra. Siti Nafsiah, M.Si	FraksiPartaiGolkar.	I z i n
7. Sinar Kumala	FraksiPartaiGolkar.	I z i n
8. Sarwani	FraksiPartaiGolkar.	Alm.
9. Siswandi	FraksiPartaiDemokrat.	I z i n
10. Yeni Maria Marselina Katha	FraksiPartaiDemokrat.	I z i n
11. Henry, SE, MH	FraksiPartaiNasdem.	I z i n
12. Toga Hamonangan Nadeak, SH., MH	FraksiPartaiNasdem.	I z i n
13. H. Purman Jaya, S.Sos	FraksiPKB.	I z i n
14. Hj. Rusita Irma, S.Pi	FraksiPKB.	I z i n
15. Evi Kahayanti, S.Sos	FraksiPKB.	I z i n
16. Tomy Irawan Diran, SE	FraksiGabungan (FGP4H).	I z i n
17. Rizki Amalia Darwan Ali, BA(Hons), MSc	FraksiGabungan (FGP4H).	I z i n

Pimpinan
Wiyatno, SP

: **Assalamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera dan Selamat Pagi.**

Rapat Paripurna ke – 5 Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, Anggota Dewan yang hadir berjumlah 28 orang dari 45 Anggota Dewan, maka **korum tercapai.**

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Paripurna ke – 5 Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pada pagihari ini, Selasa 7 Juli 2020, dinyatakan dibuka untuk umum.

----- **Ketukan Palu Satu Kali** -----

Marilah kita menyanyikan Lagu Kebangsaan **“Indonesia Raya”**

Pimpinan
Wiyatno, SP

: Hadirin dimohon berdiri.

----- **Menyanyikan Lagu Indonesia Raya** -----

Pimpinan
Wiyatno, SP

: Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Yang terhormat :

- Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah ;
- Saudara Wakil-Wakil Ketua dan semua Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Mewakili Kapolda Kalimantan Tengah ;
- Mewakili Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Asisten Sekretaris Daerah / Staf Ahli Gubernur dan semua Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta undangan sekalian yang saya hormati.

Pertama – tama marilah kita selalumpersembahkan pujidansyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehinggakita dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, pada pagi hari ini dalam keadaan sehat wal’afiat.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Adapun Agenda Rapat Paripurna Dewan pada pagihari ini, adalah sebagai berikut :

Pertama : Laporan Hasil Rapat Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Tim Pemerintah Provinsi

- Kalimantan Tengah dalam Rangka membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.
- Kedua : Penandatanganan Persetujuan Bersama, Gubernur Kalimantan Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.
- Ketiga : Pendapat Akhir/Pidato Gubernur Kalimantan Tengah, atas Penandatanganan Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.

HadirinRapatParipurnaDewan yang sayahormati,

Perlu kita ketahui bersama, bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 22 Juni 2020, telah membahas hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, terhadap Raperda Pengendalian Kebakaran lahan, dan pada tanggal 6 Juli 2020, telah dilaksanakan Rapat Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus Pendapat Akhir Fraksi, dari 7 (tujuh) Fraksi Pendukung Dewan, telah sepakat menerima dan menyetujui terhadap Raperda tersebut.

Selanjutnya dipersilakan kepada juru bicara dari Anggota Dewan yang terhormat, untuk menyampaikan Laporan Hasil Rapat Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, kami persilakan.

Ketua Bapemperda : Teks terlampir.
H. Maruadi, SH, S.Sos

Pimpinan : Terima kasih
Wiyatno, SP

Demikian tadi telah kita dengarkan bersama, Laporan Hasil Rapat Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, dengan tetap memperhatikan adanya penyempurnaan redaksional, untuk ini kami tanyakan kepada Saudara-saudara Anggota Dewan yang terhormat, apakah dapat disetujui?

Anggota Dewan : Setuju !

Pimpinan : Terima kasih
Wiyatno, SP

----- **Ketukan Palu Satu Kali** -----

HadirinRapatParipurnaDewan yang sayahormati,

Selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan Persetujuan Bersama, Gubernur Kalimantan Tengah, dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, kepada Saudara Gubernur dimohon mengambil tempat didepan dan didampingi oleh Wakil Gubernur, Ketua Dewan didampingi oleh Wakil-Wakil Ketua Dewan, di persilakan.

----- **Penandatanganan Persetujuan Bersama** -----
oleh Gub. Kalteng dan Pimpinan DPRD Prov. Kalteng

HadirinRapatParipurnaDewan yang sayahormati,

Selanjutnya kita akan mendengarkan Pendapat Akhir/Pidato Gubernur Kalimantan Tengah, kepada Saudara Gubernur dengan hormat kami persilakan.

Wagub. Kalteng : Teks terlampir.
Habib Ismail Bin Yahya

Pimpinan : Demikian tadi telah kita dengarkan bersama Pendapat Akhir/Pidato Gubernur
Wiyatno, SP Kalimantan Tengah, untuk itu kami ucapkan Terima kasih.

HadirinRapatParipurnaDewan yang sayahormati,

Dengandemikianberakhirilah agenda RapatParipurnake – 5, MasaPersidangan II (kedua) TahunSidang 2020, PimpinandanseluruhAnggotaDewan, mengucapkanterimakasih, kepadaSaudara WakilGubernur, Forum KoordinasiPimpinan Daerah danhadirinsekalian, ataskehadiransertaperhatiannya, mengikutiRapatParipurnaDewandariawalhinggaselesai, denganmengucapkanSyukur Alhamdulillah, RapatParipurnadinyatakansesaidanditutup.

----- **Ketuk Palu Tiga Kali** -----

Pimpinan : Terima kasih
Wiyatno, SP

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rapat Paripurna berakhir dan
Ditutup Pukul : 10.15 WIB

Palangka Raya, 7 Juli 2020

MENGETAHUI :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KETUA,



WIYATNO, SP

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SEKRETARIS,



**TANTAN, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640421 199203 1 012**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan S. Parman No. 2 Telpn (0536) 3236320, Fax. 3236329 Palangka Raya 73112

Palangka Raya, 6 Juli 2020

Nomor : 005/983/DPRD/2020
Lampiran : -
Perihal : **RAPAT PARIPURNA**

K e p a d a

Yth.

di -

PALANGKA RAYA

Bersama ini Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr(i) pada **Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020**, yang akan dilaksanakan pada :

- Hari : SELASA
Tanggal : 7 Juli 2020
Pukul : 09.00 WIB – selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
A c a r a : I. Laporan hasil Rapat Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rangka membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan;
II. Penandatanganan Persetujuan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan;
III. Pendapat Akhir/Pidato Gubernur Kalimantan Tengah.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

K E T U A,

WIYATNO, SP

Catatan :

- Pakaian
 - Sipil : Pakaian Sipil Resmi (PSR).
 - TNI/POLRI : Menyesuaikan.
 - Ibu-ibu : Menyesuaikan.
- Undangan Hadir 15 (Lima Belas) Menit sebelum Acara dimulai.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan S. Parman No. 2 Telp. 0536 – 3236320 Fax 3236329 Palangka Raya 73112

A c a r a : RapatParipurnaKe – 5 Masa Persidangan II (Kedua) Tahun
Sidang 2020,DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
=====

- H a r i : SELASA
- Tanggal : 7 JULI 2020
- P u k u l : 09.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya.

Susunan Acara :

1. Pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Rapat.
2. Laporan Hasil Rapat Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rangka membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.
4. Pendapat Akhir/Pidato Gubernur Kalimantan Tengah atas Penandatanganan Persetujuan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.
5. P e n u t u p.

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

T A N T A N, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640421 199203 1 012



L A P O R A N
HASIL RAPAT GABUNGAN KOMISI DPRD KALIMANTAN
TENGAH DENGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TENTANG RAPERDA
PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN

Disampaikan pada Rapat Paripurna ke-5
Masa Persidangan II Tahun 2020
Hari : Selasa, 7 Juli 2020

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Syalom, Om Swastiastu

Salam sejahtera bagi kita semua.

Tabe salamet lingu nalatai, salam sujud karendem malempang.

Adil ka'talino, bacuramin ka'saruga, basengat ka'jubata

Salam sejahtera dan selamat pagi.

Yang terhormat:

- : Saudara Gubernur Kalimantan Tengah;
- Yth : Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
- Yth : Saudara KAPOLDA Kalimantan Tengah **Irjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M.** atau yang mewakili;
- Yth : Saudara DANREM 102 Panju Panjung Kalimantan Tengah **Brigjen TNI Purwo Sudaryanto** atau yang mewakili;
- Yth : Saudara Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah **Dr. Mukri, SH. MH.** atau yang mewakili;

Laporan Hasil Rapat Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020

1

- Yth : Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah atau yang mewakili;
- Yth : Saudara Ketua Pengadilan Agama Kalimantan Tengah atau yang mewakili;
- Yth : Saudara Wakil-Wakil Ketua dan Semua Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- Yth : Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Yth : Saudara Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Yth : Saudara Kepala Badan Narkotika Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili;
- Yth : Saudara Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- Yth : Saudara Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Palangka Raya atau yang mewakili;
- Yth : Saudara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili;
- Yth : Saudara Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili;
- Yth : Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili;
- Yth : Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili;
- Yth : Saudara Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili;
- Yth : Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Palangka Raya atau yang mewakili;
- Yth : Saudara Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili;
- Yth : Asisten Sekretaris Daerah/Staf Ahli Gubernur dan Semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Yth : Saudara-Saudara Tim Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi;
- Yth : Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta undangan sekalian yang saya muliakan.

Pertama-tama, sebagai orang-orang yang beriman, kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatNya kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat wal'afiat untuk mengikuti Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada hari ini, Selasa, 7 Juli 2020 dengan Acara Laporan Hasil Rapat Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Hadirin sekalian, Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pembahasan Raperda Pengendalian Kebakaran Lahan ini di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah diawali dengan pengajuan oleh Gubernur Kalimantan Tengah dalam Rapat Paripurna pada tanggal 6 Maret 2017, kemudian dibentuk Tim Pembahasan Raperda dengan Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 188.4.43/47/DPRD/2017 pada tanggal 20 Maret 2017, dimana proses pembahasannya berlanjut dari periode sebelumnya sampai ke periode keanggotaan Dewan Tahun 2019-2024, yang kemudian diserahkan kepada Bapemperda untuk melanjutkan prosesnya.

Dengan pertimbangan yang panjang dan mendalam, mengingat pentingnya Perda ini dan keberadaannya ditunggu oleh masyarakat Kalimantan Tengah sebagai solusi permasalahan selama ini yang selalu muncul dalam setiap musim hampir setiap tahun. Kemudian pertimbangannya, bagaimana supaya Perda ini betul-betul operasional, dapat memberikan kepastian hukum bagi subyek dan obyek yang diatur maupun bagi aparat dalam penegakannya serta bagi semua pihak yang terkait, sehingga proses pembahasannya cukup dinamis, kritis dan substansial dalam setiap tahapannya. Semua pihak terlibat secara aktif, baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah maupun pihak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam proses pembahasan Raperda ini telah 2 (dua) kali difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, yang hasilnya: pertama, dituangkan dalam Surat Kemendagri Nomor: 188.34/2082/OTDA/ tanggal 3 April 2019 dan yang kedua dalam Surat Kemendagri Nomor: 188.34/1590/OTDA tanggal 18 Maret 2020. Adapun hasil fasilitasi yang pertama, diminta melakukan revisi beberapa substansi Raperda ini, antara lain: menghilangkan frasa "Hutan" dengan alasan kewenangan (hutan merupakan kewenangan pusat, kecuali hutan kota), mengganti luasan yang diperbolehkan diajukan, yaitu seluas 2 (dua) hektar per Kepala Keluarga (KK), dan mengganti sanksi menjadi kurungan 6 (enam) bulan dan denda Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai kewenangan Perda.

Untuk menindak lanjuti hasil fasilitasi Kemendagri yang pertama tersebut, pada tanggal 28 Januari 2020, telah dilaksanakan Rapat Kerja antara Tim Bapemperda dengan Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk membahas hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri tersebut dan secara umum telah menyepakati hasil fasilitasi tersebut. Namun ada beberapa hal yang diminta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Hukum untuk dikonsultasikan/dikomunikasikan kembali ke Kemendagri, seperti tentang ketentuan draf awal Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi, "Kegiatan pembakaran di lahan yang bersifat khusus pada lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petani peladang dan/atau pekebun". Walaupun rapat mempertimbangkan penggantian frasa "Masyarakat Hukum Adat" menjadi "Petani Peladang/Pekebun", karena mengingat proses penetapan Masyarakat Hukum Adat secara yuridis formal di Kalimantan Tengah memakan waktu yang lama, sehingga dirasa perlu dikomunikasikan lebih jauh dan intens lagi dengan Kemendagri.

Kemudian hasil fasilitasi yang kedua dari Kemendagri yang disampaikan melalui surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.34/1590/OTDA tertanggal 18 Maret 2020, perihal: Penyesuaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil kajian secara yuridis formal dan materiil, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat (3) Kegiatan pembakaran di lahan yang bersifat khusus pada lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petani peladang/pekebun; usulan penyesuaian menjadi: "Kegiatan pembakaran di lahan yang bersifat khusus pada lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petani peladang/ pekebun yang berasal dari anggota masyarakat hukum adat". Ketentuan ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
- b. Pasal 6 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembukaan lahan dengan cara pembakaran oleh petani peladang dan/atau pekebun di lahan bukan gambut yang bersifat khusus lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur; usulan penyempurnaan redaksional, menjadi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembukaan ladang di lahan bukan gambut, tata cara perladangan, dan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur;
- c. Pasal 27 Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); Hasil kajian menjadi Pasal 27 ayat (1) Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ayat (2) Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hadirin sekalian, Rapat Paripurna yang kami hormati,

Seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa proses pembahasan Raperda Pengendalian Kebakaran Lahan ini dilakukan secara mendalam dan cermat agar betul-betul berguna sebagai Perda payung, dimana pengaturan lebih teknis dapat diatur dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten maupun Kota. Untuk itu, Tim Bapemperda bersama dengan Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan rapat pada tanggal 22 Juni 2020, guna membahas lebih mendalam lagi tentang hal-hal yang sifatnya substansial dan terlebih khusus hasil fasilitasi Kemendagri yang kedua. Kemudian hasil tersebut dilaporkan dalam Forum Rapat Gabungan, yang dihadiri oleh Ketua, Pimpinan Fraksi, Anggota Bapemperda, Anggota DPRD dan yang mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 6 Juli 2020.

Rapat Gabungan ini sempat tertunda dari jadwal pada tanggal 23 Juni 2020, yang kemudian diadakan rapat kedua Tim Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang dihadiri oleh wakil ketua DPRD dan pimpinan fraksi pendukung DPRD untuk mendengarkan dan membahas sekali lagi secara lebih mendalam beberapa hal yang mendasar dan substantif pada tanggal 1 Juli 2020 dan hasilnya dilaporkan dalam Rapat Gabungan pada tanggal 6 Juli 2020 tersebut di atas.

Adapun hal-hal penting yang dilaporkan oleh Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rapat Gabungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus menjadi pemahaman bersama, bahwa Raperda/Perda Pengendalian Kebakaran Lahan ini merupakan upaya untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh para petani peladang/pekebun khususnya yang berasal dari Masyarakat Hukum Adat, ketika mempersiapkan/membuka ladang pada setiap memasuki musim kemarau dan memasuki musim tanam dengan cara membakar, yang senyatanya masih ada dan membutuhkan perlindungan dari negara;

2. Pemahaman terhadap keberadaan Raperda/Perda ini harus dalam paradigma pengecualian dan pengendalian bukan dibolehkan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda ini, dilandasi oleh semangat untuk membuka ruang bagi kearifan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat dan memberi kesempatan/perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat untuk memenuhi ketersediaan pangannya;
3. Raperda (Perda) ini, mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan definisi yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2020;
4. Diharapkan dalam kegiatan sosialisasi Perda ini nantinya, agar melibatkan aparat penegak hukum seperti dari Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari koordinasi dengan pihak-pihak terkait disamping Pemerintah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Raperda (Perda) ini merupakan payung hukum di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) maupun dalam Perda di tingkat Kabupaten maupun Kota. Dalam tindak lanjut pembahasannya, Raperda/Perda ini akan dipersandingkan dengan Rancangan Peraturan Gubernurnya, sebagai bagian proses penting dalam memastikan substansi pengaturan yang memberikan kepastian;
6. Posisi hukum (*legal standing*) Damang atau Mantir dalam memberikan pengakuan dan memberikan izin bersama Kepala Desa akan diatur lebih khusus dalam Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Perda Pengendalian kebakaran lahan ini. Dan berkembang dalam pembahasan bahwa yang berwenang memberikan izin bersama Kepala Desa dan juga pengakuan sebagai anggota Masyarakat Hukum Adat adalah Damang, sedangkan Mantir memberikan rekomendasi sebagai aparat Masyarakat Hukum Adat yang ada dan berada di desa-desa;
7. Untuk memperkuat keberadaan Perda Pengendalian Kebakaran Lahan ini nantinya, agar segera dilakukan percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Hadirin sekalian, Rapat Paripurna yang kami hormati,

Dalam Rapat Gabungan pada hari Senin, 6 Juli 2020, telah disampaikan pendapat akhir Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah atas Raperda Pengendalian Kebakaran Lahan, adalah sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memandang bahwa Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan merupakan bagian dari upaya pemenuhan tujuan bernegara yang termaktub dalam alinea ke-empat pembukaan UUD Tahun 1945.

Mengendalikan kebakaran lahan adalah bagian penting untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat.

Lingkungan yang baik adalah sebagai salah satu persyaratan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam hal pemberdayaan usaha kecil dan usaha besar serta UMKM. Perda ini dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengakses informasi, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan bersama serta mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan dalam pengendalian kebakaran lahan.

Untuk tindak lanjutnya, fraksi PDIP meminta Pemerintah Daerah untuk segera menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pengendalian kebakaran lahan.

Berdasarkan pendapat dan pandangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan SETUJU terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan untuk selanjutnya DITETAPKAN sebagai PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

2. Fraksi Partai Golongan Karya:

Fraksi Partai Golongan Karya telah menelaah dan mencermati proses pembahasan Raperda tentang Pengendalian Kebakaran Lahan ini, mulai dari Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah yang disampaikan tanggal 6 Maret 2017. Kemudian Pemandangan Umum Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Raperda Pengendalian Kebakaran Lahan pada tanggal 8 Maret 2017 serta Pidato Jawaban Gubernur Kalimantan Tengah atas Pemandangan Umum Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 13 Maret 2017.

Proses selanjutnya yang ditelaah oleh fraksi Golkar adalah Surat Mendagri, Ub. Dirjen OTDA kepada Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.34/1590/OTDA tanggal 18 Maret 2020 tentang Penyesuaian Hasil Fasilitasi Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Laporan Hasil Rapat Tim Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Tim Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 05/BAPEMPERDA/DPRD/2020 tanggal 6 Juli 2020.

Berdasarkan telaah dan pencermatan proses tersebut, maka Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sependapat untuk MENERIMA dan MENYETUJUI Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan untuk DITETAPKAN menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera menyusun dan memberlakukan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.

3. Fraksi Partai Demokrat:

Fraksi Partai Demokrat mencermati mulai dari proses pembahasan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, latar belakang urgensinya Perda ini, adalah suatu realitas yang semestinya harus diatur dalam Perda Provinsi dan hal ini sejalan dengan sebagaimana yang telah diatur oleh UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Dan untuk itu dipandang perlu ada penegasan secara rinci tentang pemberdayaan dan perlindungan terhadap kearifan lokal yang tumbuh dan tetap dipelihara di tengah masyarakat kita.

Fraksi Partai Demokrat memandang perlu adanya koordinasi dari berbagai pihak baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun instansi dan para pihak yang terkait. Dan penting adanya sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan mengenai larangan pembakaran lahan dan kebun melalui berbagai media yang ada. Harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang sungguh-sungguh dalam upaya pencegahan dan pengawasan terhadap daerah rawan terjadinya kebakaran lahan. Disamping itu, harus menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan bagi para peladang dan pekebun.

Berdasarkan telaah dan pencermatan menuju perubahan yang lebih baik di atas tersebut, maka Fraksi Partai Demokrat menyatakan DAPAT MENERIMA Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk DITETAPKAN menjadi PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

4. Fraksi Partai NasDem:

Fraksi Partai Nasdem telah mempelajari dan mencermati pembahasan yang telah dilakukan dalam rapat-rapat dan hal-hal penting yang menjadi perhatian dalam proses pembahasan Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan berkesimpulan bahwa proses maupun substansi yang diatur telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu, Fraksi Partai Nasdem SETUJU dan Raperda ini dapat DITETAPKAN menjadi PERATURAN DAERAH.

5. Fraksi Partai Gerindra:

Fraksi Partai Gerindra menyambut baik dan sangat MENDUKUNG ditetapkannya Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan ini menjadi PERDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, karena salah satu Perda yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Untuk itu diharapkan Perda ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang mengatur tentang Masyarakat Adat atau Masyarakat Hukum Adat.

Selanjutnya diharapkan untuk segera melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui Dialog Interaktif dengan lembaga-lembaga adat, tokoh-tokoh adat serta perwakilan dari komunitas petani tradisional yang diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan. Apabila Raperda ini telah ditetapkan menjadi Perda, Fraksi Gerindra berharap agar dalam pelaksanaan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

6. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa telah mencermati proses pembahasan, baik hasil fasilitasi dari Kemendagri dan proses finalisasi Raperda Provinsi Kalimantan Tengah ini. Dan berpendapat bahwa bencana asap yang hampir terjadi di setiap musim kemarau dan mendapat sorotan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dan serius untuk mencegah dan mengendalikan bencana tersebut. Salah satu langkah strategis di Provinsi Kalimantan Tengah adalah keberadaan Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan yang pada saat ini sudah memasuki proses akhir, pembicaraan tingkat II.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, keberadaan Perda ini merupakan pemenuhan/pelaksanaan mandat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Selanjutnya meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera melakukan sosialisasi, agar Perda ini dapat segera diimplementasikan untuk memberikan kepastian hukum serta memberdayakan pekebun/petani peladang dan Masyarakat Hukum Adat yang telah lama menantikannya. Untuk pengaturan lebih lanjut/lebih teknis dari Perda ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera menetapkan Peraturan Gubernur.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, Fraksi PKB MENYETUJUI Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan untuk selanjutnya DITETAPKAN sebagai PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

7. Fraksi Gabungan PAN, PKS, PPP, Perindo, Hanura (FGP4H):

Fraksi Gabungan menyampaikan saran dan masukan terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, yaitu, agar segera diselesaikan/ditetapkan, dan setelah itu segera disosialisasikan sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petani/peladang dari Masyarakat Hukum Adat.

Selanjutnya diminta kepada pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera merancang dan menetapkan Peraturan Gubernur.

Didasari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Fraksi Gabungan (FGP4H) menyatakan dapat MENERIMA dan MENYETUJUI Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan untuk DITETAPKAN menjadi PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Demikian laporan ini disampaikan, dan pada kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah menginspirasi, memotivasi, mendukung dan berkontribusi dalam proses penyusunan dan pembahasan Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan ini, serta terima kasih atas kerjasama yang baik sehingga pada hari ini dapat dilaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020.

Wabillahitaufik Walhidayah

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palangka Raya, 7 Juli 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KETUA BAPEMPERDA,**



H. MARUADI, SH., S.Sos.

**PERSETUJUAN BERSAMA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 180 / / HUK
Nomor : 160 / 3g / DPRD / 2020

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN**

Pada hari ini selasa tanggal tujuh bulan juli tahun dua ribu dua puluh bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. SUGIANTO SABRAN** : Gubernur Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. 1. WIYATNO, SP** : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,
- 2. Ir. H. ABDUL RAZAK** : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,
- 3. H. JIMMY CARTER** : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,
- 4. FARIDAWATY DARLAND ATJEH, SE, MM** : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan yang telah diajukan PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perbaikan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Laporan Hasil Rapat Kerja Tim DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang terlampir dalam Persetujuan Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah hasil fasilitasi diterima.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**


H. SUGIANTO SABRAN

**PIHAK KEDUA,
KETUA DPRD PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**



WIYATNO, SP

**WAKIL KETUA DPRD PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**



Ir. H. ABDUL RAZAK

**WAKIL KETUA DPRD PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**



H. JIMMY CARTER

**WAKIL KETUA DPRD PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**



FARIDAWATY DARLAND ATJEH, SE, MM

BIRO HUKUM	
SENDA	
ASISTEN I	
KASB /	
KABAG	

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perbaikan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Laporan Hasil Rapat Kerja Tim DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang terlampir dalam Persetujuan Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah hasil fasilitasi diterima.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

 **H. SUGIANTO SABRAN**

PIHAK KEDUA,

**KETUA DPRD PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**


WIYATNO, SP

**WAKIL KETUA DPRD PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**


Ir. H. ABDUL RAZAK

**WAKIL KETUA DPRD PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**


H. JIMMY CARTER

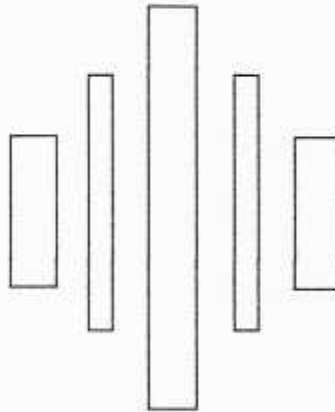
**WAKIL KETUA DPRD PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**


FARIDAWATY DARLAND ATJEH, SE, MM



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

**PIDATO PENDAPAT AKHIR GUBERNUR RAPERDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG
PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN
DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
KE-5 MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG
2020 DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TANGGAL 7 JULI 2020**



**PALANGKA RAYA
2020**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PIDATO PENDAPAT AKHIR GUBERNUR RAPERDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG
PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN
DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
KE-5 MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TANGGAL 7 JULI 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Syalom,
Om Swastiastu,
Salam Kebajikan,
Tabe Salamat Lingo Nalatai Salam Sujud Karendem
Malempang, Adil Ka'talino Bacuramin Ka'saruga,
Ba'sengat Ka'jubata,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian.

Yang Terhormat,

- Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; / MEWAKILI
- ~~* Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah;~~
- ~~Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah;~~
- ~~- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;~~
- X Pimpinan Bank Indonesia beserta Pimpinan Perbankan/BUMD/Perusda Kalimantan Tengah; / MEWAKILI
- Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala Instansi Vertikal, dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Tenaga Ahli DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- Para Sesepuh Daerah, Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat, Pimpinan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Insan Pers, Generasi Muda, serta Hadirin dan Undangan yang Saya Hormati.

Pertama - tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada hari ini dalam Forum Paripurna berbahagia ini saya diagendakan untuk menyampaikan Pidato Pendapat Akhir terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.

Sidang Dewan beserta hadirin yang saya hormati,

Seperti yang pernah kami sampaikan sebelumnya pada Pidato Pengantar, Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yakni Perda nomor 5 Tahun 2003 sudah berusia cukup lama dan tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan yang

diatasnya. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian baik dalam hal substansi maupun dalam hal semangat dan strategi hal-hal yang diatur.

Perlu kita semua sepaham bahwa ketika Raperda ini ditetapkan menjadi Perda, kita tetap pada koridor hukum yang mengatur terhadap pembukaan lahan dengan cara bakar. Perda kita ini nantinya mengatur substansi memberikan pengecualian, terhadap usaha tani perladangan yang menerapkan rangkaian kearifan lokal didalam praktek usaha taninya. Perda ini juga menekankan pada pentingnya pemberdayaan dan dukungan semua pihak agar usaha tani yang bersifat subsistem dan untuk kebutuhan sendiri itu dapat menjadi usaha tani yang ramah lingkungan, produktif dan mensejahterakan.

Kita semua berharap, dengan adanya Perda ini nantinya bisa menjadi membawa angin sejuk bagi saudara-saudara kita petani dan peladang tradisional

yang akhir-akhir ini kami pahami sedang menghadapi kesulitan terkait dengan pembukaan ladang mereka.

Satu hal yang Pemerintah Provinsi perlu tekankan, bahwa kami tetap akan menuju ke arah kebijakan seluruh pembukaan lahan tidak dengan cara bakar atau yg dikenal istilah Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). Perda ini sifatnya hanya menjembatani transformasi mainset maupun persiapan baik secara infrastruktur maupun instrument menuju kearah kebijakan PLTB tersebut.

Kami juga ucapkan terimakasih atas kerja sama dan kerja keras dari Tim Pembahas Raperda tentang Pengendalian Kebakaran Lahan ini, baik dari Tim Pemerintah Provinsi maupun Tim dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kami percaya bahwa Tim Pansus bersama-sama Tim Pemerintah Daerah telah berusaha mendapatkan hal yang terbaik bagi masyarakat Bumi Tambun Bungai yang kita cintai ini.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang Saya Hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga kita semua senantiasa selalu mendapat berkah, bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kita bersama, sehingga mampu memberi kontribusi optimal bagi kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah yang kita cintai dan kita banggakan, demi terwujudnya masyarakat Kalimantan Tengah yang “BERKAH” (**Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis**).

Sekian dan terima kasih.
Wabilahi Taufik Wal Hidayah.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
Om Santi, Santi, Santi Om.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

RAPAT PARIPURNA KE – 6
MASA PERSIDANGAN II (KEDUA) TAHUN SIDANG 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
=====

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Juli 2020
Pukul : 09.30 WIB
Sifat Sidang : Terbuka untuk Umum
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. S. Parman No. 02 Palangka Raya.

- A c a r a**
1. Pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Rapat.
 2. Laporan Hasil Rapat Gabungan yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dalam Rangka Membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.
 3. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.
 4. Pendapat Akhir/Pidato Gubernur Kalimantan Tengah atas Penandatanganan Persetujuan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.
 5. P e n u t u p .

Pimpinan Rapat : Wiyatno, SP, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sekretaris : Tantan, SH, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Jumlah Anggota : 45 Orang.

1. Fraksi PDI-Perjuangan.	12	Orang
2. Fraksi Partai Golongan Karya.	7	Orang
3. Fraksi Partai Demokrat.	6	Orang
4. Fraksi Partai Nasdem.	5	Orang
5. Fraksi Partai Gerindra.	5	Orang
6. Fraksi PKB.	4	Orang

7. Fraksi Gabungan (FGP4H).

6 Orang

Hadir : 27 Orang.

1. Wiyatno, SP	Fraksi PDI-Perjuangan
2. Drs. Yohannes Freddy Ering, M.Si	Fraksi PDI-Perjuangan
3. Ir. Artaban, MH	Fraksi PDI Perjuangan
4. Ir. Yulilis	Fraksi PDI-Perjuangan
5. Drs. Duwel Rawing	Fraksi PDI-Perjuangan
6. Ina Prayawati, SE	Fraksi PDI-Perjuangan
7. Ir. Lohing Simon	Fraksi PDI-Perjuangan
8. Irawati, S.Pd	Fraksi PDI-Perjuangan
9. Ir. H. Abdul Razak	Fraksi Partai Golkar.
10. Dra. Siti Nafsiah, M.Si	Fraksi Partai Golkar.
11. H. Maruadi, SH, S.Sos	Fraksi Partai Golkar.
12. Sri Neni Trianawati, SE	Fraksi Partai Golkar.
13. H. Sudarsono, SH	Fraksi Partai Golkar.
14. Sinar Kumala	Fraksi Partai Golkar.
15. H. Jimmy Carter	Fraksi Partai Demokrat.
16. Yeni Maria Marselina Katha	Fraksi Partai Demokrat.
17. Faridawaty Darland Atjeh, SE, MM	Fraksi Partai Nasdem.
18. H. Achmad Rasyid	Fraksi Gerindra.
19. Dra. Kuwu Senilawati	Fraksi Gerindra.
20. Andayani, SE	Fraksi Gerindra.
21. Drs. H. Sugiyarto, MAP	Fraksi Gerindra.
22. Hj. Rusita Irma, S.Pi	Fraksi PKB.
23. Evi Kahayanti, S.Sos	Fraksi PKB.
24. Natalia, ST	Fraksi Gabungan (FGP4H).
25. Sirajul Rahman, S.Hut., M.I.Kom	Fraksi Gabungan (FGP4H).
26. Rizki Amalia Darwan Ali, BA(Hons), MSc	Fraksi Gabungan (FGP4H).
27. H. Achmad Amur, SH, MH	Fraksi Gabungan (FGP4H).

Tidak Hadir : 18 Orang.

		Ket :
1. H. Jubair Arifin	Fraksi PDI-Perjuangan	I z i n
2. Andina Thresia Narang, B. Comm	Fraksi PDI Perjuangan	I z i n
3. Hj. Maryani Sabran	Fraksi PDI-Perjuangan	I z i n
4. Ferry Khaidir	Fraksi PDI-Perjuangan	I z i n
5. Sarwani	Fraksi Partai Golkar.	Alm.
6. H. Muhammad Sriosako, S.Sos., MH	Fraksi Partai Demokrat.	I z i n
7. Heri Santoso, ST	Fraksi Partai Demokrat.	I z i n
8. Ir. H. Muhajirin, MP	Fraksi Partai Demokrat.	I z i n
9. Siswandi	Fraksi Partai Demokrat.	I z i n
10. Bryan Iskandar, SE	Fraksi Partai Nasdem.	I z i n
11. Henry, SE, MH	Fraksi Partai Nasdem.	I z i n
12. dr. Niksen S. Bahat	Fraksi Partai Nasdem.	I z i n
13. Toga Hamonangan Nadeak, SH., MH	Fraksi Partai Nasdem.	I z i n
14. Jainudin Karim, SE	Fraksi Gerindra.	I z i n
15. H. Purman Jaya, S.Sos	Fraksi PKB.	I z i n
16. Fajar Hariady	Fraksi PKB.	I z i n

Pimpinan
Wiyatno, SP

17. Tomy Irawan Diran, SE FraksiGabungan (FGP4H). I z i n
18. Sengkon, SE FraksiGabungan (FGP4H). I z i n
: **Assalamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.**
Salam Sejahtera dan Selamat Pagi.

Rapat Paripurna ke – 6 Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, Anggota Dewan yang hadir berjumlah 27 orang dari 44 Anggota Dewan, maka **korum tercapai.**

DenganmengucapkanBismillahirrahmanirrahim,
serayamemohonbimbingandanpetunjukdari Allah SWT, Tuhan Yang
MahaKuasa, RapatParipurnake – 6,MasaPersidangan II (kedua) TahunSidang
2020, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
padapagihariini, Selasa 28Juli 2020,
dinyatakandibukadanterbukauntukumum.

----- **Ketukan Palu Satu Kali** -----

Marilah kita menyanyikan Lagu Kebangsaan “**Indonesia Raya**”

Pimpinan
Wiyatno, SP

: Hadirin dimohon berdiri.

----- **Menyanyikan Lagu Indonesia Raya** -----

Pimpinan
Wiyatno, SP

: Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Yang terhormat :

- Saudara Gubernur Kalimantan Tengah ;
- Saudara Wakil-Wakil Ketua dan semua Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Mewakili Kapolda Kalimantan Tengah ;
- Mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;
- Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Asisten Sekretaris Daerah / Staf Ahli Gubernur dan semua Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta undangan sekalian yang saya hormati.

Pertama – tama marilahkita
selalumemperssembahkanpujidadanyukurkehadirat Allah SWT,Tuhan Yang
MahaKuasa, yang senantiasamelimpahkanrahmatdankarunia-
Nyakepadakitasekalian,
sehinggakitadapathadirmengikutiRapatParipurnaDewan yang terhormat, pada
pagi hari inidalamkeadaansehatwal’afiat.

HadirinRapatParipurnaDewan yang sayahormati,

Adapun Agenda Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini, adalah
sebagai berikut :

Pertama : LaporanHasilRapat Gabungan yang disampaikan olehBadan

Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

Kedua : Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama, antara Gubernur Kalimantan Tengah dan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

Ketiga : Pendapat Akhir/Pidato Gubernur Kalimantan Tengah atas Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang sayahormati,

Perlu kita ketahui bahwa pada tanggal 13 Juli 2020, telah dilaksanakan Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2019, selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2020, telah dilaksanakan Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus Pendapat Akhir Fraksi, dari 7 (tujuh) Fraksi Pendukung Dewan dan telah sepakat menerima dan menyetujui terhadap raperda tersebut.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang sayahormati,

Selanjutnya dipersilakan kepada juru bicara dari Anggota Dewan yang terhormat, untuk menyampaikan Laporan Hasil Rapat Gabungan yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, kami persilakan.

Lap. Hsl rapat
DPRD. Prov. Kalteng
Dra. Kuwu Senilawati : Teks terlampir.

Pimpinan
Wiyatno, SP : Terima kasih.

Demikian tadi telah kita dengarkan bersama, Laporan Hasil Rapat Gabungan yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019, dengan tetap memperhatikan adanya penyempurnaan redaksional, untuk ini kami tanyakan kepada saudara – saudara Anggota Dewan yang terhormat, apakah dapat disetujui?

Anggota Dewan : Setuju !

Pimpinan
Wiyatno, SP : Terimakasih.

----- **Ketukan Palu Satu Kali** -----
HadirinRapatParipurnaDewan yang sayahormati,

Selanjutnya kita akan menyaksikan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama, antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019, kepada Saudara Gubernur dimohon mengambil tempat didepan dan didampingi oleh Wakil Gubernur, Ketua Dewan didampingi oleh Wakil-Wakil Ketua Dewan, di persilahkan. Hadirin dimohon berdiri.

--- **Penandatanganan B.A Persetujuan Bersama** ---
oleh Gub. Kalteng dan Pimpinan DPRD Prov. Kalteng

Pimpinan
Wiyatno, SP : Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Selanjutnya kita akan mendengarkan Pendapat Akhir/Pidato Gubernur Kalimantan Tengah, kepada Saudara Gubernur, dengan hormat kami persilakan.

Gub. Kalteng
H. Sugianto Sabran : Teks terlampir.

Pimpinan
Wiyatno, SP : Demikian tadi telah kita dengarkan bersama pendapat akhir/pidato Gubernur Kalimantan Tengah, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

HadirinRapatParipurnaDewan yang sayahormati,

Dengan demikian berakhirlah agenda Rapat Paripurna ke – 6 Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan, mengucapkan terima kasih, kepada Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan hadirin sekalian, atas kehadiran serta perhatiannya, mengikuti Rapat Paripurna Dewan dari awal hingga selesai, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Rapat Paripurna dinyatakan selesai dan ditutup.

----- **Ketuk Palu Tiga Kali** -----

Pimpinan
Wiyatno, SP : Terima kasih

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rapat Paripurna berakhir dan
Ditutup Pukul : 10.20 WIB

Palangka Raya, 28 Juli 2020

MENGETAHUI :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

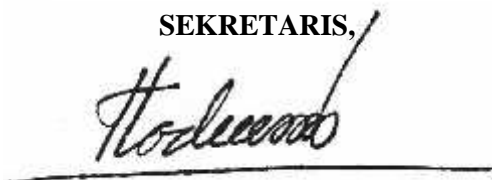
KETUA,



WIYATNO, SP

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SEKRETARIS,



**TANTAN, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640421 199203 1 012**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan S. Parman No. 2 Telpun (0536) 3236320, Fax. 3236329 Palangka Raya 73112

Palangka Raya, 27 Juli 2020

Nomor : 005/1102/DPRD/2020
Lampiran : -
Perihal : **RAPAT PARIPURNA**

K e p a d a

Yth.

di -

PALANGKA RAYA

Bersama ini Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr(i) pada **Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020**, yang akan dilaksanakan pada :

- Hari : SELASA
Tanggal : 28 Juli 2020
Pukul : 09.00 WIB – selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
A c a r a : I. Laporan hasil Rapat Gabungan yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019;
II. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019;
III. Pendapat Akhir/Pidato Gubernur Kalimantan Tengah.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

K E T U A,

WIYATNO, SP

Catatan :

- Pakaian
 - Sipil : Pakaian Sipil Resmi (PSR).
 - TNI/POLRI : Menyesuaikan.
 - Ibu-ibu : Menyesuaikan.
- Undangan Hadir 15 (Lima Belas) Menit sebelum Acara dimulai.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan S. Parman No. 2 Telp. 0536 – 3236320 Fax 3236329 Palangka Raya 73112

A c a r a : RapatParipurnaKe – 6 Masa Persidangan II (Kedua) Tahun Sidang 2020,DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
=====

- H a r i : SELASA
- Tanggal : 28 JULI 2020
- P u k u l : 09.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya.

Susunan Acara :

1. Pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Rapat.
2. Laporan Hasil Rapat Gabungan yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dalam Rangka Membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.
3. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.
4. Pendapat Akhir/Pidato Gubernur Kalimantan Tengah atas Penandatanganan Persetujuan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.
5. P e n u t u p.

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

T A N T A N, S H
Pembina Utama Madya
NIP. 19640421 199203 1 012



L A P O R A N
HASIL RAPAT GABUNGAN YANG DISAMPAIKAN OLEH
BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA KE-6
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020

HARI : SELASA, 28 JULI 2020

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh

Selamat Siang, dan Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Yang Terhormat:

- Saudara Gubernur Kalimantan Tengah;
- Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
- Saudara Ketua dan Wakil - Wakil Ketua Dan Semua Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Saudara KAPOLDA Kalimantan Tengah **IRJEN Pol. Dr. DEDI PRASETYO, M.Hum, M.Si, MM.**, atau yang mewakili;
- Saudara DANREM 102 Panju Panjung Kalimantan Tengah, **BRIGJEN TNI PURWO SUDARYANTO**, atau yang mewakili;
- Saudara Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, **Dr. MUKRI, SH., MH.**, atau yang mewakili ;
- Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, atau yang mewakili;
- Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, atau yang mewakili;
- Saudara Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, atau yang mewakili;
- Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Saudara kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, atau yang mewakili;
- Saudara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Palangka Raya, atau yang mewakili;

- Asisten Sekretaris Daerah / Staf Ahli Gubernur dan Semua Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Kelompok Pakar Dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- Wartawan Media Cetak Dan Elektronik serta hadirin sekalian yang saya hormati.

Mengawali penyampaian Laporan ini, perkenankan kami mengajak kita sekalian, mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya kita dapat hadir pada Rapat Paripurna ini, untuk mengikuti dan mendengarkan Laporan Hasil Rapat Gabungan yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

Kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, kami sampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan ini, demikian juga rasa terima kasih saya kepada rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, atas kepercayaannya kepada saya untuk menyampaikan laporan ini.

Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia

Sebagaimana dengan jadwal pembahasan yang sudah diatur dalam Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, didahului dengan penyampaian Pidato Pengantar dari Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan dilanjutkan dengan Pemandangan Umum dari masing-masing Fraksi Pendukung Dewan. Setelah itu dilanjutkan dengan Pembahasan Raperda dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Bersama Tim Pemerintah Provinsi yang telah dilaksanakan pada Tanggal 7 Juli 2020 dan 13 Juli 2020. Dalam rapat-rapat tersebut, baik Badan Anggaran dan Tim Pemerintah Daerah menyetujui hasil selama pembahasan berlangsung.

Selanjutnya Badan Anggaran melaporkan Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Provinsi

Kalimantan Tengah pada tanggal 14 Juli 2020, dan dilanjutkan Pendapat Akhir Fraksi. Dalam Penyampaian Pendapatnya, semua Fraksi-Fraksi Pendukung Dewan menyepakati untuk ditindaklanjuti dan ditetapkan menjadi Perda Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rapat Paripurna.

Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia

Selanjutnya secara garis besar kami sampaikan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah **Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019** tersebut sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pengajuan dan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 antara lain:

- Pasal 230 Ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 6 (enam) bulan setelah anggaran berakhir.
- Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 6 (enam) bulan setelah anggaran berakhir.

Adapun Materi-materi yang menjadi perhatian selama pembahasan berlangsung antara lain:

1. Naskah Pidato Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran yang terdiri atas:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
 - 3) Neraca Daerah per 31 Desember 2019
 - 4) Laporan Operasional (LO)
 - 5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 6) Laporan Arus Kas tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
 - 7) Catatan Atas Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.
2. Saran-saran dan masukan anggota Badan Anggaran serta hal-hal yang berkembang dalam pembicaraan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Tim yang mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 7 Juli dan 13 Juli 2020.

Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Adapun Hasil Pembahasan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 selama rapat berlangsung Bersama, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

1. Pembahasan Terkait Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

Target Pendapatan Daerah setelah perubahan berjumlah **4.959.931.295.330,00** telah dapat direalisasikan dalam pelaksanaan APBD sebesar **Rp. 4.990.195.455.014,80** atau mengalami kenaikan 0,61% yaitu sebesar **Rp. 30.264.159.684,80**.

Jika dibandingkan realisasi Pendaaptan Daerah Tahun Anggaran 2018, persentase realisasi kenaikan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar yaitu 0,61% atau Rp30.264.159.684,80 **lebih rendah** dari Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar 3,54% Rp121.267.903.637,35.

2. Pembahasan terkait Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Penyerapan Anggaran Belanja Daerah dalam Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **5.064.142.623.787,95** dari Pagu Belanja yang disediakan sebesar **Rp5.653.633.972.425,42**. Penyerapan ini lebih rendah dari target Anggaran Belanja Daerah sebesar **Rp589.491.348.637,48** atau 89,57%.

Jika dibandingkan realisasi Belanja Daerah tahun Anggaran 2018, persentase Tidak Terserapnya Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar yaitu 10,43% atau Rp589.491.348.637,48 **lebih tinggi** dibandingkan Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar 4,63% atau **Rp154.264.948.322,61**.

3. Pembahasan terkait Pembiayaan Tahun Anggaran 2019

Realisasi pembiayaan (netto) pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **Rp.690.274.149.360,98** atau **98,78%** dari jumlah yang dianggarkan **Rp 685.274.149.360,98** dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Penerimaan pembiayaan pada tahun 2019 adalah sebesar **Rp.690.274.149.360,98** atau turun sebesar **98,78%** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar **Rp. 685.274.149.360,98**.
- b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2019 adalah sebesar **Rp.5.000.000.000,00** atau terealisasi 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar **Rp. 5.000.000.000,00**.

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)

Berdasarkan surplus anggaran dan realisasi pembiayaan anggaran maka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat SiLPA sebesar **Rp.611.326.980.587,84** terdiri dari :

- a. Pelampauan pendapatan sebesar Rp. 30.264.159.684,80
- b. Sisa dana Realisasi belanja di bawah pagu sebesar Rp. 418.072.924.037,25

- c. Sisa Realisasi transfer dibawah pagu sebesar Rp. 171.418.424.564,21
- d. Sisa Realisasi penerimaan pembiayaan di atas pagu sebesar Rp. 8.428.527.734,44.

Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Pada proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 terdapat beberapa kesimpulan dan saran.

A. KESIMPULAN

1. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.
3. Target Pendapatan Daerah setelah perubahan berjumlah **4.959.931.295.330,00** telah dapat direalisasikan dalam pelaksanaan APBD sebesar **Rp4.990.195.455.014,80** atau mengalami kenaikan 0,61% yaitu sebesar **Rp30.264.159.684,80**. Diharapkan tahun 2020 pencapaian target pendapatan lebih dioptimalkan lagi.
4. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2019 dengan Pagu sebesar **Rp5.653.633.972.425,42** dan terealisasi sebesar **5.064.142.623.787,95**, atau 89,57%, sehingga realisasi lebih rendah dari pagu yang dianggarkan sebesar **Rp589.491.348.637,48**. Kedepan Dewan mendorong agar pemerintah daerah melalui Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran.
5. Memperhatikan pencapaian target pendapatan dan pencapaian target belanja sebagaimana uraian diatas, dimana belanja lebih kecil dari pendapatan, hal ini mengindikasikan kurang mantap dalam perencanaan dan pengendalian belanja daerah.

6. DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti catatan-catatan dalam pandangan umum Fraksi dan hasil pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :
- Terkait Rancangan Perda Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat **beberapa catatan** yang disampaikan:
1. Pemerintah Provinsi belum berhasil untuk menarik kembali dana kas Provinsi Tahun 2018 yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) sebesar **15,9 Milyar Lebih** dan tertahan sampai saat ini di rekening Bareskrim Mabes POLRI. Hal ini juga telah dipertanyakan DPRD Provinsi pada pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2018 yang lalu.
 2. Pemerintah Provinsi belum sepenuhnya berkomitmen dalam mendorong peningkatan pembangunan di Kabupaten/ Kota melalui penyaluran dana bagi hasil. Hal ini terlihat adanya peningkatan Tunggakan/Utang Pemerintah Provinsi dalam penyaluran Dana Transfer Bagi Hasil yang menjadi Hak Keuangan Kabupaten/Kota jika dibandingkan Tahun Anggaran 2018. Tunggakan transfer Bagi Hasil pada tahun 2019 sebesar 233,15 Milyar lebih tinggi dari Tahun 2018 yaitu 211, 74 Milyar. Hal ini sedikit banyak telah mengganggu manajemen kas dan pendanaan program pembangunan di kabupaten/kota
 3. Dilihat dari aspek rasio fleksibilitas keuangan yang negatif, hal itu menunjukkan struktur APBD tidak fleksibel. Keputusan alokasi belanja tidak memungkinkan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga dan tidak teranggarkan sebelumnya. Seperti pengalokasian bantuan bagi daerah lain yang terkena bencana alam, sehingga akhirnya mengakibatkan rasionalisasi anggaran

belanja program/kegiatan SOPD. Ini menjadi pertimbangan ke depan karena berbagai situasi ke depan yang perlu dipikirkan seperti antisipasi permintaan dana hibah oleh KPU Kalteng untuk penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur terkait anggaran tambahan penyiapan APD dimasa Pandemic COVID-19 ini.

Tidak fleksibelnya Keuangan Pemerintah ini seharusnya dapat diantisipasi dengan pembuatan *Pos Pembentukan Dana Cadangan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur* dalam APBD sehingga tidak menyedot anggaran belanja Langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2019. Namun dampak tidak adanya pos tersebut, TAPD akhirnya melakukan pemotongan anggaran belanja di berbagai SOPD untuk memenuhi ketersediaan anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dalam APBD. Hal tersebut berimplikasi pada tidak tercapainya secara maksimal berbagai target capaian Pemerintah Provinsi dalam RPJMD yang dilaksanakan SOPD terkait tahun 2019.

4. Pemerintah Provinsi belum sungguh-sungguh meningkatkan performa dan membenahi tata Kelola maupun profesionalitas PT. Banama Tingang Makmur. Kinerja PT. Banama Tingang Makmur masih memprihatinkan karena tidak ada laba Tahun 2019. BUMD ini tidak mampu memberikan bagian laba yang rasional untuk peningkatan PAD, dan berbanding terbalik jika dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah diinvestasikan kepada BUMD tersebut.
5. Pemerintah Provinsi belum mampu berupaya secara maksimal untuk merevitalisasi kinerja BUMD sesuai target dalam RPJMD. Hal tersebut terlihat dari capaian target / realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 78,92 Milyar. Hal itu yang masih jauh dari capaian target yang diinginkan pemerintah provinsi pada tahun 2019 sebesar 275 Milyar

Lebih sebagaimana dalam Perda No. 1 Tahun 2017 tentang RJPMD Provinsi Kalteng.

6. Besarnya SILPA APBD Tahun Anggaran 2019 yaitu **Rp. 611.326.980.587,84** (khususnya Sisa dana *Realisasi Belanja Di Bawah Pagu* sebesar Rp.418.072.924.037,25) yang menggambarkan belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dianggarkan yang juga menjadi ukuran kinerja SOPD dan menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk penyusunan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

B. SARAN

1. Perlu ada kejelasan tindak lanjut yang konkret dari Pemerintah Provinsi untuk menarik kembali dana kas Provinsi Tahun 2018 yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) sebesar **15,9 Milyar Lebih** dan tertahan sampai saat ini di rekening Bareskrim Mabes POLRI.
2. Pemerintah Daerah melalui Instansi Teknis untuk melakukan terobosan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang belum maksimal.
3. Pemerintah Daerah segera memberikan catatan kepada SKPD yang tidak mampu menyerap anggaran sesuai dengan target yang telah ditentukan.
4. Berkaitan dengan masalah Aset yang terus menerus menjadi sumber masalah agar segera dilakukan langkah-langkah konkrit seperti Pencatatan Aset-Aset SMA/SMK, penarikan Aset, hibah Aset dan penghapusan aset daerah. Hal ini disampaikan untuk menjadi perhatian Pemerintah Provinsi agar tata kelola keuangan dapat lebih optimal dan opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat dipertahankan pada masa yang datang.
5. Disarankan SILPA Tahun Anggaran 2019 yang ditampung dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020, diprioritaskan penggunaannya untuk investasi pemerintah; pengurangan utang

Dana Transfer kepada Kabupaten/Kota; pembentukan dana cadangan; dan/atau pendanaan belanja pemerintah yang sasarannya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Terhadap evaluasi atas pemantauan tindak lanjut yang dilakukan BPK RI selama ini, DPRD mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan BPK RI agar opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat dipertahankan pada tahun berikutnya.

Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia

Sebelumnya kami dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Tim Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan tengah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada seluruh Fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

1. Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya **Ina Prayawati**
2. Fraksi Partai GOLKAR dengan juru bicara **H. Maruadi, S.H., S.Sos.**
3. Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara **Siswandi**
4. Fraksi Partai NasDem dengan juru bicara **Henry, SE**
5. Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara **Dra. Kuwu Senilawati**
6. Fraksi PKB dengan juru bicara **Fajar Hariady**
7. Fraksi Gabungan (PAN, PKS, PPP, Hanura & Perindo) dengan juru bicara **H. Achmad Amur, SH, MH.** yang telah **menerima dan menyetujui** Raperda tersebut menjadi Peraturan Daerah. Adapun dokumen seluruh pendapat akhir fraksi menjadi bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia

Demikian laporan hasil rapat gabungan Komisi DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Harapan kami kiranya kerjasama yang baik antara pihak Dewan dengan pihak Pemerintah Daerah sebagai perwujudan pelaksanaan azas demokrasi dapat terus dibina dan ditingkatkan demi keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjukNya kepada kita sekalian, dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya.

Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya.

Wassalam'mualaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.

**PIMPINAN RAPAT GABUNGAN KOMISI-KOMISI
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



H. JIMMY CARTER

JURU BICARA



Dra. KUUU SENILAWATI

BERITA ACARA

Nomor : 900/ /BKAD/2020
Nomor : 160/ 40 /DPRD/2020

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. SUGIANTO SABRAN : Gubernur Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di Palangka Raya selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. WIYATNO, S.P : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Ir. H. ABDUL RAZAK : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. H. JIMMY CARTER : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. FARIDAWATY DARLAND ATJEH, S.E.,M.M : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 28 Juli 2020

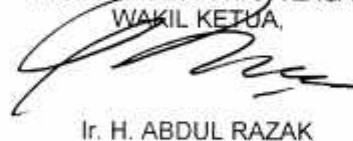
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


H. SUGIANTO SABRAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


KETUA,
WIYATNO, SP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
WAKIL KETUA,






Ir. H. ABDUL RAZAK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
WAKIL KETUA,


H. JIMMY CARTER

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
WAKIL KETUA,


FARIDAWATY DARLAND ATJEH, S.E., M.M

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
SEKDA	
ASISTEN III	
KEPALA BADAN	
KEPALA BIDANG	
KEPALA SUB BIDANG	



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PIDATO

RAPAT PARIPURNA

**PENDAPAT AKHIR GUBERNUR ATAS
PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Palangka Raya, 28 Juli 2020

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh;
Tabe Salamat Lingu Nalatai Salam Sujud
Karendeng Malempang;

Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kaju
Bata;

Saloom, Om Swastiastu Namu Budaya, Salam
Kebajikan;

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita
Semua;

Yang terhormat:

- ✓ Saudara [✓]Ketua, Saudara Wakil [✓]Ketua dan Para
Anggota [✓]Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah;
- ✗ ~~Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;~~
- ✓ Saudara ~~KAPOLDA~~ Kalimantan Tengah;
WAKA POLDA

2

- ~~⊗~~ Saudara Komandan KOREM 102/PJG Kalimantan Tengah;
- ~~⊗~~ Saudara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
- ~~⊗~~ Saudara Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah;
- ~~⊗~~ Saudara Kepala Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
- ~~⊗~~ Saudara Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Tengah;
- ~~⊗~~ Saudara Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah;
- ~~⊗~~ Saudara Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- ✓ Saudara Sekretaris Daerah;
- ✓ Staf Ahli Gubernur, Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

- ✓ Para Kepala Badan/Dinas/Kantor Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- ✓ Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- ✓ Undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sampai dengan hari ini, kita semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan, untuk karya kita, tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan Negara khususnya Provinsi Kalimantan Tengah.

4

Hanya atas ridho-Nya pula, hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara Rapat Paripurna Persetujuan Bersama terhadap RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hotmati.

Syukur Alhamdulillah, serangkaian proses mulai dari penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 dapat terlaksana dengan baik, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali dapat meraih opini WTP dari BPK RI untuk yang ke-6 kalinya.

Selanjutnya, Rapat Paripurna Persetujuan Bersama RAPERDA yang digelar ini tidak lain untuk

5

memberikan dasar hukum yang jelas, sekaligus dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang taat pada peraturan perundang-undangan, akuntabel, efisien, efektif, ekonomis, dan transparan, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan Persetujuan Bersama RAPERDA ini kami berharap, akan berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang bermuara terhadap meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama legislatif dan eksekutif, mulai dari penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban

6

APBD Tahun Anggaran 2019 yang dapat terlaksana dengan baik.

Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua dan Anggota Banggar yang telah melaksanakan pembahasan atas RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, mulai dari pembahasan baik di Banggar maupun di Komisi-komisi, harmonisasi Banggar sampai dengan finalisasi.

Rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan oleh DPRD baik pada saat pembahasan di Banggar, akan kami tindak lanjuti bersama-sama dalam proses penyusunan anggaran murni dan perubahan, sehingga dapat

7

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kedepan, saya tetap mengharapkan adanya kerjasama yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif, sehingga pelaksanaan APBD tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik, dan kami mengharapkan kepada semua pihak terutama DPRD Provinsi Kalimantan Tengah agar tetap melakukan pengawasan, supaya dalam pelaksanaan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Mudah-mudahan kerjasama yang baik ini akan terus berlanjut untuk masa-masa yang akan datang, diiringi harapan semoga apa yang kita rencanakan dan kerjakan bersama ini akan

bermanfaat bagi masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, perlu saya sampaikan bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 telah disalurkan dana hibah untuk penyelenggaraan dan pengamanan Pilgub Tahun 2020 kepada KPU, BAWASLU, POLDA, dan KOREM 102 Panju Panjung.

Hal ini lebih cepat 7 hari dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD, pasal 16, ayat (4) huruf b, tahap kedua paling sedikit 60%

9

(enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Untuk itu saya minta agar pelaksanaan Pilgub Tahun 2020 di Kalimantan Tengah bisa di laksanakan sesuai tahapan dari KPU. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban dalam menyongsong pesta demokrasi dan di harapkan adanya peningkatan partisipasi pemilih untuk menentukan pemimpin Kalimantan Tengah periode 2021-2024.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hotmati.

Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya selama ini.

Wabillahitaufiqwalhidayah.

Wassalamu`alaikum Warrahmatullahi

Wabarakatuh.

Palangka Raya, 28 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

**RAPAT PARIPURNA KE – 7 PENUTUPAN
MASA PERSIDANGAN II (KEDUA) TAHUN SIDANG 2020,
SEKALIGUS RAPAT PARIPURNA KE – 1 PEMBUKAAN
MASA PERSIDANGAN III (KETIGA) TAHUN SIDANG 2020,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
=====

Hari : Senin
Tanggal : 28 Juli 2020
Pukul : 09.30 WIB
Sifat Sidang : Terbuka untuk Umum
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. S. Parman No. 02 Palangka Raya.

- A c a r a :
- I. Pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Rapat.
 - II. Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, sekaligus Pidato Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 dan Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020.
 - III. Penyerahan Naskah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, dari Gubernur Kalimantan Tengah kepada Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
 - IV. Pidato Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Penutupan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan III (ketiga) Tahun Sidang 2020.
 - V. Pembacaan Do'a Penutupan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan III (ketiga) Tahun Sidang 2020.
 - VI. P e n u t u p .
- PimpinanRapat : H. Jimmy Carter, Wakil KetuaDewanPerwakilan Rakyat Daerah ProvinsiKalimantan Tengah.
- Sekretaris : Tantan, SH, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Jumlah Anggota : 45 Orang.
- | | | |
|---------------------------------|----|-------|
| 1. FraksiPDI-Perjuangan. | 12 | Orang |
| 2. FraksiPartai Golongan Karya. | 7 | Orang |
| 3. FraksiPartaiDemokrat. | 6 | Orang |
| 4. FraksiPartaiNasdem. | 5 | Orang |
| 5. FraksiPartaiGerindra. | 5 | Orang |
| 6. FraksiPKB. | 4 | Orang |
| 7. FraksiGabungan (FGP4H). | 6 | Orang |

Hadir

: 28 Orang.

1. Wiyatno, SP	Fraksi PDI-Perjuangan
2. Ir. Yulilis	Fraksi PDI-Perjuangan
3. Drs. Duwel Rawing	Fraksi PDI-Perjuangan
4. Ina Prayawati, SE	Fraksi PDI-Perjuangan
5. Ir. Lohing Simon	Fraksi PDI-Perjuangan
6. Hj. Maryani Sabran	Fraksi PDI-Perjuangan
7. Ir. H. Abdul Razak	Fraksi Partai Golkar.
8. Dra. Siti Nafsiah, M.Si	Fraksi Partai Golkar.
9. H. Maruadi, SH, S.Sos	Fraksi Partai Golkar.
10. Hj. Sri Neni Trianawati, SE	Fraksi Partai Golkar.
11. H. Sudarsono, SH	Fraksi Partai Golkar.
12. H. Jimmy Carter	Fraksi Partai Demokrat.
13. H. Muhammad Sriosako, S.Sos., MH	Fraksi Partai Demokrat.
14. Ir. H. Muhajirin, MP	Fraksi Partai Demokrat.
15. Siswandi	Fraksi Partai Demokrat.
16. Henry, SE, MH	Fraksi Partai Nasdem.
17. dr. Niksen S. Bahat	Fraksi Partai Nasdem.
18. H. Achmad Rasyid	Fraksi Gerindra.
19. Jainudin Karim, SE	Fraksi Gerindra.
20. Dra. Kuwu Senilawati	Fraksi Gerindra.
21. H. Purman Jaya, S.Sos	Fraksi PKB.
22. Fajar Hariady	Fraksi PKB.
23. Evi Kahayanti, S.Sos	Fraksi PKB.
24. Tomy Irawan Diran, SE	Fraksi Gabungan (FGP4H).
25. Natalia, ST	Fraksi Gabungan (FGP4H).
26. Sirajul Rahman, S.Hut., M.I.Kom	Fraksi Gabungan (FGP4H).
27. Rizki Amalia Darwan Ali, BA(Hons), MSc	Fraksi Gabungan (FGP4H).
28. Sengkon, SE	Fraksi Gabungan (FGP4H).

Tidak Hadir

: 17 Orang.

		Ket :
1. Drs. Yohannes Freddy Ering, M.Si	Fraksi PDI-Perjuangan	I z i n
2. H. Jubair Arifin	Fraksi PDI-Perjuangan	I z i n
3. Ir. Artaban, MH	Fraksi PDI Perjuangan	I z i n
4. Andina Thresia Narang, B. Comm	Fraksi PDI Perjuangan	I z i n
5. Irawati, S.Pd	Fraksi PDI-Perjuangan	I z i n
6. Ferry Khaidir	Fraksi PDI-Perjuangan	I z i n
7. Sinar Kumala	Fraksi Partai Golkar.	I z i n
8. Sarwani	Fraksi Partai Golkar.	Alm.
9. Heri Santoso, ST	Fraksi Partai Demokrat.	I z i n
10. Yeni Maria Marselina Katha	Fraksi Partai Demokrat.	I z i n
11. Faridawaty Darland Atjeh, SE, MM	Fraksi Partai Nasdem.	I z i n
12. Bryan Iskandar, SE	Fraksi Partai Nasdem.	I z i n
13. Toga Hamonangan Nadeak, SH., MH	Fraksi Partai Nasdem.	I z i n
14. Andayani, SE	Fraksi Gerindra.	I z i n
15. Drs. H. Sugiyarto, MAP	Fraksi Gerindra.	I z i n
16. Hj. Rusita Irma, S.Pi	Fraksi PKB.	I z i n
17. H. Achmad Amur, SH, MH	Fraksi Gabungan (FGP4H).	I z i n

Pimpinan
H. Jimmy Carter

: **Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera dan Selamat Pagi.**

Rapat Paripurna ke – 7 Penutupan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, sekaligus Rapat Paripurna ke – 1 Pembukaan Masa Persidangan III (ketiga) Tahun Sidang 2020, berdasarkan kehadiran Anggota Dewan berjumlah 28 orang, maka **korum tercapai**.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Paripurna ke – 7 Penutupan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, sekaligus Rapat Paripurna ke – 1 Pembukaan Masa Persidangan III (ketiga) Tahun Sidang 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pada pagihari ini, Senin 7 September 2020, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

----- **Ketukan Palu Satu Kali** -----

Marilah kita menyanyikan Lagu Kebangsaan “**Indonesia Raya**”

Pimpinan
H. Jimmy Carter

: Hadirin dimohon berdiri.

----- **Menyanyikan Lagu Indonesia Raya** -----

Pimpinan
H. Jimmy Carter

: Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Yang terhormat :

- Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah ;
- Saudara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua dan semua Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Mewakili Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Palangka Raya;
- Asisten Sekretaris Daerah / Staf Ahli Gubernur dan semua Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta undangan sekalian yang saya hormati.

Pertama – tama marilah kita selalumpersembahkanpujidan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehinggakita dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, pada pagi hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Adapun Agenda Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini, adalah sebagai berikut :

Pertama : Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, sekaligus Pidato Penutupan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020 dan Pembukaan Masa Persidangan III (ketiga) Tahun Sidang 2020;

- Kedua : Penyerahan Naskah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, dari Gubernur Kalimantan Tengah kepada Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- Ketiga : Pidato Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Penutupan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan III (ketiga) Tahun Sidang 2020;
- Keempat : Pembacaan Do'a Penutupan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan III (ketiga) Tahun Sidang 2020.

HadirinRapatParipurnaDewan yang sayahormati,

Marilah kita sama-sama mendengarkan, Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, sekaligus Pidato Penutupan Masa Persidangan II (kedua) Tahun Sidang 2020 dan Pembukaan Masa Persidangan III (ketiga) Tahun Sidang 2020, kepada Saudara Gubernur Kalimantan Tengah, dengan hormat kami persilakan.

Wagub Kalteng
Habib Ismail Bin Yahya : Teks terlampir.

Pimpinan
H. Jimmy Carter : Terimakasih, kepada Saudara Gubernur Kalimantan Tengah.

Selanjutnya penyerahan secara simbolis Naskah Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, dari Gubernur Kalimantan Tengah kepada Pimpinan Dewan, kepada Gubernur dimohon mengambil tempat didepan dan didampingi oleh Wakil Gubernur, Ketua Dewan didampingi oleh Wakil-Wakil Ketua Dewan, di persilahkan.

Hadirin dimohon berdiri.

**--- Penyerahan Naskah Raperda ---
dari Gub. Kalteng kepada Pimpinan Dewan**

Pimpinan : Hadirin dipersilakan duduk kembali, kepada Saudara Gubernur diucapkan

H. Jimmy Carter

terimakasih.

Dengan telah disampaikannya Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah, dan telah diserahkan secara resmi kepada Pimpinan Dewan, dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini.

Kami selaku Pimpinan Dewan secara resmi menerima, serta akan menyerahkan kepada Dewan, untuk dibahas pada tahap-tahap pembicaraan selanjutnya, sesuai Jadwal Kegiatan Dewan dan Ketentuan Peraturan dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Tengah..

HadirinRapatParipurnaDewan yang sayahormati,

Pada hari ini kita melaksanakan Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II (kedua) Tahun sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan III (ketiga) Tahun Sidang 2020, untuk itu saya akan membacakan pidato, sebagai berikut.

Ketua
DPRD Prov. Kalteng
Wiyatno, SP

: Teks terlampir.

HadirinRapatParipurnaDewan yang sayahormati,

Untuk mensyukuri rahmat dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mohon bimbingan serta penyertaan-Nya, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita selanjutnya, marilah kita bersama-sama berdo'a, yang akan dipimpin oleh petugas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, kami persilakan.

Petugas dari
Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Prov. Kalteng
H. M. Isnaini, S.Ag

: Teksterlampir.

Pimpinan
H. Jimmy Carter

: Terima kasih.

HadirinRapatParipurnaDewan yang sayahormati,

Dengan demikian berakhirlah agenda Rapat Paripurna ke – 7, Penutupan Masa Persidangan II (kedua) Tahun sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan III (ketiga) Tahun Sidang 2020, Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan, mengucapkan terima kasih, kepada Saudara Wakil Gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan hadirin sekalian, atas kehadirannya, mengikuti Rapat Paripurna Dewan dari awal hingga selesai, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Rapat Paripurna dinyatakan selesai dan ditutup.

----- **Ketuk Palu Tiga Kali** -----

Pimpinan
H. Jimmy Carter

: Terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

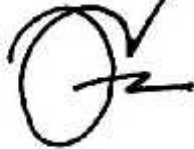
Rapat Paripurna berakhir dan
Ditutup Pukul : 10.10 WIB

Palangka Raya, 7 September 2020

MENGETAHUI :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

WAKILKETUA,



H. JIMMY CARTER

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SEKRETARIS,



**TANTAN, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640421 199203 1 012**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan S. Parman No. 2 Telpn (0536) 3236320, Fax. 3236329 Palangka Raya 73112

Palangka Raya, 3 September 2020

Nomor : 005/1228/DPRD/2020
Lampiran : -
Perihal : **RAPAT PARIPURNA**

K e p a d a

Yth.

di -

PALANGKA RAYA

Bersama ini Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr(i) pada **Rapat Paripurna Ke -7 Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020, sekaligus Rapat Paripurna Ke - 1 Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020**, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : SENIN

Tanggal : 7 September 2020

Pukul : 09.00 WIB – selesai.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

A c a r a : I. Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
II. Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan masa Persidangan III Tahun Sidang 2020.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

K E T U A,

WIYATNO, SP

Catatan :

1. Pakaian
 - Sipil : Pakaian Sipil Resmi (PSR).
 - TNI/POLRI : Menyesuaikan.
 - Ibu-ibu : Menyesuaikan.
2. Undangan Hadir 15 (Lima Belas) Menit sebelum Acara dimulai.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan S. Parman No. 2 Telp. 0536 – 3236320 Fax 3236329 Palangka Raya 73112

A c a r a : RapatParipurnaKe – 7, Penutupan Masa Persidangan II (Kedua) Tahun Sidang 2020, sekaligus Rapat Paripurna Ke – 1 Pembukaan Masa Persidangan III (Ketiga) Tahun Sidang 2020,DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
.....

- H a r i : SENIN
- Tanggal : 7 SEPTEMBER 2020
- P u k u l : 09.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya.

Susunan Acara :

- I. Pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Rapat.
- II. Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, sekaligus Pidato Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 dan Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020.
- III. Penyerahan Naskah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, dari Gubernur Kalimantan Tengah kepada Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
- IV. Pidato Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Penutupan Masa Persidangan II (Kedua) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan III (Ketiga) Tahun Sidang 2020.
- V. Pembacaan Do'a Penutupan Masa Persidangan II (Kedua) Tahun Sidang 2020, sekaligus Pembukaan Masa Persidangan III (Ketiga) Tahun Sidang 2020.
- VI. P e n u t u p.

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

T A N T A N, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640421 199203 1 012



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

**PIDATO PENGANTAR
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
TERHADAP RAPERDA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN TENGAH SEKALIGUS
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN II TAHUN
SIDANG 2020 DAN PEMBUKAAN MASA
PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020
DISAMPAIKAN
DALAM RAPAT PARIPURNA KE-7
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TANGGAL 7 SEPTEMBER 2020**



**PALANGKA RAYA
2020**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

**PIDATO PENGANTAR
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
TERHADAP RAPERDA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN TENGAH SEKALIGUS
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN II TAHUN
SIDANG 2020 DAN PEMBUKAAN MASA
PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020
DISAMPAIKAN
DALAM RAPAT PARIPURNA KE-7
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TANGGAL 7 SEPTEMBER 2020**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

1

Om Swastiastu. Salam Kebajikan

Syalom.

Salam Sejahtera untuk Hadirin Sekalian,

Tabe Salamat Lingu Nalatai Salam Sujud Karendem

Malempang, Adil Ka'talino Bacuramin Ka'saruga,

Ba'sengat Ka'jubata

Yang Terhormat,

- Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- Saudara-Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; /MEWAKILI
- Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah;
- Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah;
- Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Saudara Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Kalimantan Tengah;
- Saudara Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Tengah; /MEWAKILI

2

- Saudara Pimpinan Bank Indonesia Kalimantan Tengah;
- Saudara Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Saudara Pimpinan Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
- Saudara Pimpinan Perguruan Tinggi baik Negeri dan Swasta Se- Kota Palangka Raya; /MEWAKILI
- Saudara- Saudara Rektor Universitas Negeri dan Swasta Se- Kota Palangka Raya; /MEWAKILI
- Para Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, Kepala Instansi Vertikal, Kepala SOPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Saudara-Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian/Dinas/Direktorat/Badan/Lembaga /Unit Satuan Kerja Provinsi Kalimantan Tengah;
- Saudara-Saudara Tenaga Ahli DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- Para Sesepeuh Daerah, Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat, Pimpinan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Insan Pers,

Generasi Muda, serta Hadirin dan Undangan yang Saya Hormati.

Pertama - tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam keadaan sehat wal'afiat.

Dalam Forum Rapat Paripurna pada hari ini, saya diagendakan untuk menyampaikan Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

SIDANG DEWAN BESERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

4

Pada masa sekarang ini, tantangan industri perbankan semakin ketat sehingga memunculkan kekhawatiran pada ketidakmampuan Bank-bank yang berada di BUKU I dan BUKU II untuk bertahan. bahkan semakin pesatnya perkembangan perbankan dengan fasilitasi atau layanan digitalnya yang semakin variatif dan canggih.

Tidak hanya persaingan dengan sesama Bank namun juga pada saat ini Bank dihadapkan pada persaingan dengan lembaga non bank yang menyediakan layanan finansial berbasis teknologi digital.

Untuk itu, Bank Kalteng yang saat ini masuk dalam Kelompok BUKU II sangat perlu untuk segera melakukan tindakan dan aksi nyata agar dapat bertahan ditengah persaingan perbankan sehingga dapat meningkatkan penilaian dan kepercayaan publik.

Salah satu yang paling penting dalam mewujudkan kemampuan bank dalam persaingan tersebut adalah tersedianya permodalan yang kuat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 12/POJK03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Dalam peraturan ini pihak regulator mendorong penguatan permodalan oleh Bank dan salah satunya oleh Bank yang dimiliki oleh BUMD. Disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa Modal Inti Minimum yang wajib dimiliki bank adalah paling sedikit Rp3.000.000.000.000,- (Tiga Triliun Rupiah) dan khusus bagi bank milik Pemerintah Daerah wajib memenuhi Modal Inti Minimum tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa setiap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah wajib dituangkan dalam

6

Peraturan Daerah sebelum Persetujuan Bersama antara Gubernur dan DPRD atas Raperda tentang APBD.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah ini akan diatur penambahan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah baik yang berupa uang dan barang dengan total nilai Rp 698.000.000.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Rupiah).

Adapun rincian pertahun penyertaan modal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2020 akan dilakukan Penyertaan Modal berupa Tanah yang di atasnya terdapat Bangunan Gedung Koni dan Kantor DISPORA Kalimantan Tengah dengan Nilai berdasarkan hasil penilaian Penilai Independen sebesar Rp 49.538.710.000 (Empat Puluh Sembilan

7

Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

- b. Tahun 2021 akan dilakukan Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp124.500.000.000 (Seratus Dua Puluh Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- c. Tahun 2022 akan dilakukan Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp174.500.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- d. Tahun 2023 akan dilakukan Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp174.500.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- e. Tahun 2024 akan dilakukan Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp174.500.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Dengan demikian, rencana Penyertaan Modal sebagaimana yang saya sampaikan ini, diharapkan pada Tahun 2024 dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Materi Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, akan diserahkan kepada Dewan yang terhormat untuk dibahas dalam persidangan selanjutnya.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 yang lalu DPRD Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sidang Paripurna, Rapat Komisi,

9

Rapat gabungan serta Rapat Dengar Pendapat yang telah diagendakan, antara lain telah dibahasnya 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan masyarakat Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah serta semua pihak yang telah bekerja keras, sehingga telah ditetapkannya 1 (satu) buah Raperda menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG SAYA MULIAKAN,

Memasuki Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020, sesuai dengan agenda/jadwal persidangan yang akan ditetapkan, tentunya akan dilanjutkan pembahasan tentang :

10

1. Raperda tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
7. Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

Melalui Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, saya berharap dapat merampungkan berbagai materi persidangan yang telah ditetapkan dan dijadwalkan.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga kita semua senantiasa selalu mendapat berkah, bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawab kita bersama bagi kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah yang kita cintai dan Kita banggakan, demi terwujudnya masyarakat Kalimantan Tengah yang "BERKAH" (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om Santi Santi Santi Om.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum perlu dilakukan peningkatan modal oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah untuk tetap menjadi bentuk Bank Umum;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu pemegang saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah wajib melakukan penambahan modal untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bang Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bang Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAN
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN KALTENG DAERAH
KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang disingkat PT Bank Kalteng yang selanjutnya disebut Bank Kalteng adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada Bank Kalteng, adalah :

- a. Untuk meningkatkan daya saing serta guna mengantisipasi perkembangan ekonomi lokal, regional, nasional maupun global.
- b. Untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk.
- c. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas, dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah.
- d. Untuk memenuhi kriteria sebagai Bank Sehat.

BAB III
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal kedalam modal saham Bank Kalteng sebesar Rp698.000.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan milyar rupiah).

Pasal 5

Jumlah modal daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Bank Kalteng sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah).

Pasal 6

Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksud Pasal 4, maka jumlah penyertaan modal daerah kedalam modal saham Bank Kalteng adalah sebesar Rp1.098.000.000.000,00 (satu trilyun Sembilan puluh delapan milyar rupiah).

BAB IV

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Provinsi menganggarkan dalam APBD Provinsi mulai Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 secara bertahap yang besarnya akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

FAHRIZAL FITRI

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (/2020)**

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2020
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN KALTENG
DAERAH KALIMANTAN TENGAH

I. UMUM

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, maka secara langsung membuat keharusan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah untuk melakukan peningkatan Modal Inti sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 12/POJK03/2020 tersebut agar tetap menjadi Bank Umum.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu pemegang saham, bahkan sebagai pemegang saham mayoritas secara langsung mempunyai kewajiban untuk melakukan penambahan modal sesuai dengan ketentuan tersebut. Penambahan Penyertaan Modal ini wajib dilakukan melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR...



P I D A T O

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PADA RAPAT PARIPURNA KE-7
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG
2020, SEKALIGUS RAPAT PARIPURNA KE-1
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III TAHUN
SIDANG 2020**

HARI SENIN, 7 SEPTEMBER 2020

***ASSALAMU'ALAIKUM
WABARAKATUH;***

WARAKHMATULLAHI

*SYALOM, OM SWASTIASTU, NAMO BUDAYA SALAM
KEBAJIKAN RAHAYU;*

*TABE SALAMAT LINGU / NALATAI, SALAM SUHUJUD
KARENDEM MALEMPANG, ADIL KATALINO BACURAMIN
KASARUGA, BASENGAT KAJUBATA,... ARUS...*

SAMBUTAN KETUA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1

- YTH. SAUDARA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH;
- YTH. SAUDARA WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH;
- YTH. SAUDARA WAKIL-WAKIL KETUA DAN SEMUA ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
- YTH. SAUDARA UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ATAU YANG MEWAKILI;
- YTH. SAUDARA KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA, ATAU YANG MEWAKILI;
- YTH. SAUDARA KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH, ATAU YANG MEWAKILI;
- YTH. SAUDARA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
- YTH. SAUDARA KEPALA BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI PALANGKA RAYA, ATAU YANG MEWAKILI;
- YTH. SAUDARA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI PALANGKA RAYA, ATAU YANG MEWAKILI;
- YTH. SAUDARA DIREKTUR UTAMA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH DI PALANGKA RAYA, ATAU YANG MEWAKILI;

- YTH. ASISTEN SEKRETARIS DAERAH/STAF AHLI GUBERNUR DAN SEMUA KEPALA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
- YTH) KELOMPOK PAKAR DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
- YTH) WARTAWAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA UNDANGAN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI.

ALHAMDULILLAH HIROBIL'ALAMIN, PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA, TUHAN YANG MAHA KUASA, KARENA RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, SHINGGA KITA DAPAT MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA KE-7 PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020, SEKALIGUS RAPAT PARIPURNA KE-1 PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

SAMPAI SAAT INI KITA MASIH TERUS BERHADAPAN DENGAN ANCAMAN WABAH PANDEMI COVID-19, TATA KEHIDUPAN NORMAL BARU (NEW NORMAL) TIDAK BERARTI

KITA BERHENTI DARI ANCAMAN WABAH PANDEMI COVID-19, TETAPI KITA HARUS BERUPAYA BERAKTIVITAS MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI KITA MASING-MASING AGAR KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN TETAP BERJALAN SEBAGAIMANA YANG DIHARAPKAN DENGAN TETAP MENGEDEPANKAN DAN MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN.

SITUASI TERSEBUT HENDAKNYA TIDAK MENJADI PENGHALANG, BAHKAN DAPAT MENJADI PEMICU DAN PEMACU AGAR KITA TETAP DAPAT MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK. MARI KITA BERKOMITMEN MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG TELAH DIPERCAYAKAN NEGARA DAN MASYARAKAT KEPADA KITA. MELAKSANAKAN TUGAS SECARA SUNGUH-SUNGGUH SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN, SEPERTI HALNYA HADIR PADA KEGIATAN RAPAT PARIPURNA INI.

SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

PADA RAPAT PARIPURNA KE-7 PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020, SEKALIGUS RAPAT

PARIPURNA KE-1 PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020, KITA BERSAMA-SAMA TELAH MENDENGARKAN PIDATO PENGANTAR GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TERHADAP RAPERDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.

SEMOGA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI, DAN JUGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH LAINNYA DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK DAN DAPAT DISAHKAN MENJADI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAIMANA YANG TELAH DIAGENDAKAN DALAM PRIORITAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2020.

SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN WABAH PANDEMI COVID-19 TELAH BANYAK MENYITA TENAGA DAN BIAYA, SEBAGIAN APBD TAHUN 2020 DIREFOCUSING

UNTUK KEGIATAN TERSEBUT, DAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH JUGA MENDORONG AGAR EKSEKUTIF SELAKU MITRA KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAPAT SECARA PROAKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABLE DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN TERKAIT PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENANGANAN COVID-19, TENTUNYA SESUAI KETENTUAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

TIDAK TERASA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020 TELAH BERAKHIR DALAM RENTANG WAKTU TANGGAL 15 JUNI S/D 7 SEPTEMBER 2020, MASIH ADA BEBERAPA AGENDA PENTING YANG BELUM DAPAT DILAKSANAKAN SESUAI JADWAL. NAMUN ADA BEBERAPA AGENDA PENTING TELAH DILAKSANAKAN PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020 DIANTARANYA SEBAGAI BERIKUT :

1. PENGESAHAN RAPERDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN;

2. PEMBAHASAN LANJUTAN RAPERDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH;
3. PENGAWASAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PUSAT DAN BANSOS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, OLEH PANSUS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
4. KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH YANG MENJADI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI DESA DAMBUNG KABUPATEN TABALONG DAN KABUPATEN BARITO TIMUR;
5. KUNJUNGAN KERJA KE DESA LAMAN KINIPAN KABUPATEN LAMANDAU, TERKAIT PERMASALAHAN HUTAN ADAT DENGAN PIHAK PERUSAHAAN SWASTA.

SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

PERLU KITA KETAHUI BERSAMA, MASIH ADA BEBERAPA AGENDA PENTING YANG MENJADI PRIORITAS PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020, ANTARA LAIN :

1. PEMBAHASAN RANCANGAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2021;
2. PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG RANCANGAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021;
3. PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG TATA BATAS;
4. PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA;
5. PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
6. PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;
7. PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH.
8. KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) RUMAH SAKIT PROVINSI TIPE A.
9. RAPERDA INISIATIF DPRD TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAAAN HAK-HAK ADAT DAYAK KALIMANTAN TENGAH.
10. PENETAPAN PROPEMPERDA TAHUN 2021.

MENYIKAPI ADANYA BEBERAPA KASUS DAN PERMASALAHAN SOSIAL MASYARAKAT, JUGA AGENDA-AGENDA YANG SANGAT PENTING TERSEBUT MERUPAKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG HARUS KITA SELESAIKAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT.

DEMIKIAN JUGA MENJELANG PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PADA TANGGAL 9 DESEMBER 2020, AGAR KITA SALING MENJAGA DAN MENYIKAPI KONDISI SOSIAL, POLITIK DAN KEAMANAN KALIMANTAN TENGAH; SERTA PADA PELAKSANAANYA AGAR NANTI TETAP MENGEDEPANKAN PROTOKOL KESEHATAN.

SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA KE-7 PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020, SEKALIGUS RAPAT PARIPURNA KE-1 PEMBUKAAN MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2020.




SEMOGA ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA, TUHAN YANG MAHA KUASA SELALU MEMBERI PERLINDUNGAN DAN KEBERKAHAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KITA BERSAMA.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULAHI WABARAKATUH

PALANGKA RAYA, 7 SEPTEMBER 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA,

WIYATNO, SP

SEKRETARIAT DPRD PROV. KALTENG	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DEWAN	
KABAG PERSIDANGAN, PER UU & KEHUMASAN	
KSB. PERSIDANGAN & KEHUMASAN	
KSB. PERUU & RISALAH	
PELAKSANA	

SAMBUTAN KETUA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

10

DO'A PADA ACARA

Rapat Paripurna Ke : 7 Penutupan masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 sekaligus Rapat Paripurna Ke-1 Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020
Palangka Raya, 7 September 2020

Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Seiring puji syukur atas ridha Mu mempertemukan kami dalam acara DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, kami mohon kehadiran Mu mengharapkan limpahan kasih sayang Mu. Semoga kegiatan rapat ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat curahan rahmat serta perlindungan- Mu.

Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana

Jadikanlah kegiatan ini, sebagai upaya penting dan strategis bagi Pemangku Kebijakan Pembangunan Daerah dalam mendorong pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, daerah Kalimantan Tengah, agar bisa berjalan sesuai aturan, bersih dan aman.

Ya Allah Yaa Kariim

Jadikanlah kegiatan ini, sebagai sarana untuk menguatkan jalinan koordinasi dan sinergitas antara lembaga DPRD, pemerintah daerah dan pihak terkait dalam rangka menegakkan peraturan dan perundang-perundangan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah kami Kalimantan Tengah.

Ya Allah Ya Qadir Tuhan yang Maha Kuasa

Jadikanlah lembaga dan kegiatan ini sebagai simbol kebersamaan, perdamaian, perlindungan dan kesejukan hati kami untuk semakin mempererat jalinan silaturahmi, rajutan toleransi diantara kami, untuk terus menimba ilmu pengetahuan dan berkarya demi daerah dan masyarakat kami di Bumi Tambun Bungai menuju masyarakat maju, mandiri dan bermartabat. Berkahilah segala usaha kami, bimbinglah kami pada jalan yang selalu Engkau ridhai, dan atas setiap permasalahan, berikan jalan pemecahan, sehingga kami mampu mencapai tujuan.

Ya Allah Kariim, Anugerahkanlah kepada kami perpaduan niat hati dengan perbuatan, perpaduan kehendak dengan pelaksanaan. Teguhkanlah kami dalam keakraban dan kesatuan, sehingga segala daya upaya kami akan menjadi kenyataan.

Berilah petunjuk kebenaran untuk kami jalankan, tetapkanlah kami dalam Iman dan Taqwa yang menjadi dasar bagi kami dalam beramal dan bekerja.

Yaa Rabbana, Yaa Waasi'al Maghfirah.

Karuniakan kami keselamatan, kekuatan, kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Ya Allah... Yang Maha membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati kami dalam iman dan taqwa, walau sebesar apapun ujian dan cobaan, kami mampu melaluinya sehingga dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan berhasil guna. Tugas dapat kami jalankan dengan seksama dan ibadah kepada Mu tetap kami tunaikan dengan semestinya.

Alam dengan segala isinya berada dalam genggaman-Mu, Engkau Maha Kuasa atas segalanya, Engkau Maha Pemurah atas segala Berkah, Engkau Maha Mendengar atas segala pinta, Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kabulkanlah semua do'a kami.

Allaahumma innaa na'udzubika minal barashi, wal junuuni, wal judzaami, wa sayyi'il asqaami.

(Yaa Allah, kami berlindung kepada Mu dari penyakit lepra, gila, kusta dan penyakit-penyakit buruk/menular).

Sebagai manusia yang lemah kami terus berusaha dengan memakai cara dan upaya apa saja untuk terhindar dari pandemi covid 19 ini, hanya Engkau lah tempat kami mengabdikan dan mengadu...

Ilaahii lastu lilfirdausi ahla walaa aqwa 'alan naaril jahimi... fahabli taubatau waghfir dzunuubii

Esinnaka qhaafidzaukabil laadziimi
raiiiiiiika qhaafidzaukabil laadziimi